

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN SEMBAKO UNTUK
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA
KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KECAMATAN
PULUNG**

SKRIPSI



Oleh :

Novanda Eka Nurazizah

NIM. 401190290

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN SEMBAKO UNTUK
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA
KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KECAMATAN
PULUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh :

Novanda Eka Nurazizah

NIM 401190290

Pembimbing :

Ajeng Wahyuni, M.Pd

NIP 199307072019032030

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Nurazizah, Novanda Eka. Efektivitas Pemberian Bantuan Progam Keluarga

Harapan (PKH) dan Sembako Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Pulung. *Skripsi*. 2023. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Ajeng Wahyuni, M.Pd.

Kata Kunci : PKH, Sembako, kesejahteraan masyarakat, Mekanisme, Efektivitas Progam, Faktor Penghambat

Kesejahteraan merupakan alat ukur untuk melihat tingkat kemiskinan disuatu negara. Pada tahun 2007 pemerintah telah melaksanakan program bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Dan pada tahun 2020 pemerintah telah melaksanakan program bantuan pangan non tunai. Salah satu tujuan PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, dan salah satu tujuan Sembako yakni untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Permasalahan yang akan dicari jawabnya dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme penyaluran bantuan, bagaimana efektivitas program PKH dan Sembako, dan apa saja faktor yang menghambat keberhasilan program PKH dan Sembako untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Pulung.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisis data secara induktif.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, menunjukkan bahwa pemberian bantuan PKH dan Sembako di Kecamatan Pulung kurang efektif dan belum sesuai dengan indikator efektivitas yang digunakan yakni: ketepatan sasaran belum efektif karena masih terdapat KPM yang tidak mendapatkan manfaat bantuan PKH dan Sembako, sosialisasi program belum ada pengembangan pelatihan terhadap KPM, tujuan program belum sesuai karena KPM belum memenuhi kewajiban sebagai penerima manfaat, dan pemantauan program belum sesuai karena pemantauan tidak dilakukan secara merata terhadap KPM. Mekanisme penyaluran bantuan belum sesuai dengan pedoman umum PKH dan sembako pada pencairan dan pemanfaatan dana bantuan. Faktor yang menghambat keberhasilan program PKH dan sembako yakni Koordinasi, karena tidak terdapat koordinasi dengan pihak kepala dusun RT/RW mengenai data sasaran calon penerima bantuan, tidak sesuai perencanaan dengan kebutuhan KPM, dan KPM belum begitu paham dengan jasa keuangan formal sebagai alat pencairan dana bantuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1.	Novanda Eka Nurazizah	401190290	Ekonomi Syariah	Efektivitas Pemberian Bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Pulung

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk dijadikan
pada ujian skripsi.

Ponorogo, 27 Maret 2023



Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Subur Prasetyo, S.Ag., M.E.I
NIP. 197801122006041002

Menyetujui,

Ajeng Wahyuni, M.Pd.
NIP. 199307072019032030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : Efektivitas Pemberian Bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Pulung

Nama : Novanda Eka Nurazizah

NIM : 401190290

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.Si.
NIP. 197202111999032003

Penguji I :
Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
NIP. 197506022002121003

Penguji II :
Ajeng Wahyuni, M.Pd.
NIP. 199307072019032030

Ponorogo, 11 April 2023

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : Novanda Eka Nurazizah
NIM : 401190290
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Efektivitas Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
dan Sembako untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada
Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Pulung

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 03 Mei 2023



Novanda Eka Nurazizah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novanda Eka Nurazizah

NIM : 401190290

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN PROGAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DAN SEMBAKO UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KELUARGA
PENERIMA MANFAAT DI KECAMATAN PULUNG**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 27 Maret 2023

Pembuat Pernyataan


1000
METERAI
TEMPEL
1DFFBAKX252873183
Novanda Eka Nurazizah

NIM 401190290

DAFTAR ISI

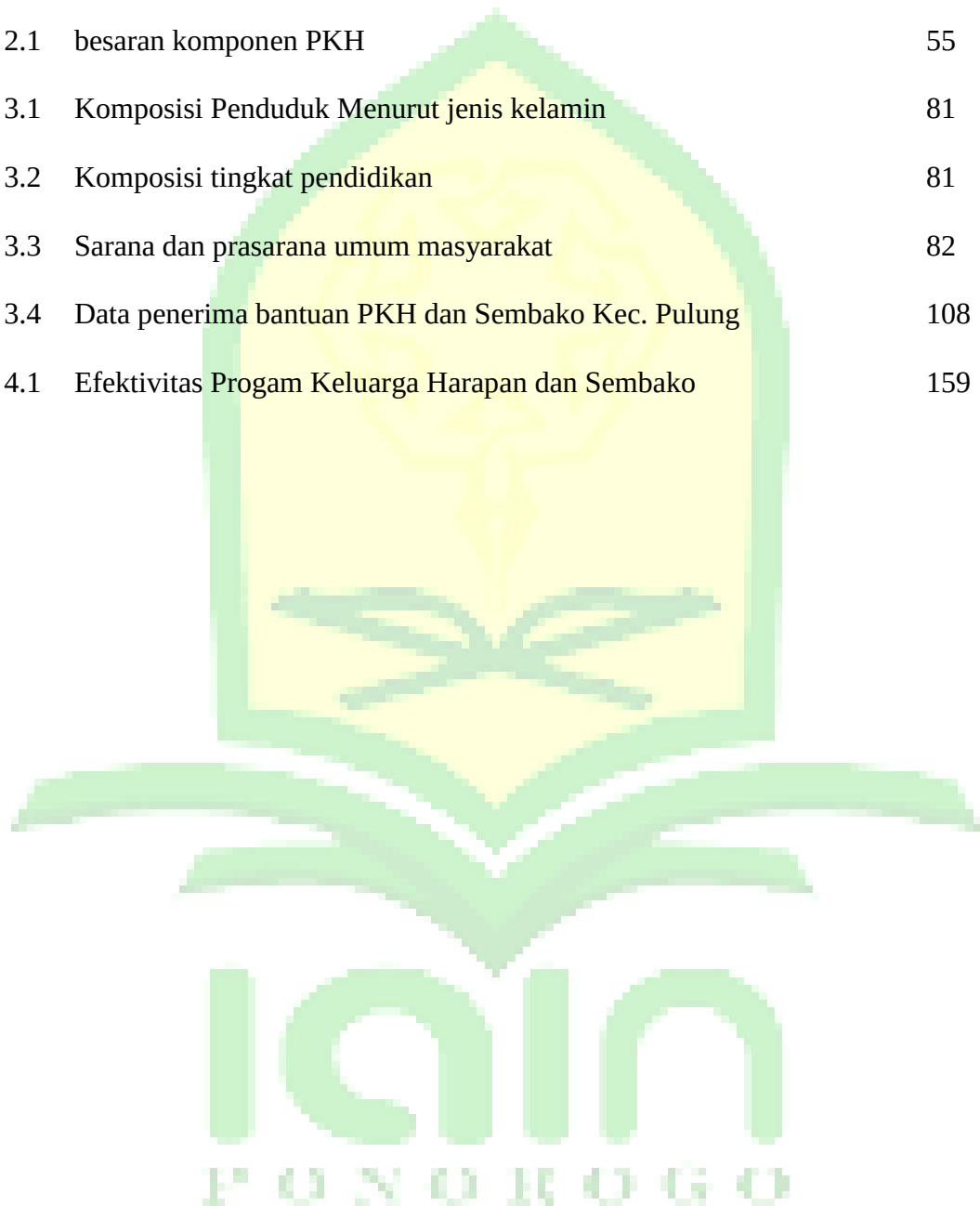
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Studi Penelitian Terdahulu	14
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	22
2. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan)	23
3. Data dan Sumber Data	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Teknik Pengolahan Data	28
6. Teknik Analisis Data.....	30
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	33
G. Sistematika Pembahasan.....	35
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Teori Efektivitas	37
1. Definisi Efektivitas Progam.....	37
2. Indikator Efektivitas	39
3. Ukuran Efektivitas	42
4. Efektivitas dalam Perspektif Ekonomi Islam	44

B. Faktor Penghambat Keberhasilan Progam	45
1. Koordinasi	45
2. Perencanaan.....	46
3. Ketepatan Layanan.....	46
C. Progam Keluarga Harapan (PKH)	47
1. Pengertian Progam Keluarga Harapan (PKH)	47
2. Tujuan Progam	49
3. Dasar Hukum PKH	53
4. Kriteria Penerima Manfaat PKH.....	53
5. Komponen bantuan PKH	55
6. Hak dan Kewajiban KPM PKH	56
7. Mekanisme Penyaluran PKH	57
8. Indikator Keberhasilan PKH	59
D. Progam Sembako	61
1. Pengertian Progam Sembako	61
2. Tujuan dan Manfaat Sembako	63
3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sembako.....	64
4. Prinsip Pelaksanaan Progam	66
5. Penerima Manfaat	67
6. Bahan Pangan.....	67
7. Indikator Keberhasilan Progam Sembako.....	68
E. Kesejahteraan Masyarakat	68
1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	68
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	70
F. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam.....	74
 BAB III. PAPARAN DATA	
A. Gambaran Umum Kecamatan Pulung	79
1. Kondisi Umum Kecamatan Pulung.....	79
2. Kondisi Iklim dan Topografis	80
3. Kondisi Demografis Kecamatan Pulung.....	80

4. Kondisi Masyarakat Kecamatan Pulung	83
B. Mekanisme Penyaluran Bantuan	84
1. Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH.....	84
2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sembako.....	87
C. Efektivitas Pemberian Bantuan PKH dan Sembako	103
1. Ketepatan Sasaran	104
2. Sosialisasi Progam	115
3. Tujuan Progam.....	117
4. Pemantauan Progam.....	127
D. Faktor Penghambat Keberhasilan PKH dan Sembako.....	131
1. Koordinasi	131
2. Perencanaan.....	133
3. Ketepatan Layanan.....	134
 BAB IV. PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH dan Sembako	136
B. Efektivitas Pemberian Bantuan PKH dan Sembako	138
C. Faktor Penghambat Keberhasilan PKH dan Sembako.....	150
D. Efektivitas Progam dalam Perspektif Ekonomi Islam	166
E. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam	169
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	172
B. Saran.....	173
DAFTAR PUSTAKA.....	175

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Perkembangan Penduduk Miskin di Kab. Ponorogo tahun 2003-202	4
2.1	besaran komponen PKH	55
3.1	Komposisi Penduduk Menurut jenis kelamin	81
3.2	Komposisi tingkat pendidikan	81
3.3	Sarana dan prasarana umum masyarakat	82
3.4	Data penerima bantuan PKH dan Sembako Kec. Pulung	108
4.1	Efektivitas Progam Keluarga Harapan dan Sembako	159



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
4.1	Alur Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH	142
4.2	Alur Mekanisme Penyaluran Bantuan Sembako	149



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan termasuk negara yang menjadikan kesejahteraan bangsanya sebagai tujuannya. Rumusan kesejahteraan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kesejahteraan menjadi judul khusus pada Bab IV yang didalamnya terdapat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial.¹ Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ciri dari tercapainya tujuan tersebut menurut Bung Karno dalam buku Lahirnya Pancasila adalah tidak adanya kemiskinan.² Namun demikian, saat ini kesejahteraan yang dicita-citakan belum tercapai dan masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakatnya maupun oleh pendiri bangsa ini.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas dalam rencana jangka menengah nasional, meliputi lima sasaran pokok, yaitu: pengelolaan sumberdaya alam serta peningkatan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, perbaikan mutu lingkungan hidup, peningkatan kualitas manusia, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 2.

² Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Justitia Islamica* Vol. 11 No. 1 (2014): 22.

Implementasinya, yang menjadi prioritas utama pembangunan nasional diberikan kepada pemeliharaan kesejahteraan rakyat, penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.³

Kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk tatanan dalam kehidupan dan penghidupan mengenai material, sosial dan spiritual, hal tersebut meliputi timbulnya rasa selamat, aman dan tentram secara lahir maupun batin yang memungkinkan setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan secara jasmani, rohani dan juga kehidupan sosial dengan orang lain, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga serta masyarakat.⁴

Kondisi sejahtera dapat terjadi jika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta memperoleh perlindungan dari risiko-risiko yang mengancam kehidupannya. Ilmu ekonomi kesejahteraan adalah salah satu cabang ekonomi yang normatif. Ekonomi kesejahteraan membahas tentang bagaimana akhirnya kegiatan ekonomi bisa berjalan secara optimal dan juga akan memikirkan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan semangat umat Islam untuk berusaha menerapkan ajaran agamanya, muncul kajian tentang kesejahteraan dalam perekonomian menurut syariah Islam. Paradigma ini menjelaskan bahwa

³ Zainollah dan Farid Wahyudi, “Analisis Efektivitas Kebijakan Program Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Ipteks* Vol.3, No.2 (2018): 165.

⁴ Eunis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Perkembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006), 13.

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah atau hukum-hukum Islam. Meskipun belum semua meyakini akan tercapainya dalam menyelesaikan masalah-masalah perekonomian, sosial, politik, hukum, budaya, dan berbagai masalah alam, namun paradigma ini memberikan pemahaman yang sempurna tentang alam semesta yaitu langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia sebagai khalifah didalamnya.

Realitanya dalam kehidupan ini terjadi perbedaan dan kesenjangan ekonomi atau rezeki diantara pelaku ekonomi, karena hal tersebut merupakan sunnatullah. Pada kondisi inilah yang secara religius akan menciptakan mekanisme ekonomi, dimana yang memiliki perekonomian lebih menolong yang memiliki perekonomian kurang mampu sehingga kesenjangan akan berkurang walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali. Dengan demikian hanya tolong menolong dan saling memberilah, maka kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi, karena yang kaya membutuhkan yang miskin dan sebaliknya yang miskin membutuhkan yang kaya.⁵

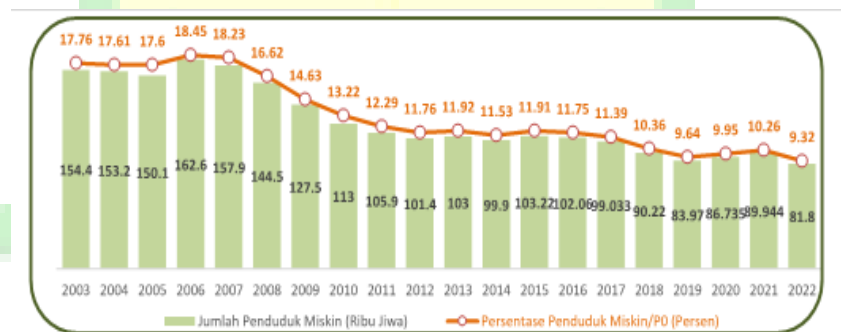
Banyaknya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan menjadikan pemerintah berupaya keras dalam program pemberantasan kemiskinan yang melalui penyaluran bantuan dana dari pemerintah pusat dan daerah. Namun, program ini tidak berjalan semestinya dan tidak tepat sasaran. Hal ini menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemulihan ekonomi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan

⁵ Agung Eko Purwana, (Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam), 24

pertumbuhan laju ekonomi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa ketika angka kemiskinan menurun tidak berarti bahwa kondisi ekonomi selalu meningkat. Tujuan dari pemulihan ekonomi nasional adalah untuk mengoptimalkan angka kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dapat diukur melalui tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan penyebaran pendapat.⁶

Berkaitan dengan kondisi tersebut, pendapatan dan latar belakang ekonomi tidak akan cukup untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Akan tetapi, kondisi tersebut dapat ditinjau dari kebutuhan ekonomi masyarakat.⁷

Tabel 1.1
Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2003 – 2022



Sumber BPS Ponorogo 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Selama periode Maret 2021- Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo berkurang sebanyak 8,14 ribu jiwa, dari 89,94 ribu jiwa pada Maret 2021 menjadi 81,80 ribu jiwa pada Maret 2022 atau mengalami penurunan sebesar 9,05 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo dalam

⁶ Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Unit Peberbit dan Percetakan STIM YKPN, 2020), 23.

⁷ Mowen John.C, *Perilaku konsumen Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 2020), 28.

rentang waktu satu tahun, tersebut menurun sebesar 0,94 poin, dari 10,26 persen pada Maret 2021 menjadi 9,32 persen pada Maret 2022.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Kabupaten Ponorogo pada Maret 2022 adalah sebesar Rp362.461,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2021, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp21.371,00 per kapita per bulan.⁸

perkembangan jumlah penduduk miskin di kabupaten Ponorogo setiap tahunnya tidak stabil terkadang mengalami peningkatan bahkan juga mengalami penurunan seperti berita dari BPS Ponorogo yang menyatakan bahwa pada garis kemiskinan di ponorogo mengalami penurunan sebesar 9,05 persen. Namun dengan masih adanya RTS (Rumah Tangga Sasaran) maka dapat ditentukan program-program pemerintah untuk penduduk miskin. RTS didapat dari hasil sensus BPS sedangkan jumlah penduduk miskin didapat dari survey sosial ekonomi nasional untuk evaluasi program pemerintah di bidang pengentasan kemiskinan. Dari data RTS yang diperoleh akan digunakan untuk program bantuan sosial, diantaranya yaitu adanya bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sehat (KKS), Sembako (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

⁸ Badan Pusat Statistik Ponorogo, *Profil Kemiskinan Maret 2022 Kabupaten Ponorogo*, 2023, diakses dalam <https://ponorogokab.bps.go.id/pressrelease/2022/12/20/59/profil-kemiskinan-maret-2022-kabupaten-ponorogo.html>. Diakses pada 19 Januari 2023.

Dalam hal ini program keluarga harapan (PKH) dan program sembako merupakan salah satu program pemerintah sebagai inisiatif pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat dan peduli terhadap kesehatan dan pendidikan sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang sehat dan cerdas.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalanya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. Program PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus mata rantai kemiskinan dalam jangka panjang.⁹

Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktivitas dengan baik sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika kesehatan terjamin maka pendidikan seseorang akan baik, dengan kualitas pendidikan yang layak dan baik maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PKH dalam bidang pendidikan memberikan peluang lebih baik kepada anak-anak untuk mengenyam bangku pendidikan. Jika kedua aspek tersebut sudah terpenuhi maka kualitas sumber daya manusia meningkat sehingga masyarakat dapat mandiri dan mampu mengentaskan diri dari lingkaran kemiskinan.

⁹ Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, "Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan," *Prosiding: Riset&PKM*, Vol. 4 No. 1 (2017): 90.

Adapun tujuan dari adanya bantuan PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Program sembako merupakan transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini terus berkembang, dengan perubahan yang sebelumnya bernama Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), dan Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras, namun menjadi dana bantuan berbentuk uang yang langsung disetorkan ke rekening penerima manfaat dan kemudian uang tersebut harus ditukarkan dengan telur dan beras di agen yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping sembako dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako tidak hanya dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, kacang-kacangan, sayur atau buah dan lain sebagainya yang dapat diperoleh dari pasar lokal. Melalui perluasan penerima bantuan Program Sembako, pemerintah berupaya untuk

menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan gizi masyarakat.¹⁰

Adapun tujuan dari adanya bantuan sembako yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, Meningkatkan bahan pangan dengan ketepatan sasaran, waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan administrasi, Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako keluarga miskin diberikan akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya dibidang kesehatan, dan pendidikan. Kewajiban dibidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian gizi dan imunisasi anak balita. Di bidang pendidikan kewajiban peserta PKH terkait dengan menyekolahkan anak kesekolah dasar dan lanjutan (SD s.d SLTP/SMP).

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat desa perlu dilaksanakan dengan baik. Bantuan ini harus dilandasi oleh rasa kepedulian dan niat tolong-

¹⁰ Syaiful Hanafi, *Wawancara* , Selaku Pendamping PKH Kecamatan Pulung, Minggu, 08 Januari Pukul : 09.30 WIB.

menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako merupakan proses kolaboratif, sehingga semua pihak harus saling membantu. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa partisipasi dari pihak lain. Dengan bantuan pihak lain, seperti pemerintah pusat, daerah, desa dan masyarakat saling bahu-membahu membantu masyarakat yang membutuhkan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako kepada masyarakat Kecamatan Pulung merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat kurang mampu. Dengan disalurkan bantuan ini dari pemerintah ke masyarakat, diharapkan masyarakat mampu mempertahankan keadaan ekonomi keluarga dan dapat dimanfaatkan secara efektif. Selain itu, dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tepat sasaran dalam penyalurannya.

Program keluarga harapan (PKH) dan Sembako di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, banyak mendapatkan respon yang positif dan negatif dari masyarakat. Adapun respon positif dari masyarakat yaitu mereka sangat terbantu dengan adanya program bantuan ini, dengan adanya program bantuan ini beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka sedikit berkurang serta mereka juga menerima pengetahuan tentang kesehatan dan pentingnya pendidikan untuk keluarga mereka yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Adapun tanggapan negatif yang diberikan masyarakat terutama

yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan Sembako, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Titin Nuryana mengatakan bahwa program ini tidak adil karena dalam realitanya penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako ditemukan adanya kesenjangan sosial. Dimana dalam penyalurannya dirasa kurang tepat sasaran, hal ini dikarenakan masyarakat yang sudah dikategorikan masyarakat mampu masih menerima bantuan, sedangkan masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan berhak mendapatkan bantuan justru tidak menerima bantuan sama sekali. Sehingga membuat kecemburuan sosial antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.¹¹ Seharusnya program bantuan ini harus tepat sasaran dalam penyalurannya agar tidak menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat.

Adapun permasalahan lain selain ketidaktepatan sasaran yang muncul akibat bantuan ini yaitu mengenai tujuan pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan yang diberikan, bahwa dana bantuan tersebut tidak dipergunakan sebaik mungkin dan tidak selaras dengan tujuan pemberian bantuan PKH dan sembako. berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Katri beliau mengatakan bahwa dana bantuan tersebut tidak seutuhnya dipergunakan untuk keperluan sekolah anak saja namun juga untuk membeli kebutuhan pribadi seperti baju, tas, jajan dan sebagainya.¹² Seharusnya dana bantuan yang diberikan harus dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu untuk menunjang biaya dalam bidang kesehatan dan pendidikan bukan dipergunakan untuk menuruti hawa nafsu dan berfoya-foya.

¹¹ Titin Nuryana, Wawancara, 21 Januari 2023.

¹² Sriyati, Wawancara, 21 Januari 2021.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan diatas maka penulis ingin mengetahui efektivitas pemberian bantuan progam PKH dan Sembako untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada keluarga penerima manfaat dikecamatan pulung dengan judul

“Efektivitas Pemberian Bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) Dan Sembako Untuk Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Pulung”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan sembako untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Pulung?
2. Bagaimana efektivitas pemberian bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Pulung?
3. Apa faktor penghambat keberhasilan pemberian bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako di Kecamatan Pulung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme penyaluran bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Pulung

2. Untuk menganalisis efektivitas pemberian bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Pulung
3. Untuk menganalisis faktor penghambat keberhasilan yang terjadi dalam pemberian bantuan Progam Keluarga Harapan dan Sembako di Kecamatan Pulung

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber penambah wawasan dan referensi lebih lanjut, khususnya terkait efektivitas Pemberian Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Progam Sembako untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikecamatan pulung. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan gagasan bagi perekonomian, khususnya pada bidang pembangunan ekonomi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Peneltian ini di harapkan dapat dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan di harapkan dapat menjadi literatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau landasan berpikir untuk melakukan evaluasi dan optimalisasi dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai penambah pengetahuan mengenai bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako dan diharapkan masyarakat semakin lebih sadar akan kesehatan dan pendidikan serta Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan dan Program Sembako dapat membantu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

4. Bagi Akademisi

Hasil peneliti ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam hal penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako terhadap kesejahteraan masyarakat

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi yang lebih sempurna.

E. Studi Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Asti Prichatin dengan judul skripsi “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan keluarga (studi kasus pada PKH Desa Kesegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”, penelitian ini diperoleh hasil bahwa efektivitas PKH yang diukur melalui empat indikator yaitu ketepatan sasaran, pemahaman tujuan program, adanya sosialisasi, dan pemantauan program menunjukkan bahwa PKH di Desa Kesegeran sudah berjalan dengan efektif. Terdapat beberapa perubahan indikator keseluruhan. Jika dilihat dari perspektif Islam yakni jaminan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara, konsep kerja keras, serta tidak bergantung diri kepada orang lain. Belum sepenuhnya tercapai, hal ini karena masih terdapat KPM yang merasa keberatan apabila bantuan dari pemerintah dihentikan, serta menunggu- nunggu waktu pencairan dana bantuan sosial PKH.¹³
2. Skripsi Rahma Dwi Octavia, dengan judul skripsi “Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam” dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan program BPNT tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dapat mengurangi beban pengeluaran pangan sehingga dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Implementasi penyaluran bantuan BPNT sudah sesuai dengan peraturan menteri sosial No. 20 tahun

¹³ Asti Prichatin, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH desa Kesegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” Skripsi (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2019).

2019 terkait penyaluran bantuan yang telah terdata dalam DTKS, namun tidak menutup kenyataanya data tersebut tidak rutin diperbarui sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam penyaluran pangan non tunai. Penyaluran BPNT di kelurahan Lemoe ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi islam karena hanya berpedoman pada prinsip tauhid, keseimbangan dan khalifah akan tetapi tidak sesuai dengan prinsip keadilan.¹⁴

3. Skripsi Desi Pratiwi, dengan judul skripsi “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada peserta pkh desa kedaton I Kec. Batangsari Nuban Kab. Lampung Timur). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa progam PKH di desa kedato belum mensejahteraan RTM, namun Program PKH telah membantu Rumah Tangga Miskin dan mengurangi beban rumah tangga miskin dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan bagi lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat. Dan progam PKH dikatakan masih belum tepat sasaran karena pada saat pengusulan calon penerima manfaat PKH tersebut masih tergolong miskin, rentang waktu penerimaan bantuan yang relatif lama sehingga masyarakat telah mengalami perkmbangan pada sisi ekonomi.¹⁵

¹⁴ Rahma Dwi Octavia, “Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam” Skripsi (Universitas IAIN Negeri Parepare, 2022).

¹⁵ Desi Pratiwi, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada peserta pkh desa kedaton I Kec. Batangsari Nuban Kab. Lampung Timur).” Skripsi (Lampung Timur, Universitas IAIN Metro, 2020).

4. Skripsi Eny Kusumawati dengan judul skripsi “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)”, dengan hasil dari penelitian ini yaitu implementasi PKH yang diukur melalui indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu. Seluruh indikator tersebut terpenuhi. Namun PKH desa Soko dan terbatasnya kuota dari pemerintah untuk Desa Soko. Dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan takafful, dalam implementasinya PKH sudah diterapkan secara bertanggung jawab dan sebagai sistem jaminan sosial untuk masyarakat. Namun prinsip keadilan belum terpenuhi, karena PKH belum 33 merata untuk masyarakat Desa Soko.¹⁶
5. Wiwin Nuryana, Skripsi dengan Judul skripsi “Efektivitas Pemberian Bantuan Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Sawoo Kabupaten Ponorogo” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian Bantuan Program Jatim Puspa di Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo sudah efektif atau sesuai dengan indikator efektivitas yang digunakan yakni ketepatan sasaran, adanya sosialisasi program, tercapainya tujuan program, dan pemantauan program. Namun masih harus diperbaiki di pemantauan program karena dengan pemberian

¹⁶ Erny Kusumawari, “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati” Skripsi (Sumatera Utara, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019).

program Jatim Puspa tidak berjalan sesuai tujuannya seperti kurangnya pemantauan secara merata oleh pihak panitia terhadap KPM penerima. Meskipun sudah efektif namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KPM antara lain data kurang valid, kurang komunikasi, menggantungkan usaha kepada orang lain, keterbatasan promosi, serta sedikitnya keinginan dalam menjalankan usaha.¹⁷ Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitian dimana objek dalam penelitian yaitu di kecamatan sawoo dan variabel dalam penelitian ini yaitu program bantuan Jatim Puspa. Sedangkan persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan skala pengukuran efektivitas yang sama.

6. Karmila, Skripsi dengan Judul skripsi “ Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa” Tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui efektivitas program BPNT. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program BPNT Belum maksimal dalam tepat sasaran mengakibatkan masyarakat merasa kecewa para pelaksana BPNT dan pelaksana BPNT tidak mendata dengan baik kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dan dalam penerimaan bantuan masih kurang tepat waktu yang sudah ditetapkan dapat dikatakan

¹⁷ Wiwin Nuryana, “Efektivitas Pemberian Bantuan Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Sawoo Kabupaten Ponorogo” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022).

belum efektif sehingga jumlah yang didapatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak sesuai dengan jumlah bahan pangan yang diberikan. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai program BPNT, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.¹⁸

7. Andre Agus Kurniawan, Skripsi dengan judul skripsi “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo” Tahun 2020 Studi S1 Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Studi ini memiliki tujuan memberikan gambaran mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST) di Perumahan Taman Cikande, Jayanti–Tangerang. Desain studi ialah kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data ialah interview, pengamatan, dan dokumentasi. Studi ini menghasilkan realisasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo efektif ditinjau dari Pendamping, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan E-Waroeng yang memiliki tugas memberikan pengetahuan KPM sehingga mereka mengerti cara realisasinya. Sasaran belum tepat yakni tidak sesuai syarat yang ditetapkan karena mendapatkan bantuan lain. Kurangnya pemantauan merupakan sebab dari hal ini. Waktu yang dijalankan sudah efektif sesuai jadwal aktivitas di E-Waroeng ialah setiap bulan tanggal 10, 11 dan 12. Kesamaan penelitian ialah topik dan desain studi. Pembedanya ialah jenis

¹⁸ Karmila, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa” (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

bantuan yang disalurkan yakni Bantuan Pangan Non Tunai dan PKH dengan Bantuan Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa).¹⁹

8. Khaerul Anwar, Skripsi dengan judul skripsi “Efektivitas [Rogam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota” berdasarkan hasil olahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan walaupun implementasi program rumah layak huni di kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan kegiatan tersebut. Adanya ketidak transparan dalam penelitian penerima bantuan dengan masyarakat, masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan rumah layak huni dan kurang tepatnya waktu dalam program pembangunan rumah bantuan layak huni. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yaitu di Kecamatan Tebing Tinggi Kota dan jenis bantuan, dimana dalam penelitian ini lebih ke bedah rumah/bantuan Rumah layak huni. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas program bantuan PKH untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, skala pengukuran serta indikator yang sama.²⁰

¹⁹ Andre Agus. Kurniawan, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Surabaya :” (Surabaya, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945, 2020).

²⁰ Khaerul Anwar, “Efektivitas [Rogam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota” (Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

9. Suyanti, Skripsi dengan judul skripsi “ Efektivitas Progam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi kasus di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas). Hasil penelitian menunjukan efektivitas PKH yang diukur melalui empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pengetahuan dan ketepatan tujuan program serta pemantauan program menunjukan bahwa PKH di Desa Besuki telah berjalan dengan efektif. Terdapat beberapa aspek keberhasilan PKH pada kehidupan keluarga miskin di Desa Besuki. Dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan takaful (jaminan sosial) sudah tercapai, hanya saja pada prinsip keadilan belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan masih banyak masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) namun belum mendapatkan bantuan PKH. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian dan fokus pembahasannya lebih ke pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan persamaanya yaitu menggunakan variabel yang sama dan skala pengukuran efektivitas dengan indikator yang sama yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pemantauan program.²¹
10. Dwi Ayu istiqomah, Skripsi dengan judul skripsi “Efektivitas Pelaksanaan Progam Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid '19 di Kecamatan Taman Kabupaten Pematang”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif,

²¹ Suyanti, “Efektivitas Progam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi kasus di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)” (Purwokerto, Universitas Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022).

dimana penulis mengamati fenomena atau permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian untuk pengumpulan data data peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sembako di Kecamatan Taman belum dikatakan efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator pendukungnya yaitu masih kurang tepat sasaran program, kurang tepat waktu, pemahaman atau pengetahuan untuk penerima bantuan yang masih kurang dan kurang puas masyarakat yang tidak menerima bantuan. Pelaksanaan Program Sembako dikatakan belum efektif dikarenakan adanya beberapa hambatan. Dalam menangani hambatan yang ada upaya yang dilakukan antaralain meningkatkan sosialisasi, menciptakan aplikasi post giro cash, dan mendata masyarakat kurang mampu secara akurat. Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Sembako disarankan untuk diadakan pelatihan atau bimbingan teknis kepada para tenaga pelaksana Program Sembako di Kecamatan Taman Kabupaten Pematang. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu di Kecamatan Taman Malang. Adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas mengenai program bantuan sembako akan tetapi dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada program PKH dan Sembako untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pulung.²²

²² Dwi Ayu, "Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid '19 di Kecamatan Taman Kabupaten Pematang" (Malang, Universitas IPDN, 2022).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti.²³ Studi ini memiliki tujuan yakni memberikan penjabaran tentang tingkat efektivitas Progam PKH dan Sembako untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pulung

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut pendapat Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif.²⁴ Penelitian *field research* dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, dalam penelitian ini bersumber pada

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 24.

²⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 5.

lokasi di Kecamatan pulung yang terkait dengan demografi kependudukan yang berhak menerima bantuan PKH dan Sembako.

Menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁵ Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara keseluruhan. Sehingga tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

2. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Terdahulu)

Penentuan lokasi penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus rumusan masalah penelitian. Dalam penentuan lokasi penelitian perlu untuk mempertimbangkan waktu, biaya, tenaga yang dimiliki peneliti kualitatif. Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Sembako di Kecamatan Pulung Kabupaten. Peneliti memilih lokasi di Kecamatan Pulung karena beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah dilihat dari segi waktu dan tenaga. Peneliti juga tidak dituntut biaya studi lapangan yang lebih besar bila dibandingkan dengan penelitian di tempat lain. Alasan lain yang lebih mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini. Pertimbangan tersebut adalah fenomena

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 4.

masalah terkait efektivitas pemberian bantuan sosial pada penerima Program Keluarga Sosial (PKH) dan sembako yang membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Kecamatan Pulung.

3. Data dan Sumber Data

Data dari penelitian yang diajukan adalah data berdasarkan dari data primer yaitu berdasarkan informasi dari pelaku pelaku utama dan juga arahan terjun secara langsung dilapangan yaitu dalam penelitian progam PKH dan Sembako Di Kecamatan Pulung. Selain didukung dari adanya data primer juga adanya dari data sekunder yaitu melihat obyek orang lain didalam penelitian ini. Dan pada sumber data dalam penelitian ini juga digunakan dengan data wawancara secara lisan sehingga dalam pengumpulan datanya disebut dengan responden dimana orang orang dapat merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik itu pertanyaan tertulis ataupun lisan.

Sehingga dalam kajian penelitian ini mampu memberikan informasi secara akurat dan relevan yang dapat membantu informasi terhadap penelitian yang diajukan yaitu penelitian kualitatif. Selain dari adanya penjelasan diatas berdasarkan data dan sumber data, juga adanya dukungan melalui tahapan terjun secara langsung, maka adanya jenis data dan sumber data yang diperoleh diantaranya sebagai berikut:

a. Narasumber (Informan)

Dalam penelitian berjenis kualitatif ini sumber datanya bisa dikatakan responden dikarenakan adanya respon secara langsung dari

orang yang diberi pertanyaan dengan menjawab secara lisan kepada peneliti. Dan dalam penelitian ini juga adanya pihak narasumber yang di wawancarai guna mendapatkan informasi terkait Program PKH dan Sembako. Oleh karena itu disebut dengan informan atau orang yang memberikan informasi, sumber informasi, ataupun sumber data terhadap subyek yang ditelitinya dikarenakan sebagai data primer atau pelaku utama guna memberikan informasi yang diberikan, terhadap kajian data yang relevan dan akurat sehingga peneliti tidak hanya melakukan penalaran saja akan tetapi berdasarkan data dan sumber data yang fakta. Informasi didapatkan di Kecamatan Pulung ialah bentuk data primer studi ini. Data ini didapatkan melalui interview dan pengamatan dari pendamping PKH, pendamping sembako, dan Masyarakat yang mendapatkan Bantuan Program PKH dan Sembako di Kecamatan Pulung tahun 2022.

b. Peristiwa atau Aktivitas

Data atau informasi dalam penelitian ini juga menggunakan peristiwa yang terjadi, dikarenakan dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu adanya permasalahan yang terjadi pada bantuan program PKH dan Sembako berdasarkan efektivitas pemberian bantuannya, kendala dan dampaknya dan juga dalam penelitian ini didukung dengan terjun secara langsung ke lapangan

berdasarkan pengamatan terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subyek yang ditelitinya.

c. Dokumen atau Arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, yang bisa disebut juga dengan data sekunder berdasarkan kajian dokumen, arsip ataupun buku berdasarkan efektivitas bantuan program PKH dan Sembako di Kecamatan Pulung. Sehingga sangat penting terhadap kajian sumber data dalam penelitian kualitatif.

Sehingga dalam adanya data dan sumber data diatas juga adanya keterkaitan dari rumusan masalah baik dari data primer ataupun dari data sekunder, dan dalam penelitian ini juga adanya pendekatan secara wawancara face to face dalam pendekatan penelitian dengan pertanyaan mengenai program PKH dan Sembako, kendala serta dampak setelah menerima bantuan penganalisisannya seperti apa setelah adanya kajian berdasarkan data dan sumber datanya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis

dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁶ Hal ini, observer melihat mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan agar pokok permasalahan dapat diteliti secara langsung di daerah Ponorogo yang masuk kedalam daerah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengamati pengelolaan penerimaan bantuan untuk peserta PKH guna untuk melihat seberapa efektif pemberian bantuan Program keluarga Harapan (PKH).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, terutama yaitu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo dan pihak dari Dinas Sosial Ponorogo.

Agar wawancara menjadi lebih valid, peneliti merekam hasil wawancara untuk keperluan pengolahan data. Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 145.

²⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 127.

pertanyaan yang akan diajukan.²⁸ Dalam wawancara terstruktur dilakukan secara individual yakni wawancara peneliti dengan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo, kemudian dengan pendamping dan kordinator daerah Program Keluarga Harapan (PKH) di Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Fungsi dokumentasi digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh 48 melalui metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang digunakan dengan mengumpulkan data-data dokumen atau arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang ada di Kabupaten Ponorogo, yang meliputi letak geografis, struktur perangkat kabupaten, buku-buku, arsip dan pendukung dokumen lainnya.

5. Teknik Pengolahan Data

Metode mengolah informasi kemudian dianalisis dan menginterpretasikannya guna pengambilan keputusan. Metode pengolahan data yang diaplikasikan ialah analisis kualitatif. Analisa kualitatif ialah bentuk analisa berdasarkan dari data dalam format narasi. Metode ini diaplikasikan guna menjabarkan hasil studi mengenai kasus

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 190

menjadi narasi. Terdapat 3 proses dalam metode ini yakni reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan terkait adanya data yang akurat serta relevan yang dapat dipahami.

Teknik pengolahan data studi ini mengarah kepada pengolahan display dengan adanya sumber data, penyajian data yang dilaksanakan ialah interview, pengamatan, dokumentasi. Sedangkan, proses analisa data mencakup adanya analisis, interpretasi data dengan adanya kesimpulan.

a. Reduksi Data

Teknik memilah dan memilih data menjadi lebih rapi melalui mengolah data (mengoding), klasifikasi (memoing), dan rangkum. Teknik ini memberikan kemudahan dalam pengumpulan data selanjutnya dan melengkapinya. Sugiyono menjelaskan mensintesis, memilah perihal pokok, fokus pada topik, tema dan polanya.²⁹

Problem yang sering terjadi ialah terlalu banyak data yang tidak terfokus pada penelitian. Ketika telah melaksanakan interview dan pengamatan maka dapat memperumit proses pengolahan dan analisa. Sehingga, reduksi perlu dilaksanakan guna perlengkapan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 247.

Display data dilaksanakan guna menganalisa problem untuk menemukan solusi.³⁰ Proses ini mempermudah dalam menganalisa gambaran di lokasi. Teknik kualitatif dilaksanakan melalui display data bagan, grafik, narasi singkat, flowchar, dan lainnya.³¹

Teks naratif ialah teknik model Miles dan Huberman yang tidak jarang digunakan. Sehingga, peneliti menggunakan penjabaran narasi guna mudah membaca, merancang laporan, mendalami permasalahan.

c. Penarikan Kesimpulan

Verifikasi ialah proses akhir penelitian guna menjawab rumusan masalah dalam teknik kualitatif atau bisa saja tidak karena fenomena di lapangan berjalan dinamis. Simpulan penelitian ini ialah sementara sebab peneliti masih dapat memperoleh kejadian baru di lapangan. Sehingga, simpulan bisa saja diubah ketika bukti di lokasi bisa dipertanggungjawabkan serta dibuktikan dengan pendukung yang valid maka dapat dikatakan bahwa simpulan kredibel.³²

6. Teknik Analisis Data

Pada suatu penelitian terdapat teknik analisa data menggunakan cara induktif dan deduktif. Dalam penelitian ini teknik analisa data dengan menggunakan cara induktif. Induktif merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat

³⁰ A. Rasyad, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: UHAMKA, 2016). Hal. 15

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 49.

³² *Ibid*, 252.

individual. Penelitian kualitatif mengumpulkan bukti-bukti di lapangan, kemudian disusun berdasarkan sumber-sumber khusus yang terdapat di lapangan. Semua data yang dikumpulkan selama di lapangan secara bertahap dan sejak awal dianalisis, kemudian dikembangkan lalu dimaknai secara khusus, diklarifikasikan kelompok demi kelompok kemudian dianalisis secara mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan dan teori. Teknik analisa data dengan menggunakan cara induktif merupakan analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³³

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁴

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan meliputi:

a. Reduksi Data

³³ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, 54.

³⁴ *Ibid.*, 244.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh secara reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil penjabaran dan pemilihan data sesuai dengan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya jika diperlukan.³⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya yaitu berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Menurut Miles dan Huberman, menyatakan bahwa dalam penyajian data, yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.³⁶

³⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 34.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 249.

d. Penarikan Kesimpulan

(Verifikasi) Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.³⁷

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan yang harus memenuhi; mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Terdapat teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan) dengan teknik pemeriksaan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan membercheck.³⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kriteria kredibilitas dengan teknik pemeriksaan yaitu:

³⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonom*, 34.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 270.

a. Meningkatkan Ketekunan

Ketekunan pengamatan yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan “seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan”.³⁹ Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah ditemukan, selain itu peneliti dapat memberikan diskripsi data yang akurat dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai refrensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara,

³⁹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, 2012, 92.

dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁴⁰

c. Menggunakan bahan refrensi

Refrensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini alat-alat bantu yang digunakan penelitian kualitatif, seperti kamera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, data-data yang ditemukan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga lebih dapat dipercaya.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan alat bantu untuk mempermudah pembaca dalam menelaah dan mengamati isi dari kandungan yang ada didalamnya. Secara garis besar sistematika pembahasan ini terbgai menjadi beberapa bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Latar Belakang

Pada bab ini berisi tentang uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisi uraian tentang telaah penelitian terdahulu dan kajian teori.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2017, 330.

⁴¹ *Ibid.*, 330.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil dan Analisis

Pada bab ini akan membahas mengenai data yang berisi gambaran umum Kecamatan Pulung, yang terdiri dari letak geografis, kondisi monografi, dan kondisi sosial ekonomi, serta kondisi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di Kecamatan Pulung. Analisis data dari penulis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisisnya meliputi efektivitas pencapaian tujuan dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan, Program Sembako dan pengaruhnya di Kecamatan Pulung, efektivitas integrasi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan dan Program Sembako di Kecamatan Pulung, dan efektivitas adaptasi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di Kecamatan Pulung.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi hasil akhir atau kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diberikan penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Efektivitas

1. Definisi Efektivitas Progam

Definisi kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. adapun dalam ensiklopedi umum efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Jadi efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.⁴²

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur, mujarab, membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku), sedangkan efektivitas adalah keadaan yang berpengaruh.⁴³

Menurut Hasan Sadidi dalam ensiklopedia Bahasa Indonesia, efektivitas memiliki arti menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun menurut Handyaningrat efektivitas merupakan bentuk pengukuran dalam tercapainya suatu sasaran tertentu, yaitu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Ali Manajemen Peter F. Drucker,

⁴² Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2018), 7.

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta: Balai Pustaka, 2015), 284.

efektif merupakan pekerjaan yang dilakukan secara benar, sedangkan efisien ialah telah menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Jadi efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam memiliki tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁴

Menurut Soewarno dikemukakan bahwa teori efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁵ Efektivitas diartikan sebagai hasil yang tepat guna. Efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan".⁴⁶ Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan.⁴⁷ Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan buah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas

⁴⁴ Afif Izam Taufik , Ajeng Wahyuni, "Efektivitas Pemberdayaan Zakat Produktif di Laboratorium Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf IAIN Ponorogo," *Nidhomiya : Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* Vol. 1 No 1 (2022): 5.

⁴⁵ Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan* (Jakarta: Manajemen Haji Masagung, 2016).

⁴⁶ Effendy O, *Dinamika Komunikasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

⁴⁷ Julia Sopha, *Efektifitas Program Bantuan Operasional Sekolah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 26.

digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas program merupakan suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk mengukur sejauhmana program tersebut berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Indikator Efektivitas Program

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program.

Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program. Sementara itu pendapat pelanggan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Bahwa evaluasi terhadap efektivitas program dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi pelanggan terhadap program yang diikuti. Bermanfaatkah dan puaskah KPM terhadap program merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi pelanggan terhadap program.⁴⁸ Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada teori efektivitas suatu program yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, menurutnya

⁴⁸ Agus Tulus, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia Utama Ridwan, 2009), 18.

tolak ukur efektivitas dari sebuah program dapat diketahui dari beberapa indikator berikut ini:

a. Ketetapan sasaran

Yaitu sejauh mana KPM dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini ketepatan penentu siapa saja sasaran program PKH dan Sembako yang dalam hal ini adalah kelompok sasaran penerima manfaat yang secara ekonomi belum mampu dan masuk dalam kategori miskin.

b. Sosialisasi program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya. Sosialisasi program yang dijalankan yakni untuk seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bertujuan untuk mengenalkan mengenai Program yang dijalankan.

c. Tujuan program

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan ialah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai proses. Oleh karena itu, agar perolehan tujuan akhir semakin terjamin, dibutuhkan pentahapan, baik dalam artian pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti

prioritasnya. Pencapaian tujuan terdiri dari dua sub-indikator, yaitu: sasaran dan kurun waktu yang merupakan target kongkret.

d. Pemantauan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan.⁴⁹ Menciptakan program yang efektif dapat dilakukan dengan melihat indikator efektivitas program yaitu salah satunya adalah pemantauan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan setelah diikutinya kegiatan program sebagai bentuk perhatian pelaksana program kepada peserta program. Pemantauan dilakukan untuk menyediakan informasi apakah program memberikan perubahan positif yang berkelanjutan bagi peserta pasca mengikuti program. Kegiatan ini penting dilakukan agar dapat diidentifikasi ketika dalam pelaksanaan program berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan sehingga diketahui kekurangannya yang kemudian dicarikan solusi dari permasalahan itu. Soekartawi menyatakan bahwa pemantauan merupakan suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program.⁵⁰

⁴⁹ Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar," *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT* Vol. 2 No. 1 (2017): 34.

⁵⁰ Soekartawi, *Monitoring dan Evaluasi Proyek Pendidikan* (Jakarta: PT Dunia Pustaka, 1995), 3-7.

3. Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai, artinya apabila hasil tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencana awal maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu kegiatan tidak dapat dicapai sesuai rencana awal atau terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya maka kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Ukuran efektivitas, sebagai berikut:

a. Ketepatan Waktu

Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan bahkan kegagalan dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi. Penggunaan waktu yang tepat sejatinya akan menciptakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Ketepatan Perhitungan Biaya

Hal berkaitan dengan tepat atau tidaknya pemanfaatan biaya. Artinya tidak mengalami kekurangan dan kelebihan dalam proses pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan selesai baik. Ketepatan dalam menetapkan biaya juga merupakan bagian dari pada efektivitas.

c. Ketepatan dalam Pengukuran

Hal ini digunakan untuk mengukur suatu kegiatan ataupun tugas yang telah menjadi tanggung jawab dalam suatu organisasi.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Hal ini berkaitan dengan tindakan seseorang untuk memilih kebutuhan dan keinginan yang mana hal ini bukanlah hal yang mudah.

e. Ketepatan Berpikir

Ketepatan berfikir berkaitan dengan berbagai aspek, seperti kehidupan diri sendiri, orang lain dan alam semesta yang mana di dalam aspek tersebut mungkin memiliki pengaruh positif maupun negatif. Oleh karena itu dibutuhkan kejelian agar memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai yang diharapkan.

f. Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran seorang pemimpin dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu organisasi. Dibutuhkan komunikasi yang baik dalam memberikan perintah dari seorang pemimpin kepada anggota sehingga perintah tersebut dapat dimengerti dengan baik.

g. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Suatu organisasi pasti memiliki tujuan, oleh karena itu organisasi akan berusaha untuk mewujudkannya dengan berbagai cara yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

h. Ketepatan Sasaran

Penentuan sasaran merupakan hal yang sangat penting dan menentukan keefektifan suatu organisasi. Jika tepat dalam menentukan sasaran, maka tujuan dari organisasi tersebut akan segera tercapai sesuai

dengan rencana, begitu juga sebaliknya, jika sasaran tidak tepat maka dapat menghambat proses pencapaian tujuan.

Berdasarkan indikator diatas, peneliti akan menggunakan indikator yang lebih mengarah ke masalah yang akan diteliti yakni dengan ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.⁵¹

4. Efektivitas Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Umer Chapra, Ekonomi Islam merupakan cabang pengetahuan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariat islam.⁵²

Menurut manajemen Islam, dengan menggunakan prinsip untuk mengatur hidupnya agar efektif adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Prinsip keseimbangan, maksudnya dalam menjalankan suatu kegiatan seorang muslim harus berbuat baik, bertindak yang harmonis, pantas dan wajar dan tidak berlebih-lebihan, tidak juga kikir dan pelit

⁵¹ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 7-9.

⁵² Siti Nur Mahmudah, "Dasar-Dasar Ekonomi Islam," *Sumatera Barat PT. Global Eksekutif Teknologi*, 2022, 3-4.

⁵³ Mochtar Effendi, *Manajemen Suatu Pengantar Berdasarkan Ajaran Islam* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986), 153-158.

- b. Prinsip mencapai kemanfaatan, maksudnya seorang muslim dalam menjalankan kegiatannya harus bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, bagi lingkungan dan agamanya.
- d. Prinsip tidak boros, yang dimaksud disini adalah setiap muslim dalam menjalankan aktivitasnya dalam menggunakan harta, waktu, dan tenaga tidak digunakan secara boros. Jika dilihat dari sudut ekonomi sifat boros termasuk biaya sehingga dalam penggunaan biaya menjadi beban dalam manajemen
- e. Prinsip berlaku adil, artinya seorang yang ingin mencapai tindakan yang efisien haruslah berlaku adil terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan adil dalam semua perbuatannya.

B. Faktor Yang Memhambat Keberhasilan Progam

Faktor penghambat Keberhasilan progam keluarga harapan (PKH) dan sembako berdasarkan identifikasi masalah menggunakan teori-teori sebagai berikut :⁵⁴

1. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu hal penting yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah progam, adapun menurut Suharto koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling mengatur atau menyepakati sesuatu.⁵⁵ Dengan adanya koordinasi ini

⁵⁴ Nurul Najidah, "Efektivitas Progam Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang," *Journal Of Public Policy And Management Review* Vol. 8 No. 2 (2019): 7.

⁵⁵ Ekardo Apando, "Efektivitas Progam Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan," *Journal STKIP PGRI Sumatera Barat* Vol. 3 No. 1 (2014): 7.

diharapkan dapat merekomendasikan keluarga miskin dan rentan miskin menjadi keluarga penerima manfaat program bantuan PKH dan Sembako serta terdapat koordinasi program PKH dan Sembako dalam pengelolaan data sasaran penerima manfaat.

2. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu hal penting yang berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program. Perencanaan sangat dibutuhkan agar terciptanya keberhasilan program penerima manfaat. Menurut Siagian perencanaan adalah keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan sekarang dan apa yang akan dikerjakan di masa depan.⁵⁶ Dalam hal perencanaan program ini diharapkan terdapat perencanaan yang matang dalam menciptakan kemandirian serta diharapkan terdapat arahan mengenai apa yang harus KPM lakukan dalam penggunaan dan pengelolaan dana bantuan.

3. Ketepatan Layanan

Ketepatan layanan merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya sebuah program. Menurut Ripley ketepatan layanan digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam suatu program dilakukan tepat apa tidak oleh sasaran.⁵⁷ Dalam hal ketepatan layanan ini diharapkan KPM dapat menjalankan pengenalan jasa

⁵⁶ Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

⁵⁷ Mashari Noto Joyo, "Efektivitas Implementasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) di Desa Sooko, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.," *Journal Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Airlangga* Vol. 5 No. 2 (2017): 4.

keuangan dengan tepat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan serta dapat mengoperasionalkan ATM sebagai alat penyaluran dana bantuan.

C. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Kementrian Sosial melaksanakan program bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 11 No. 2 yang menyebutkan bahwa Data Terpadu yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan pemberdayaan sosial. Adapun bantuan sosial yang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.⁵⁸

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat miskin dan rentan yang terdaftar dalam sistem pengelolaan data terpadu yang diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).⁵⁹

⁵⁸ Data Terpadu Bantuan Sosial, Peraturan tentang Bansos, dalam <https://dinsos.ponorogo.go.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/>, Diakses pada 9 Januari Pukul 07.49 WIB

⁵⁹ Virna Museliza, Afrizal, Risma Eliza, “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,” *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik* Volume2 Nomor 1 (2020): 118–27.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk jaminan sosial berupa bantuan sosial bersyarat berbasis rumah tangga miskin. Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) pertama kali diterapkan karena krisis global, dimana kondisi ekonomi memburuk, sulit memenuhi kebutuhan pokok, terutama masyarakat miskin dan rentan, sehingga dikhawatirkan jumlah penduduk miskin akan bertambah.

Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) disinergikan melalui beberapa instansi terkait, terdiri dari Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Informasi, BPS dan Pemerintah Daerah, dilakukan di pusat maupun di daerah. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari program pembangunan yang dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, memperpanjang usia harapan hidup masyarakat, meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan status ekonomi masyarakat miskin menjadi sangat strategis untuk diimplementasikan secara nasional. Ke depan PKH diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan.⁶⁰

Berdasarkan pengertian di atas, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bersyarat yang diberikan pemerintah kepada keluarga miskin yang namanya sudah terdaftar pada data terpadu penanganan fakir miskin dan menjadi salah satu program prioritas pembangunan yang

⁶⁰ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang dan ke depan)* (Bandung: Fokus Media, 2012), 129.

diharapkan dapat membantu dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta mengubah perilaku KPM yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok miskin. Secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH), antara lain:⁶¹

- 1) Meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Maksudnya program PKH ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah KPM yang bersekolah dengan wajib belajar selama 12 tahun, ibu hamil, bayi dan balita telah memeriksakan kesehatannya dengan mudah dan rutin serta lansia diperhatikan kesehatannya melalui posyandu lansia juga penyandang disabilitas melalui home visit untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Dengan adanya bantuan PKH ini membuat anak-anak yang malas untuk bersekolah mau tidak mau harus menyelesaikan pendidikannya sampai sekolah menengah ke atas.

- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Dengan adanya bantuan PKH ini diharapkan dapat menjadikan keluarga penerima manfaat mendapatkan tambahan penghasilan.

⁶¹ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021* (dalam <https://kemensos.go.id> diakses pada 10 Januari 2023).

Jumlah tambahan tersebut berupa uang setelah adanya pencairan sebesar dengan ketentuan penerimaan komponen. Keluarga penerima manfaat diharapkan menggunakan bantuan sesuai aturan yaitu untuk komponen pendidikan digunakan untuk pembayaran biaya sekolah, dalam komponen kesehatan dan kesejahteraan yaitu untuk pemenuhan gizi dari ibu hamil, bayi usia 0-6 tahun, lansia dan penyandang disabilitas.

- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Terdapat perubahan perilaku pada KPM dalam pendidikan baik untuk anak maupun keluarga penerima manfaat, telah terdapat anak keluarga penerima manfaat yang bersekolah hingga perguruan tinggi yang dapat menjadi cerminan bahwa keluarga penerima manfaat telah menganggap pendidikan merupakan hal yang sangat penting, dalam mendidik anak keluarga penerima manfaat sudah mengurangi perkataan yang tidak pantas maupun bertindak kasar sehingga tercipta kesadaran untuk bersikap sopan. Didalam bidang kesehatan keluarga penerima manfaat diharapkan rutin memeriksa kesehatan di fasilitas kesehatan yaitu posyandu dan puskesmas.

Adapun dalam menciptakan kemandirian penerima manfaat diharapkan dapat menanamkan jiwa wirausaha sejak dini untuk berani membuka usaha, membangun usaha kecil-kecilan secara mandiri dari

sisanya uang bantuan tersebut, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pribadi.

4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Adapun tujuan PKH ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara melakukan pencairan tepat waktu dan sosialisasi penggunaan dana untuk mengurangi kemiskinan, serta berusaha untuk merubah mindset masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan. Adapun dalam hal kesenjangan antar masyarakat yaitu melalui pemenuhan makan sehari-hari bagi keluarga penerima manfaat, selain itu berusaha mengusulkan masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan agar tidak menimbulkan kesenjangan antar masyarakat yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan.

5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Adapun tujuan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM diharapkan dapat memberikan ketrampilan terhadap KPM untuk membantu mereka dalam hal seni dan *skill* yang nantinya ketrampilan tersebut dapat dijadikan sebagai modal/acuan mereka untuk membuka usaha baru dan pengetahuan lebih luas terhadap mereka. Adapun mengenai sistem perbankan dan penggunaan ATM sebagai alat penyaluran bantuan sehingga penerima manfaat tidak melibatkan pendamping PKH maupun ketua kelompok PKH. Tujuan operasional Program Keluarga Harapan (PKH) pada bidang pendidikan

yaitu meningkatkan akses pendidikan dasar bagi anak-anak kurang mampu serta meningkatkan status pendidikan dasar agar tidak terjadi anak putus sekolah (APS).⁶²

Dalam jangka pendek maupun jangka panjang manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

- a. Pada jangka pendek yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.
- b. Pada jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan kualitas kesehatan atau gizi, pendidikan dan kemampuan pendapatan anak (price effect), dan memberikan kepastian di masa depan.
- c. Merubah perilaku keluarga miskin yang mendorong peningkatan kesejahteraan diantaranya disebabkan oleh kurangnya informasi tentang hak, manfaat, keuntungan dan kesempatan, serta tingginya biaya tidak langsung (transportasi, seragam, dan lain-lain), dan opportunity cost (anak bekerja lebih menguntungkan daripada bersekolah).
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan perbaikan layanan pendidikan serta kesehatan (supply side), sekaligus penguatan desentralisasi.
- e. Percepatan pencapaian MDGs, melalui indikator kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender.

⁶² Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang dan ke depan)*, 130.

3. Dasar Hukum PKH

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- e. PMK No. 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
- f. Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
- g. Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
- h. SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH
- i. Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri)

4. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan seseorang dan/atau keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan,

pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian sebagai berikut :⁶³

a. Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

- a) Ibu Hamil/menyusui, merupakan kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.
- b) Anak Usia Dini , merupakan anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

b. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan ini meliputi:

- a) Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat;
- b) Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat;
- c) Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat; dan
- d) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun

c. Komponen Kesejahteraan Sosial Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah berikut:

⁶³ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021* (dalam <https://kemensos.go.id> diakses 11 Januari 2023,), 22-23.

a) Lanjut Usia Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam satu keluarga.

b) Penyandang disabilitas berat Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari atau sepanjang hidupnya bergantung pada orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

5. Komponen Bantuan dan Jangka Waktu Kebersertaan PKH

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Besaran Bantuan sosial PKH pada tahun 2022 sesuai komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Besaran Komponen Program Keluarga Harapan

No	Kategori	Indeks/Tahun (Rp)	Indeks/Per 3 Bulan (Rp)
1.	Ibu Hamil	3.000.000	750.000
2.	Anak Usia Dini (Balita)	3.000.000	750.000
3.	Anak SD	900.000	225.000
4.	Anak SMP	1.500.000	375.000
5.	Anak SMA	2.000.000	500.000
6.	Lansia	2.400.000	600.000

7.	Disabilitas Berat	2.400.000	600.000
----	-------------------	-----------	---------

Sumber: Pendamping PKH Kecamatan Pulung

Meski Program Keluarga Harapan termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak akan bersifat permanen. Kepesertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun selama mereka masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila tidak ada lagi persyaratan yang mengikat maka mereka harus keluar secara alamiah. Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan Resertifikasi. Resertifikasi adalah kegiatan pendataan ulang yang dilakukan pada tahun kelima kepesertaan rumah tangga dengan metode tertentu.

6. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

a. Hak KPM PKH berhak untuk mendapatkan:

- 1) Bantuan sosial PKH
- 2) Pendampingan sosial PKH
- 3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial
- 4) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban KPM PKH Kewajiban Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

- 1) Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan.
 - 2) Komponen pendidikan yang terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib untuk mengikuti kegiatan belajar dengan kehadiran paling sedikit 85% dari hasil belajar efektif.
 - 3) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia atau penyandang disabilitas berat, wajib untuk mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali.
 - 4) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hadir dalam setiap Pertemuan Kelompok Atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.
 - 5) Seluruh anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memenuhi kewajibannya kecuali jika terjadi kahar (force majeure).
 - 6) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi.⁶⁴
7. Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
- a. Pembukaan rekening KPM
 - 1) Pembukaan rekening secara kolektif (bulk account opening)
 - 2) Cetak (Perso) kartu

⁶⁴ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021* (dalam <https://kemensos.go.id> diakses 15 Januari 2023), 26.

- 3) Produksi PIN
- 4) Laporan hasil proses Bulk Account Opening
- b. Sosialisasi dan edukasi
 - 1) Sosialisasi dan edukasi bansos non tunai kepada Pemda dan SDM PKH
 - 2) Sosialisasi dan edukasi bansos non tunai kepada Pemda dan SDM PKH agen dan KPM oleh bank penyalur dan kemensos (KPM baru)
- c. Distribusi KKS dan Butab
 - 1) Distribusi KKS, Butab dan PIN dari KP ke KC
 - 2) Distribusi KKS, Butab dan PIN dari KC kepada KPM berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kab/Kota
 - 3) Berita Acara serah terima KKS dan Butab kepada KPM
 - 4) Penandatanganan Aplikasi Pembukaan Rekening dan surat pernyataan persetujuan atau kuasa untuk memberikan informasi nomor rekening dan data pribadi
 - 5) Full aktivasi
 - 6) Laporan hasil penerimaan aplikasi pembukaan rekening
- d. Penyaluran bantuan sosial PKH
 - 1) Pengecekan rekening dengan data yang akan diajukan bantuannya
 - 2) Pengajuan dana Ke KPPN
 - 3) Pembuatan Surat Perintah pemindahbukuan/Standing Instruction (SI) ke Bank Penyalur Pusat
 - 4) Pelaksanaan pemindahbukuan/Standing Instruction (SI)

5) Laporan hasil pemindahbukuan yang gagal dan sukses transfer sebagaimana dimaksud poin no.2

e. Penarikan dan pemanfaatan dana bansos PKH

- 1) Dinas Sosial dan bank penyalur melakukan koordinasi persiapan penarikan dana bansos PKH
- 2) Penarikan Dana oleh KPM
- 3) Pelaporan KPM yang transaksi dan tidak transaksi

f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bansos PKH

- 1) Rekonsiliasi berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, ke tingkat pusat
- 2) Rekonsiliasi dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Provinsi, dan tingkat pusat berkoordinasi dengan Bank Penyalur
- 3) Berita Acara hasil rekonsiliasi Kab/Kota dan Provinsi

g. Pemantauan, evaluasi, monitoring dan pelaporan

- 1) Laporan periodik realisasi bansos setiap tahap penyaluran
- 2) Laporan KKS Tidak Distribusi dan KPM Tidak Transaksi setiap tahap penyaluran
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH
- 4) Analisa kecenderungan penyaluran bansos
- 5) Analisa kecenderungan pengaduan terkait penyaluran bansos

8. Indikator Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH)

Indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH mampu secara mandiri dan

secara sukarela melepaskan diri untuk tidak lagi menerima bantuan sosial PKH yang telah diduplikatnya. Selain itu, indikator dalam pengukuran keberhasilan PKH adalah dapat dilihat dari KPM PKH sadar akan kesehatan, sadar pendidikan, turunnya beban pengeluaran, kemudahan akses pendidikan, dan meningkatnya pendapatan, serta tercapainya tujuan dari PKH itu sendiri.⁶⁵

Berikut indikator keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

a. Tepat sasaran penerima bantuan

Bantuan Program Keluarga Harapan hanya diberikan kepada Rumah Tangga miskin (RTM) yang memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk pengelolaan bantuan dalam mengentaskan kemiskinan.

b. Tepat jumlah dana yang diterima

Jumlah uang yang diterima oleh penerima PKH sesuai dengan besaran komponen yang didapat.

c. Tepat waktu

Dalam penyaluran Waktu pelaksanaan distribusi Program Keluarga Harapan dilakukan empat kali dalam setahun yaitu tahap pertama bulan Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli dan tahap keempat di bulan Oktober.

⁶⁵ Tyas Wardani Nurwan dan Helmi Hasan, "Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM: Studi Di Sijunjung Sumatera Barat," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* Vol. 10, No. 1 (2020): 04.

d. Tepat penggunaan

Penggunaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) digunakan sesuai dengan komponen yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi lansia dan disabilitas.⁶⁶

D. Progam Sembako (BPNT)

1. Pengertian Progam Sembako

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 15, bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup dengan baik dan secara wajar. Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan yaitu berupa Program Sembako.

Dalam Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Sembako No. 5 tahun 2021 Pasal 1, mengatakan Program Sembako adalah Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.⁶⁷

⁶⁶ Rizal Khadafi dan Dyah Mutiarin, “Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul,” *Journal Of Governance And Public Policy* Vol. 4 No. 2 (2017): 335–36.

⁶⁷ Suryaden, “Permensos 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako,” dalam <https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-5-2021-program-semako>. Diakses pada 12 Januari 203

Program Sembako merupakan transformasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sebelumnya beberapa kali mengalami perubahan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan BPNT, dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras, melainkan menjadi dana bantuan yang langsung disalurkan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana tersebut kemudian harus ditukar dengan telur dan beras pada agen yang sudah ditetapkan.

Pada tahun 2020, program BPNT diubah menjadi Program Sembako. Dana bantuan Program Sembako tidak hanya dapat digunakan untuk beras dan telur saja, tetapi juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya, seperti jagung, ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayuran atau buah-buahan yang dapat diperoleh di pasar lokal. Dengan memperluas kepesertaan dalam Program Sembako, pemerintah berupaya menekan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi.⁶⁸ Sedangkan, istilah e-Warong atau Elektronik Warung Gotong Royong merupakan agen bank, pedagang atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat untuk membeli bahan pangan oleh KPM, terutama usaha mikro, kecil dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, Warung Desa, dan

⁶⁸ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021 - 2024*, hal. 8 (dalam <https://kemensos.go.id> diakses pada 12 Januari 2023).

Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, program Sembako merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai yang diberikan pemerintah kepada Keluarga miskin setiap bulan melalui mekanisme perbankan, jenis bahan pangan yang dapat dibeli beraneka ragam, yaitu mulai dari sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral.

2. Tujuan dan Manfaat Program Sembako

Tujuan dari program Sembako adalah sebagai berikut :

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
- c. Meningkatkan bahan pangan dengan ketepatan sasaran, waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan administrasi.
- e. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan uraian tujuan tersebut, Program Sembako memiliki manfaat antara lain:

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.

- d. Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT).
- f. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
- g. Mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).⁶⁹

3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sembako (BPNT)

Mekanisme penyaluran bantuan sembako dilakukan dengan menggunakan akun elektronik, jadi keluarga penerima manfaat dana tunai sebesar Rp. 200.000 perbulan diberikan sebanyak 12 kali dalam satu tahun yang di transfer ke rekening masing-masing KPM yang bekerjasama dengan bank yang tergabung dalam himpunan Bank milik Negara (Himbara) yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN. Adapun uang ini dapat ditukar atau dibelanjakan sembako yang disediakan di E-Warong terdekat.

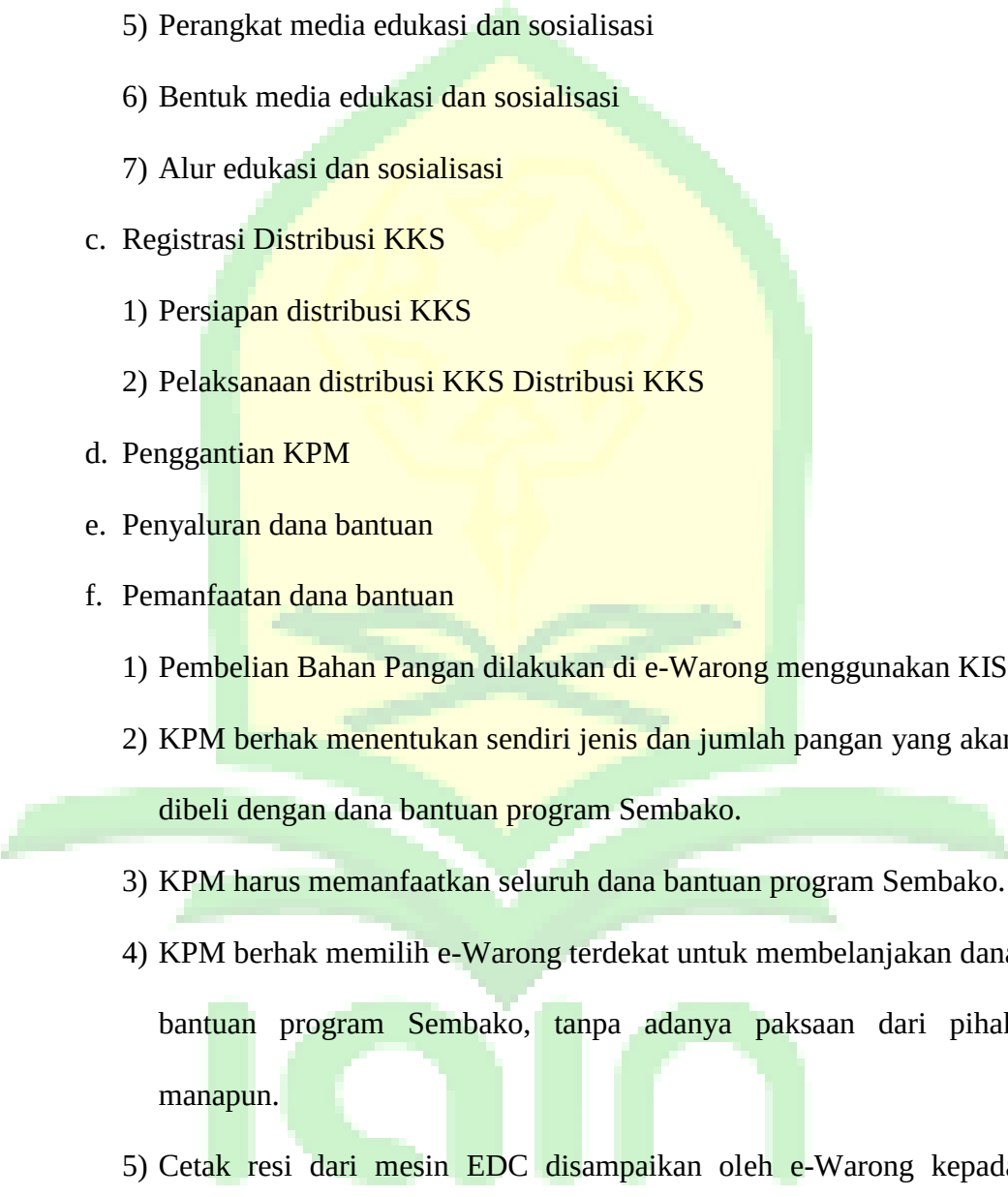
a. Persiapan

- 1) Koordinasi Pelaksanaan
- 2) Penyiapan Data KPM
- 3) Pembukaan rekening secara kolektif (bulk account opening)
- 4) Penyiapan E-Warong

b. Sosialisasi dan edukasi

- 1) Tujuan edukasi dan sosialisasi

⁶⁹ *Ibidi.*,13-14.

- 
- 2) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi
 - 3) Sasaran edukasi dan sosialisasi
 - 4) Materi edukasi dan Sosialisasi
 - 5) Perangkat media edukasi dan sosialisasi
 - 6) Bentuk media edukasi dan sosialisasi
 - 7) Alur edukasi dan sosialisasi
- c. Registrasi Distribusi KKS
- 1) Persiapan distribusi KKS
 - 2) Pelaksanaan distribusi KKS Distribusi KKS
- d. Penggantian KPM
- e. Penyaluran dana bantuan
- f. Pemanfaatan dana bantuan
- 1) Pembelian Bahan Pangan dilakukan di e-Warong menggunakan KIS.
 - 2) KPM berhak menentukan sendiri jenis dan jumlah pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program Sembako.
 - 3) KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program Sembako.
 - 4) KPM berhak memilih e-Warong terdekat untuk membelanjakan dana bantuan program Sembako, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
 - 5) Cetak resi dari mesin EDC disampaikan oleh e-Warong kepada KPM. Cetak resi ini berguna sebagai informasi mengenai transaksi dan sisa jumlah dana yang masih tersedia di uang elektronik KPM.

4. Prinsip Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program Sembako haruslah memenuhi prinsip, yaitu:

- a. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e- Warong.
- b. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warong terdekat.
- c. E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan.
- d. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan.
- e. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak menyalurkan bahan pangan kepada KPM dan juga tidak melakukan pemesanan bahan pangan.
- f. Mendorong usaha kecil rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
- h. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha kecil rakyat dan kepada KPM.
- i. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang berlaku.

5. Penerima Manfaat

Penerima manfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako yang namanya terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial. Penerima manfaat program Sembako dapat berganti kepesertaannya apabila :

- a. Meninggal dunia dan berasal dari calon KPM beranggota tunggal.
- b. Berasal dari calon KPM yang seluruh anggota keluarganya pindah ke Kabupaten atau Kota lain.
- c. Calon KPM menolak/mengundurkan diri sebagai penerima bantuan program Sembako dan tercatat ganda atau lebih.

6. Bahan Pangan

Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong menggunakan dana bantuan program Sembako, yaitu:

- a. Sumber karbohidrat berupa beras atau bahan pangan lokal seperti jagung dan sagu.
- b. Sumber protein hewani, berupa telur, daging sapi, ayam, ikan.
- c. Sumber protein nabati, seperti kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu.

Bantuan program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian seperti minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam

kategori diatas. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok.

Pencegahan stunting melalui program Sembako dilakukan dengan pemanfaatan bahan pangan oleh KPM untuk pemenuhan gizi di masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dimulai sejak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 6-23 bulan. Bagi anak usia 6- 23 bulan, bahan pangan dari program Sembako diolah menjadi Makanan Pendamping ASI 35 (MP-ASI).⁷⁰

7. Indikator Keberhasilan Program Sembako

- a. Sistem penyaluran bantuan program sembako teratur dan tepat waktu serta tepat sasaran
- b. Mampu membantu memenuhi kebutuhan keluarga miskin dan membantu mengurangi pengeluaran keluarga miskin
- c. Memberikan nutrisi seimbang dalam hal pangan
- d. Sebagai bentuk upaya perlindungan sosial dari pemerintah.⁷¹

E. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang menunjukan bahwa masyarakat sejahtera dengan

⁷⁰ *Ibid.*,19-27.

⁷¹ Ade Nurkhotijah, "Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten," (*Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten*), 2018.

terpenuhinya kebutuhan secara material dan sosial. Kesejahteraan berkaitan dengan konteks kemiskinan, namun tidak dalam semua hal. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat maka semakin rendah kemiskinan. semakin tinggi angka kemiskinan yang terjadi semakin banyak masyarakat yang tidak sejahtera.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, meliputi:

- a. Tingkat Kehidupan Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan
- b. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- c. Tingkat Kebutuhan Dasar Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan lingkungan

Kesejahteraan merupakan kondisi ideal yang hendak dicapai manusia yang bersifat fisik dan spiritual secara utuh dan terpadu. Menurut kata “kesejahteraan” mengandung makna “kemakmuran” yang berarti kondisi pada setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah karena tersedianya barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Dalam hal ini kesejahteraan mengandung dua makna

yaitu kesejahteraan fisik dan kesejahteraan spiritual. Kesejahteraan fisik merupakan pencapaian dari kesejahteraan ekonomi, yaitu terpenuhinya kebutuhan ekonomi, seperti makan, minum, sandang dan papan. Kesejahteraan spiritual yaitu ketenangan, kedamaian, dan ketentraman batin.⁷²

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu konsep perhitungan kesejahteraan adalah diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) seseorang untuk hidup secara normal. Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan antara lain sebagai berikut:

a. Badan Pusat Statistik (BPS)

Tingkat kemiskinan atau ketidaksejahteraan masyarakat berdasarkan indikator yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:

- a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m².
- b) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bamboo, atau kayu murahan.

⁷² Ali Anwar Yusuf, *Islam dan Sains Modern Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu* (bandung: Cv Pustaka Setia, 2006), 78.

- c) Jenis dinding tempat tinggal mereka terbuat dari bamboo, rumbia, atau yang berkualitas rendah atau tembok tanpa di plester.
- d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri, tetapi bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f) Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi seperti sungai atau hujan.
- g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
- h) Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
- i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau Poliklinik.
- l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
- m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah, tidak tamat SD, atau hanya tamat SD.

- n) Tidak memiliki tabungan dan atau barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/non kredit), 28 emas, ternak, kapal motor, atau barang berharga lainnya.⁷³

b. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga.

- 1) Keluarga Pra-Sejahtera (sangat miskin), adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.
- 2) Keluarga Sejahtera I (miskin), adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut:
 - a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 - b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
 - c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik;
 - b) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
 - c) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
 - d) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
- 3) Tahapan Keluarga Sejahtera II

⁷³ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 44-45.

Tahapan Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator 1 sd 6) dan indikator berikut:

- a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
 - b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur;
 - c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun
 - d) Luas lantai rumah paling kurang 8m² untuk setiap penghuni rumah;
 - e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing;
 - f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan;
 - g) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin;
 - h) Pasangan usia subur dengan anak dua tahun atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
- 4) Tahapan Keluarga Sejahtera III

Tahapan Keluarga Sejahtera III, adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I dan indikator Keluarga Sejahtera II (Indikator 1 sd 14) dan indikator berikut:

- a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama;
 - b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang;
 - c) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi;
 - d) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal;
 - e) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv.
- 5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II dan Indikator Keluarga Sejahtera III (Indikator 1 sd 19) dan indikator berikut:

- a) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial;
- b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

F. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam

Kesejahteraan Masyarakat menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi.⁷⁴

Menurut al-Qur'an, kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkanNya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan masalah ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara tersebut menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.⁷⁵ Berikut ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesejahteraan QS. Al-A'raf ayat 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : "Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur"

Pada ayat di atas, Allah mengingatkan kepada hambaNya, untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya. Nikmat itu adalah sarana untuk

⁷⁴ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Volume 6 Nomor 2 (2021): 327.

⁷⁵ Almizan, "Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, Maqdis," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Vol.1, No.1 (2016): 74.

mendapatkan kesejahteraan berupa bumi yang diciptakan-Nya untuk tempat tinggal, tempat untuk memenuhi segala tujuan hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, segala jenis binatang, dan tambang-tambanganya yang semua itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah.

Kesejahteraan pada dasarnya merupakan akumulasi dari kondisi yang baik, lahir dan batin, maka agama Islam diturunkan Allah untuk mengarahkan manusia pada kesejahteraan yang hakiki. Untuk mencapai kesejahteraan hakiki tersebut, agama Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan atau profesinya dan bersungguh-sungguh serta khusyuk dalam menunaikan ibadah.

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

Artinya :

“Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari.” (HR. Ibnu „Asakir).

Bekerja untuk dunia adalah bekerja dalam berbagai segi kehidupan muamalah, seperti ekonomi, politik, dan sebagainya, sedangkan bekerja untuk akhirat adalah kegiatan ritual atau ibadah mahdah, seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Agama islam mendorong umatnya untuk bekerja sungguh-sungguh mencari kehidupan yang baik untuk kesejahteraan hidup di dunia. Bahkan berjuang, dalam memenuhi kebutuhan hidup disejajarkan dengan perjuangan membela agama

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفُسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

Artinya :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash:77)

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan saling bersaing dan bertentangan. Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:

a. Keadilan

Keadilan merupakan suatu nilai dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.

b. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban digunakan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemashlahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

c. Takafful (jaminan sosial)

Adanya jaminan sosial dimasyarakat mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.⁷⁶



⁷⁶ *Ibid.*, 78.

BAB III

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan data dan temuan lapangan selama proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti akan memaparkan data-data dan temuan lapangan mengenai efektivitas bantuan program PKH dan Sembako untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan pulung.

A. Gambaran Umum Kecamatan Pulung

1. Kondisi Masyarakat Kecamatan Pulung

Pulung merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Pulung berjarak sekitar 20 kilometer dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah Timur. Pusat pemerintahannya berada di Desa Pulung. Wilayah Kecamatan Pulung secara langsung berbatasan dengan Kecamatan Jenangan, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di wilayah Utara, di wilayah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pudak dan Kabupaten Nganjuk, Adapun di wilayah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko Dan Kecamatan Sawoo, sedangkan di wilayah barat berbatasan dengan Kecamatan Jenangan, Kecamatan Siman Dan Kecamatan Mlarak. Nama Pulung memiliki keberuntungan yang tidak terduga-duga. Nama pulung juga tertulis di prasasti sirah keting dengan sebutan Pulung Kajang.

Kecamatan Pulung mempunyai luas wilayah 127,55 km² dengan ketinggian 356 – 9.342 meter diatas permukaan laut. Terdapat banyak

sungai dengan panjang 4-58 km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegal pekarangan Kecamatan Pulung memiliki dua iklim yaitu penghujan dan kemarau. Kecamatan pulung terdiri dari 18 desa dan 67 dusun/dukuh.

2. Kondisi Iklim dan Topografis

Kecamatan pulung merupakan dataran tinggi dengan iklim tropis yang memiliki dua iklim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 19° s/d 31° Celcius. Bila dilihat menurut luas wilayah terluas diatas 100 km² adalah desa sidoharjo dengan luas wilayah 3.349 km².

3. Kondisi Demografis Kecamatan Pulung

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, maka didapatkan data sebagai berikut:

1) Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin

Data jumlah penduduk kecamatan pulung menurut BPS yaitu sebesar 53.297 jiwa. Desa Karangpatihan tercatat mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu 103,43 diikuti desa Plunturan 102,67 jiwa, Desa Tegalorejo 102,57 jiwa, dan Desa bekiring 102, 56 jiwa. Sementara kepadatan penduduk dikecamatan pulung pada tahun 2022 mencapai 418 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di desa

Pulung yaitu 1.400 jiwa per km² dan terendah di Desa Banaran yaitu 72 jiwa per km². Menurut data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Total
Laki-laki	26.471
Perempuan	26.826
Jumlah	53.297

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo dalam angka 2022 (data diolah)

2) Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kecamatan Pulung dipengaruhi dengan adanya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Untuk melihat komposisi penduduk di Kecamatan Pulung menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Komposisi Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Total
Tamat TK	817
Tamat RA	333
Tamat SD	3.257
Tamat MI	646
Tamat SMP	1.300
Tamat MTS	354
Tamat SMA	703
Tamat SMK	44

Tamat MA	35
Jumlah	7489

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo dalam angka 2022 (data diolah)

3) Sarana dan prasarana umum masyarakat

Sarana dan prasarana merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tersedia dan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam masyarakat akan membantu masyarakat untuk mendukung semua aktivitas yang dilakukan. Dengan adanya sarana dan prasarana pokok seperti pendidikan, sarana peribadatan, dan sarana komunikasi serta informasi, akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan kebutuhan lainnya. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Pulung, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sarana dan Prasarana Umum Masyarakat

No.	Prasarana	Jumlah
1.	Sekolah TK/PAUD	
2.	Sekolah SD	39 unit
3.	Sekolah MI	6 unit
4.	Sekolah SMP	5 unit
5.	Sekolah MTS	2 unit
6.	Sekolah SMA	1 unit
7.	Sekolah SMK	1 unit
8.	Sekolah MA	1 unit
9.	Rumah Sakit	1 Unit
10.	Poliklinik	3 Unit

11.	Puskesmas	1 Unit
12.	Masjid	350 unit
13.	Musholla	550 unit
14.	Gereja	3 unit

Sumber: BPS Ponorogo dalam angka 2022 (data diolah)

4. Kondisi Masyarakat Kecamatan Pulung

1) Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi di suatu daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Dalam mengembangkan ekonomi di suatu daerah, pengumpulan dan penghitungan data produk Domestik semakin penting dan dirasakan manfaat umumnya sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan. Untuk melihat kondisi perekonomian kabupaten ponorogo, dapat dilihat dengan menggunakan perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) setiap tahunnya yang mengalami kenaikan, baik dilihat dari nilai dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB Kabupaten Ponorogo

2) Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat di wilayah Kecamatan Pulung umumnya merupakan suku yang homogen dimana sebagian besar adalah berasal dari suku jawa. Dalam hal ini kecamatan pulung mempunyai ciri khas budaya yaitu kesenian reog sebagai salah satu aspek yang dapat memperkuat identitas daerah. Perkembangan nilai-nilai budaya yang bersifat regilius dapat mewarnai kehidupan masyarakat sebagai kekayaan budaya yang

perlu mendapatkan tempat tersendiri sehingga menanamkan nilai moral yang dapat mendukung pemerintah daerah.

Kesenian reog disini dijadikan sebagai andalan utama penduduk di wilayah Kecamatan Pulung dalam melakukan pembangunan. Dimana kesenian reog ini merupakan budaya asli dari Ponorogo yang memiliki makna perjuangan dan diaktualisasikan dalam pembangunan modern wilayah perencanaan pada umumnya dan kabupaten maupun kecamatan pada umumnya. Jadi penguatan pada kesenian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi perkembangan wilayah perencanaan pada perkembangannya.

3) Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, penduduk Kecamatan Pulung mayoritas memeluk agama islam sebesar 99,37%, dan diikuti Kristen Protestan sebesar 0,31% dan Katholik sebesar 0,28%, Budha sebesar 0,03% dan agama hindu sebesar 0,01%.⁷⁷

B. Mekanisme penyaluran Bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako

1. Mekanisme Penyaluran Bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018, mekanisme penyaluran bantuan dana sosial dilaksanakan oleh pemberi bantuan dana sosial melalui bank penyaluran ke rekening atas

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2022* (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2022), 83.

nama peserta penerima bantuan dan sosial yang diterima oleh peserta penerima bantuan dana sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan dana sosial. Adapun mekanisme penyaluran bantuan dana sosial PKH meliputi:

a. Pembukaan rekening KPM

- 1) Pembukaan rekening secara kolektif (bulk account opening)
- 2) Cetak (Perso) kartu
- 3) Produksi PIN
- 4) Laporan hasil proses Bulk Account Opening

b. Sosialisasi dan edukasi

- 1) Sosialisasi dan edukasi bansos non tunai kepada Pemda dan SDM PKH
- 2) Sosialisasi dan edukasi bansos non tunai kepada Pemda dan SDM PKH agen dan KPM oleh bank penyalur dan kemensos (KPM baru)

c. Distribusi KKS dan Butab

- 1) Distribusi KKS, Butab dan PIN dari KP ke KC
- 2) Distribusi KKS, Butab dan PIN dari KC kepada KPM berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kab/Kota
- 3) Berita Acara serah terima KKS dan Butab kepada KPM
- 4) Penandatanganan Aplikasi Pembukaan Rekening dan surat pernyataan persetujuan atau kuasa untuk memberikan informasi nomor rekening dan data pribadi

- 5) Full aktivasi
 - 6) Laporan hasil penerimaan aplikasi pembukaan rekening
- d. Penyaluran bantuan sosial PKH
- 1) Pengecekan rekening dengan data yang akan diajukan bantuannya
 - 2) Pengajuan dana Ke KPPN
 - 3) Pembuatan Surat Perintah pemindahbukuan/Standing Instruction (SI)
ke Bank Penyalur Pusat
 - 4) Pelaksanaan pemindahbukuan/Standing Instruction (SI)
 - 6) Laporan hasil pemindahbukuan yang gagal dan sukses transfer
sebagaimana dimaksud poin no.2
- e. Penarikan dan pemanfaatan dana bansos PKH
- 1) Dinas Sosial dan bank penyalur melakukan koordinasi persiapan
penarikan dana bansos PKH
 - 2) Penarikan Dana oleh KPM
 - 3) Pelaporan KPM yang transaksi dan tidak transaksi
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bansos PKH
- 1) Rekonsiliasi berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, ke
tingkat pusat
 - 2) Rekonsiliasi dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Provinsi,
dan tingkat pusat berkoordinasi dengan Bank Penyalur
 - 3) Berita Acara hasil rekonsiliasi Kab/Kota dan Provinsi
- g. Pemantauan, evaluasi, monitoring dan pelaporan

- 1) Laporan periodik realisasi bansos setiap tahap penyaluran
- 2) Laporan KKS Tidak Distribusi dan KPM Tidak Transaksi setiap tahap penyaluran
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH
- 4) Analisa kecenderungan penyaluran bansos
- 5) Analisa kecenderungan pengaduan terkait penyaluran bansos

2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sembako

a. Persiapan

1) Koordinasi Pelaksanaan

a) Koordinasi Tingkat Pemerintah Pusat

Koordinasi di tingkat Pemerintah Pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) program Sembako dan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan/ dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan K/L dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait kebijakan pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan program, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

b) Koordinasi Tingkat Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang

dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan program Sembako di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, dan dukungan lain yang diperlukan.

c) Koordinasi Tingkat Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBD dan/atau Dana Desa, verifikasi dan validasi data calon KPM dalam SIKS-NG menu BSP, proses registrasi/distribusi KKS, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan.

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal registrasi KPM/distribusi KKS di masing-masing desa/kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa/aparatur kelurahan dalam proses tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-Warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi

dengan Bank Penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang bahan pangan untuk menjadi e-Warong. Pelaksanaan program Sembako di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/aparatur kelurahan setempat dan Pendamping Sosial Bansos Pangan.

2) Penyiapan Data KPM

- a) Penyiapan data KPM program Sembako dilaksanakan melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP dan mengacu pada Bab 2 Ruang Lingkup Sub bab 2.3 Penerima Manfaat.
- b) Daftar Calon KPM program Sembako pada SIKS- NG menu BSP sudah diberikan penanda untuk KPM yang merupakan penerima manfaat PKH. KPM PKH yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diutamakan sebagai penerima manfaat program Sembako.
- c) Jumlah data calon KPM yang tersedia di SIKS-NG menu BSP idealnya sama dengan pagu program Sembako yang ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota. Jika jumlah data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP kurang dari pagu, maka daerah diminta

untuk mengusulkan calon KPM untuk memenuhi pagu. Data usulan tersebut harus bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jika jumlah data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP lebih besar dari pagu program Sembako, maka Kementerian Sosial akan melakukan penyesuaian jumlah calon KPM terhadap pagu yang telah ditetapkan.

- d) Pemerintah Kabupaten/Kota harus memeriksa data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP, melakukan perubahan data sesuai kondisi terkini, serta melengkapi 7 (tujuh) variabel pembukaan rekening (KYC) pada SIKS-NG menu BSP.
- e) Perubahan data calon KPM dapat berupa penonaktifan calon KPM dari program, pengusulan calon KPM baru, dan perbaikan data Pengurus KPM.
- f) Perubahan data calon KPM dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).
- g) Penonaktifan calon KPM dari program dilakukan jika calon KPM yang terdapat pada SIKS-NG menu BSP: menggantikan calon KPM yang dinonaktifkan dan untuk memenuhi pagu program yang ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota.
- h) Keluarga yang diusulkan menjadi calon KPM program Sembako adalah keluarga yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- i) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi dan validasi data serta memastikan kelengkapan pengisian variabel KYC untuk setiap calon KPM pada SIKS-NG menu BSP. Variabel pembukaan rekening mengacu pada Bab 2 tentang Ruang Lingkup Subbab 2.3 Penerima Manfaat. Pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur melalui pedoman terpisah.
 - j) Jika daerah yang tidak melakukan verifikasi dan validasi maka data yang digunakan adalah data yang tersedia di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
 - k) Untuk memastikan kelengkapan data NIK dan kepemilikan dokumen kependudukan oleh KPM, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.
- 3) Pembukaan rekening secara kolektif (bulk account opening)

Pembukaan rekening kolektif untuk pelaksanaan program Sembako dilaksanakan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima program Bansos Pangan. Bagi KPM yang telah dibukakan rekening bantuan pangan sebelum tahun 2020 (untuk program BPNT) dan masih aktif rekeningnya tidak dilakukan pembukaan rekening kolektif.

4) Penyiapan E-Warong

b. Sosialisasi dan edukasi

1) Tujuan edukasi dan sosialisasi

Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program Sembako adalah:

- a) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai kebijakan dan aspek pelaksanaan program Sembako sebagai program perlindungan sosial, khususnya terkait keberadaan program Sembako sebagai pengembangan dari program BPNT dan fungsi program Sembako sebagai bagian dari JPS untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.
- b) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan dana bantuan program Sembako
- c) Memberikan pemahaman kepada KPM selama masa pandemi Covid-19 terkait penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 pada saat distribusi KKS dan pemanfaatan dana bantuan program Sembako di e-Warong.
- d) Memberikan pemahaman kepada e-Warong selama masa pandemi Covid-19 terkait penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pemanfaatan dana bantuan program Sembako oleh KPM di e-Warong

- e) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan program Sembako
- f) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting melalui pemanfaatan bantuan program Sembako.
- g) Memberikan informasi kepada KPM terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT).

2) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi program Sembako merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan. Pelaksana edukasi dan sosialisasi adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah: sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya
- b) Bank Penyalur
- c) Pemilik/pengelola e-Warong
- d) Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah.

3) Sasaran edukasi dan sosialisasi

- a) Pemerintah Daerah, termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan

- b) Perangkat desa/aparatur kelurahan dan jajaran di bawahnya
 - c) Tenaga Pelaksana Bansos Pangan
 - d) KPM
 - e) Pemilik/pengelola e-Warong;
 - f) Bank Penyalur baik di tingkat pusat maupun cabang
 - g) Masyarakat umum.
- 4) Materi edukasi dan Sosialisasi
- a) Kebijakan dan tujuan program Sembako
 - b) Prinsip pelaksanaan program Sembako
 - c) Mekanisme pelaksanaan program Sembako, termasuk penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada berbagai aspek pelaksanaan Program Sembako selama masa pandemi Covid-19
 - d) Produk dan tata cara penggunaan KKS, termasuk mekanisme apabila terjadi KKS hilang/rusak/ terblokir
 - e) Tata cara pengaduan
 - f) Pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting melalui pemanfaatan bantuan program Sembako
 - g) Pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT).

c. Registrasi Distribusi KKS

Proses registrasi/distribusi KKS untuk pelaksanaan program Sembako dilaksanakan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima program Bansos Pangan. KKS yang telah dimiliki KPM dari program BPNT dan/atau PKH tetap digunakan untuk mendapatkan dan memanfaatkan dana bantuan program Sembako.

1) Persiapan distribusi KKS

a) Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/ Kota dan Bank Penyalur bersama-sama mempersiapkan pelaksanaan distribusi KKS serta menentukan jadwal dan lokasi pelaksanaan distribusi KKS kepada KPM (mudah dijangkau oleh KPM). Jangka waktu distribusi KKS mempertimbangkan jumlah KPM di suatu lokasi dan kondisi geografis sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial

b) Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota menugaskan Pendamping Sosial Bansos Pangan dan perangkat desa/aparatur kelurahan di tiap desa/kelurahan untuk bersama-sama dengan Bank Penyalur melakukan distribusi KKS. Apabila diperlukan, Bank Penyalur dapat merekrut tenaga tambahan untuk memperlancar proses distribusi KKS.

c) Sebelum pelaksanaan distribusi KKS, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada KPM mengenai kepesertaannya pada program Sembako, waktu

dan lokasi distribusi KKS, serta dokumen yang harus disiapkan dan dibawa oleh KPM pada saat pelaksanaan distribusi KKS. KPM yang diinformasikan harus dipastikan adalah KPM yang terdapat dalam data bayar dan perubahannya yang disampaikan Kementerian Sosial.

- d) Sarana pemberitahuan kepada KPM dapat menggunakan media yang biasa digunakan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, antara lain: (i) surat yang ditujukan kepada KPM, (ii) informasi dari aparat pemerintah daerah dan Pendamping Sosial Bansos Pangan kepada KPM, dan (iii) informasi pada papan pengumuman atau sarana publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat khususnya KPM
- e) Perangkat desa/aparat kelurahan dan Pendamping Sosial Bansos Pangan memastikan KPM hadir pada saat pelaksanaan distribusi KKS.

2) Pelaksanaan distribusi KKS

- a) Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, perangkat desa/aparat kelurahan, dan Pendamping Sosial Bansos Pangan bersama-sama dengan Bank Penyalur melakukan distribusi KKS kepada KPM. Edukasi dan sosialisasi kepada KPM dapat dilakukan bersamaan pada saat proses distribusi KKS.
- b) Pihak yang harus hadir dari KPM pada saat distribusi KKS adalah yang ditentukan sebagai Pengurus KPM, yaitu nama yang

tercantum sebagai pemilik rekening bantuan pangan. Apabila Pengurus KPM tidak hadir pada saat distribusi KKS, perangkat desa/aparatur kelurahan dan Pendamping Sosial Bansos Pangan secara aktif mengecek keberadaan KPM.

- c) Perlakuan bagi Pengurus KPM yang tidak hadir pada saat distribusi KKS (baik karena sakit, lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas, meninggal dunia, merupakan Pekerja Migran Indonesia, telah mendapatkan vonis berkekuatan hukum tetap atau sedang dalam proses hukum, tidak ditemukan domisilinya, sudah bercerai) merujuk pada Lampiran
- d) Dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM pada saat proses distribusi KKS adalah dokumen identitas seperti KTP, Suket, KK, dan/atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan
- e) Pada saat proses distribusi KKS, petugas Bank Penyalur memeriksa kesesuaian data pada KKS dengan dokumen identitas yang dibawa KPM.
- f) Jika data pada KKS sesuai dengan dokumen identitas yang dibawa KPM, maka KPM harus melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh Bank Penyalur

- g) Bank Penyalur menyerahkan KKS, lembar PIN, dan lembar informasi program disertai penjelasan kepada KPM mengenai program Sembako serta cara penggunaan KKS dan PIN
- h) Jika data pada KKS dan dokumen identitas yang dibawa KPM tidak sesuai, misalnya terdapat perbedaan nama, alamat maupun nomor identitas KPM maka petugas Bank Penyalur berkoordinasi dengan perangkat desa/aparatur kelurahan untuk mencocokkan data administrasi kependudukan di wilayahnya
- i) Apabila KPM terbukti adalah benar yang bersangkutan, maka pihak desa/kelurahan dapat memberikan surat keterangan terkait hal tersebut. Dengan adanya surat keterangan dari desa/kelurahan, petugas Bank Penyalur menyerahkan formulir pembukaan rekening bantuan pangan untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh KPM untuk memperoleh KKS dan PIN. Contoh surat keterangan terdapat pada Lampiran.
- j) KKS dan dokumen kelengkapannya tidak diserahkan kepada KPM apabila: Apabila saat registrasi/distribusi KKS didapati KPM telah memiliki KKS dari program PKH maka KKS yang baru tidak diserahkan kepada KPM dan dilaporkan kepada Bank Penyalur agar dapat dilakukan proses tunggalisasi KKS, dimana dana bantuan program Sembako akan disalurkan melalui KKS yang telah dimiliki dan digunakan KPM untuk PKH. Proses dan mekanisme tunggalisasi KKS merujuk pada Lampiran.

d. Penggantian KPM

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, dimungkinkan perubahan daftar KPM dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Perubahan/pembaharuan daftar KPM dilakukan melalui Musdes/Muskel pada tahun berjalan/ pada tahun pelaksanaan program Sembako, dengan melibatkan Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial Bansos Pangan.
- 2) Melalui Musdes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari daftar KPM dan keluarga pengganti yang masuk ke dalam daftar KPM serta dilakukan pembaharuan data apabila terjadi perubahan pengurus KPM.
- 3) Keluarga peserta PKH yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diutamakan mendapatkan program Sembako.
- 4) KPM program Sembako yang dapat diganti/ dikeluarkan dari daftar KPM adalah KPM yang pindah/tidak ditemukan, meninggal dunia, sudah mampu, menolak menerima bantuan, memiliki kepersertaan ganda atau menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi KKS. Bagi KPM yang tercatat ganda (dua kali atau lebih) pada daftar KPM, maka salah satu data KPM dipertahankan

sementara sisanya diganti mengikuti mekanisme penggantian KPM.

- 5) Keluarga yang dapat dimasukkan menjadi KPM Pengganti adalah keluarga dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dianggap layak berdasarkan hasil musdes/muskel dan/atau musyawarah kecamatan (muscam). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tersedia di Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- 6) Dalam hal tidak ada lagi KPM Pengganti di desa/kelurahan/pemerintah setingkat tersebut yang dapat diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, maka pagu kosong yang tersisa di desa/kelurahan tersebut dapat dialihkan dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Desa/ Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial Bansos Pangan. Pelaksanaan Muscam harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA) Muscam serta dilaporkan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial) untuk penetapan alokasi jumlah KPM per desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang baru, serta untuk perubahan daftar KPM melalui aplikasi SIKS-NG. Penggunaan aplikasi SIKS-NG diatur dalam pedoman terpisah yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.

- 7) Jika musdes/muskel mengidentifikasi bahwa terdapat keluarga yang berhak menjadi penerima manfaat program Sembako namun belum terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, maka keluarga tersebut dapat melakukan pendaftaran. aktif sebagai rangkaian dari proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diatur dalam pedoman terpisah. Dalam kondisi tertentu, penentuan KPM program Sembako dapat bersumber dari data lain di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai kebijakan Pemerintah.
- 8) Perangkat desa/aparatur kelurahan mencatat perubahan data/informasi sebagai berikut: (1) Nomor KKS (2) Nomor rekening bansos (3) Status kepesertaan pada program Sembako (4) Nama Pengurus KPM (calon pemilik rekening) (5) Nomor ID DTKS KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (6) Nomor ID Pengurus KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (7) Nomor Kartu Keluarga (KK), jika ada (8) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pengurus KPM (9) Tempat dan tanggal lahir Pengurus KPM (10) Nama gadis ibu kandung dari Pengurus KPM (11) Nomor Peserta PKH, jika ada (12) Status PKH, jika ada (13) Nama Kepala Keluarga (14) Nama Anggota Keluarga lainnya (15) Alamat Tinggal KPM (16) Kode Wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan).

- 9) Kepala Desa/Lurah menyampaikan daftar akhir KPM termasuk usulan perubahannya kepada Bupati/Wali Kota melalui kecamatan untuk memperoleh pengesahan.
- 10) Bupati/Wali Kota mengesahkan Berita Acara Daftar KPM Perubahan dan mengirimkannya kepada Kementerian Sosial melalui SIKS-NG. Salinan surat pengesahan Bupati/Wali Kota agar segera disampaikan kepada Kementerian Sosial (KPA) dan Gubernur paling lambat diterima setiap tanggal 25 di bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Selanjutnya, daftar KPM perubahan dikirimkan oleh Kementerian Sosial ke Bank Penyalur untuk proses burekol.
- 11) Daftar KPM Perubahan kemudian disahkan oleh Kementerian Sosial (KPA) paling lambat pada tanggal 15 setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember berdasarkan data hasil burekol dari Bank Penyalur. Selanjutnya Daftar KPM Perubahan yang telah disahkan dikirimkan oleh Kementerian Sosial ke Tim Koordinasi Bansos Pangan di daerah.
- 12) KKS untuk KPM Pengganti dicetak Bank Penyalur berdasarkan data yang telah disahkan oleh KPA di Kementerian Sosial setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani. KKS diterima oleh KPM Pengganti paling lambat 30 hari setelah proses pembukaan rekening dilakukan di Bank Penyalur pusat.

- 13) Mekanisme distribusi KKS untuk KPM Pengganti mengikuti mekanisme distribusi KKS baru.

C. Efektivitas Program Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memantau serta mengamati keadaan sekitar Kecamatan Pulung, bahwa selama bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako diberikan, telah ditemukan adanya kesenjangan yang menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat karena penyaluran bantuan tersebut tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, justru masyarakat yang sudah dikategorikan mampu dalam segi apapun masih mendapatkan bantuan sedangkan yang layak dan berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

dari hasil observasi peneliti juga menemukan adanya ketidaktepatan pemanfaatan dana bantuan yang diberikan seharusnya dana yang diberikan itu dimanfaatkan sesuai takarannya, namun justru digunakan untuk memenuhi keinginan hasrat pribadi seperti program PKH dana yang diberikan harus digunakan sesuai kriteria komponen yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan bantuan sembako barang yang diberikan seperti beras banyak yang dijual ke toko akibat kualitas beras yang diberikan terkadang kurang bagus selain itu bagi mereka yang sudah mampu dan memiliki padi/beras yang banyak sehingga kurang membutuhkan bantuan beras lagi, sehingga memicu mereka untuk menjual beras tersebut.

Setiap program tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, termasuk tujuan program PKH yaitu untuk meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan tujuan program sembako yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, Meningkatkan bahan pangan dengan ketepatan sasaran, waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan administrasi, Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Suatu program dapat dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Efektivitas program yang dimaksud menunjukkan status tingkat keberhasilan yang dapat dicapai perusahaan melalui empat indikator yaitu Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program, dan Pemantauan Program.

1. Ketepatan Sasaran

a. Tepat sasaran

Ketepatan sasaran dari program PKH dan Sembako ini merupakan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan Rumah Tangga

Sasaran (RTS) Sebagai imbalanya RTSM dan RTS diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. Progam ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus mata rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

Pada aspek sasaran Bapak Syaiful selaku pendamping PKH Kecamatan Pulung mengatakan bahwa masyarakat yang menerima bantuan ini sudah tepat sasaran, berikut hasil wawancaranya :

“Menurut saya sudah tepat sasaran mbak, karena untuk seluruh penerima bantuan sosial PKH dan Sembako harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan untuk menentukan masuk di DTKS itu melalui musyawarah Desa, jadi menurut saya setiap orang yang masuk di DTKS merupakan keluarga yang tidak mampu dan layak untuk menerima bantuan sosial. Data kemiskinan itu bersifat fluktuatif, bergerak dan berubah setiap waktu, jadi kalau sewaktu-waktu ditemukan di lapangan penerima bantuan sosial yang sudah mampu, maka akan kita ajukan untuk garduasi (mengundurkan diri) dari penerima bantuan sosial PKH”.⁷⁸

Namun pernyataan ini disanggah oleh ibu Katri selaku ketua kelompok PKH Dusun Dungus Desa Karangpatihan, beliau mengatakan bahwa progam ini belum tepat sasaran, karena masih banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial ini sedangkan ada sebagian masyarakat yang sudah dikategorikan mampu masih menerima bantuan, berikut bukti wawancaranya:

⁷⁸ Syaiful, Wawancara, 02 Maret 2023.

“Menurut saya belum seluruhnya tepat sasaran mbak, karena masih banyak warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan ini, sedangkan warga yang dikategorikan sudah mampu, sawahnya luas, kondisi ekonominya bagus justru mendapatkan bantuan, karena kan begini ya mbak setiap tahun kondisi masing-masing masyarakat itu berubah seiring berjalanya waktu ada yang lebih baik dan ada juga yang semakin memburuk. namun KPM yang mengalami perubahan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan lebih baik tidak pernah mau melakukan graduasi secara mandiri, sehingga menunggu dicabut oleh pemerintah dengan melihat kondisi latar belakang KPM tersebut”.⁷⁹

Tak hanya Ibu Katri saja yang mengatakan bahwa bantuan ini belum seluruhnya tepat sasaran dengan adanya observasi kebutuhan oleh pihak perangkat Bapak Perangkat Desa Bapak Sumani pun mengatakan hal demikian, berikut hasil wawancaranya :

“Berbicara mengenai tepat sasaran, kalau menurut saya belum sepenuhnya tepat mbak, karena dilihat dari realitanya saja banyak juga warga yang kondisi ekonomi sudah bagus, rumah bagus, lahan dan ladang luas tapi masih mendapatkan itu yang dilihat dari segi apanya kok bisa dapat bantuan, sedangkan diluar sana masih banyak warga yang lebih buruk kondisi ekonominya justru tidak mendapatkan bantuan, karena ada sebagian perangkat atau pamong desa yang pilih-pilih mbak, kalau masih ada keterkaitan saudara atau teman dekat kebanyakan mendapat bahkan jika belum dapat segera diusulkan dan ditindak lanjuti agar mendapat bantuan”.⁸⁰

Pernyataan ini diperkuat dengan Bapak Suprianta selaku kepala dusun, dalam hal penetapan penerima bantuan, beliau menegaskan bahwa belum tepat sasaran siapa saja penerima yang benar-benar berhak untuk menerima bantaun dan siapa yang sudah tidak layak menerima bantuan, beliau mengatakan :

⁷⁹ Katri, Wawancara, 2 Maret 2023.

⁸⁰ Sumani, Wawancara, 4 Maret 2023.

“Kalau mengenai tepat sasaran atau tidaknya, menurut saya penerimaan PKH dan Sembako ini kurang tepat sasaran mbak, karena nama-nama penerima PKH sudah dari keputusan Dinas Sosial langsung. Jadi saya berusaha mengusulkan kepada pendamping PKH, bahwa ada salah satu warga kita yang memang dilihat secara langsung sudah terlihat bahwa dia memang seorang yang tidak mampu dan memiliki banyak anak sekolah, saya juga sudah bertanya secara langsung kepada pendamping PKH, kenapa kok di keluarga itu justru tidak mendapatkan bantuan, dan pendamping PKH nya pun juga sudah berusaha agar keluarga tersebut mendapatkan bantuan PKH dan Sembako. Namun usulan tersebut sampai sekarang belum juga mendapatkan respon yang positif, terkadang malah ada tetangga yang sedang bekerja diluar Negeri justru mendapatkan bantuan, sedangkan keluarga yang benar-benar membutuhkan anak untuk sekolah justru tidak mendapatkan bantuan. Jadi ya menurut saya kalau dibilang tepat sasaran masih belum mbak”.⁸¹

Target dalam PKH dan Sembako dari aspek ketepatan sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu dari pendamping PKH

Bapak Andre, beliau mengatakan bahwa :

“Begini mbak, setiap tahun harus ada 10 orang yang di graduasi, kepada penerima PKH dan Sembako siap gak siap, diwajibkan untuk menggraduasikan diri dari bantuan PKH dan Sembako yang artinya jika keluarga tersebut sudah memiliki perekonomian yang cukup bagus, dilihat dari segi fasilitas rumahnya bagus sudah baik, dari segi perekonomiannya cukup baik, maka keluarga tersebut harus mundur dari PKH dan Sembako ini. Karena saya menemukan salah satu KPM PKH yang sudah mapan dari segi kehidupan perekonomiannya sudah lebih baik namun tidak mau mengundurkan diri dari progam bantuan ini. Jadi menurut saya dikarenakan penerima PKH dan Sembako datanya sudah dari keputusan pemerintah pusat jadi ya, mengenai hal penerima tepat sasaran atau tidaknya menurut saya kurang tepat, karena masih ada keluarga yang masuk kedalam kategori miskin tetapi belum menjadi peserta KPM PKH”.⁸²

⁸¹ Suprianta, Wawancara, 4 Maret 2023.

⁸² Andre, Wawancara, 5 Maret 2023.

Tabel 3.4
Data Penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan Sembako
Kecamatan Pulung Tahun 2022

No	Desa	Jumlah
1	Banaran	279
2	Bedrug	273
3	Bekiring	348
4	Karangpatihan	381
5	Kesugihan	289
6	Munggung	604
7	Patik	165
8	Plunturan	369
9	Pomahan	529
10	Pulung	360
11	Pulung Merdiko	207
12	Serag	177
13	Sidoharjo	209
14	Singgahan	372
15	Tegalrejo	166
16	Wagir Kidul	591
17	Wayang	177
18	Wotan	225
Jumlah		5721

Sumber: Pendamping PKH Kecamatan Pulung

Hal ini juga sesuai dengan data yang dimiliki oleh pihak sekretaris kecamatan, pendamping kecamatan Pulung tentang penduduk yang di dukung, dan kesimpulan dari data tersebut bahwa dukungan tersebut sebenarnya diberikan kepada mereka yang layak dan berhak mendapatkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh layanan penanganan fakir miskin. Pada aspek ketepatan sasaran yang diungkapkan dari berbagai pihak bahwa bantuan ini sesuai realitanya belum sepenuhnya tepat sasaran.

Dari bukti wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PKH dan Sembako di Kecamatan Pulung belum tepat sasaran dalam arti tidak diberikan kepada yang berhak menerima dan memenuhi kriteria penerima bantuan PKH dan Sembako yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melainkan justru yang layak dan berhak mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan sedangkan yang sudah masuk dikategorikan sudah mampu justru mendapatkan bantuan sama sekali.

b. Tepat jumlah

Bantuan berupa dana yang diberikan kepada KPM PKH yakni disesuaikan dengan kriteria komponen yang telah dipaparkan. Jadi disetiap komponen akan berbeda terkait jumlah dana yang diterima.

Pada aspek ketepatan jumlah

Bapak Syaiful selaku pendamping PKH Kecamatan Pulung mengatakan bahwa :

“dana yang disalurkan sudah tepat sesuai jumlah dari kriteria komponen yang ada mbak dan tidak ada potongan sama sekali, setiap KPM menerima penuh sesuai jumlah dana yang diberikan mbak. Dan uang tersebut bisa diambil di kartu ATM yang telah didaftarkan kecuali untuk program Sembako KPM menerima uang sebesar 200.000 namun uang tersebut harus ditukarkan dengan barang makanan pokok di E-Warong yang telah disediakan”.⁸³

Selain dari pendamping Kecamatan Pulung dari Pamong Desa pun menambah pendapat bapak Syaiful, Ibu Sri Utami Mengatakan :

“kalau untuk jumlah dana yang disalurkan sudah tepat sesuai kriteria komponen yang diterima mbak, dan KPM bisa langsung

⁸³ Syaiful, Wawancara, 2 Maret 2023.

mengambilnya langsung lewat ATM Bank BNI, namun masih banyak KPM yang terkendala dalam hal ini, karena mereka tidak bisa mengoperasikan alat ATM sehingga lebih memilih meminta bantuan kepada ketua kelompok PKH dan Sembako setempat untuk bantu mencairkan”.⁸⁴

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sulasmi selaku KPM, beliau mengatakan bahwa :

“Bantuan yang diberikan sudah sesuai mbak, saya tergolong KPM penerima PKH komponen Lansia menerima uang sebesar 2.400.000 mbak, namun dana sebesar ini diberikan 4 kali dalam setahun jadi setiap 3 bulan sekali saya menerima uang sebesar 600.000. dan untuk bantuan sembako itu mendapat uang 200.000 mbak, tapi uang tersebut nantinya ditukar dengan barang berupa makanan pokok seperti, beras, telur dan sayuran terkadang juga daging”.⁸⁵

Selain dari pernyataan diatas ketepatan jumlah juga dibuktikan dengan hasil wawancara dari KPM penerima PKH dan Sembako, ibu Boyami mengatakan bahwa:

“Iya benar mbak bantuan PKH itu 2.400.000 untuk komponen lansia dan diberikan sesuai jumlah dana yang telah dijadwalkan. Untuk bantuan Sembako juga benar mbak mendapatkan uang 200.000 tiap satu bulan sekali, namun uang tersebut dirupakan makanan pokok yang terdiri dari beras, telur, daging, buabuahan, sayuran”.⁸⁶

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan PKH dan Sembako ini sudah tepat jumlah yakni dana yang disalurkan sesuai kriteria komponen yang telah dijadwalkan setiap tiga bulan sekali. Sedangkan progam sembako juga sudah tepat jumlah yakni KPM menerima dana sebesar 200.000 perbulan namun dirupakan barang untuk makanan pokok seperti beras, telur, daging, buah-buahan dan sebagainya. Bantuan sembako ini tidak dirupakan uang karena

⁸⁴ Sri Utami, Wawancara, 4 Maret 2023.

⁸⁵ Sulasmi, Wawancara, 4 Maret 2023.

⁸⁶ Boyami, Wawancara, 4 Maret 2023.

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain itu membantu masyarakat untuk meminimalisir pengeluaran dalam bidang makanan pokok.

c. Tepat manfaat

KPM yang tepat memanfaatkan bantuan dana dan barang yang telah diterimanya, sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. KPM PKH menerima dana bantuan sesuai kriteria komponen yang ada. Sedangkan KPM sembako menerima dana sebesar 200.000 perbulan namun dirupakan sembako.

Berdasarkan bhasil wawancara dengan Ibu Katiyem salah satu peserta PKH, menyatakan bahwa:

“saya seorang ibu rumah tangga, suami saya bekerja sebagai buruh tani. Saya mendapat bantuan PKH ini dari tahun 2018, dana besaran bantuan yang saya dapatkan setiap tiga bulannya itu berupa uang dan barang kebutuhan pokok. Untuk uang setiap 3 bulanya saya mendapatkan Rp. 600.000 dan untuk barang kebutuhan pokok seperti beras 10kg, telur dan sayuran. Saya mendapatkan uang 600.000 tiap tiga bulan karena dalam keluarga saya terdapat komponen pendidikan, anak saya banyak namun masih 2 yang duduk dibangku sekolah di MI jadi untuk satu anak ini mendapatkan uang 300.000. biasanya uang yang saya dapatkan dari bantuan PKH ini saya pergunakan untuk keperluan sekolah anak seperti membayar bulanan sekolah anak, membeli buku dan alat tulis. Namun terkadang juga saya pergunakan untuk untuk keperluan diluar sekolah seperti untuk beli pulsa, bayar hutang, beli keperluan dapur seperti gas, galon, selain itu juga untuk membeli perlengkapan mandi dan bensin. Saya sangat bersyukur mendapatkan bantuan ini karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya dan meminimalisir pengeluaran saya. Meskipun terkadang saya menggunakan uang bantuan PKH untuk membeli

keperluan untuk memasak, dan juga membeli pulsa mbak. Tapi yang saya utamakan adalah untuk keperluan anak sekolah dulu”.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Soenah salah satu penerima bantuan PKH dan Sembako, menyatakan bahwa:

“Saya mendapatkan bantuan PKH dan Sembako dari tahun 2019, saya memiliki 3 orang anak suami saya bekerja serabutan. Sedangkan penghasilan suami saya tiap bulanya tidak menentu, paling banyak pendapatan suami saya tiap bulanya kurang lebih Rp. 1.000.000 mbak. Saya menerima uang bantuan PKH tiap tiga bulanya sebesar Rp. 500.000 dan bantuan barang kebutuhan pokok seperti beras 10kg, telur dan sayuran. Biasanya uang bantuan PKH tersebut saya pergunakan untuk keperluan anak sekolah saya mbak, sisanya saya pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkadang untuk membeli baju harian anak-anak, keperluan dapur, beli tas, tapi keperluan anak sekolah saya utamakan mbak”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Katri selaku penerima bantuan PKH dan Sembako sekaligus ketua kelompok PKH Dusun Dungus Desa Karangpatihan beliau mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan bantuan PKH dari komponen pendidikan, karena 2 anak saya masih sekolah ditingkat MI, setiap tiga bulan sekali saya menerima uang bantuan sebesar 600.000. uang bantuan tersebut tidak selalu saya pergunakan untuk keperluan sekolah anak saja, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan sehari-hari, untuk membeli bensin, gas, baju, tas dan sebagainya, namun untuk keperluan sekolah anak masih selalu saya utamakan”.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Srikin mengenai bantuan sembako yang setiap bulan cair. Beliau mengatakan:

“Iya mbak bantuan sembako setiap bulan cair, lalu saya mendapatkan beras 10kg, telur, sayuran, kadang daging dan buah-buahan, dan juga bumbu dapur seperti bawang putih mbak, namun karena setiap bulan bantuanya selalu cair stok bahan pokok dirumah saya tidak pernah habis, karena bantuan bulan lalu belum habis bantuan

⁸⁷ Katiyem, Wawancara, 21 Januari 2023.

⁸⁸ Soenah, Wawancara, 5 Maret 2023.

⁸⁹ Katri, Wawancara, 22 Januari 2023.

bulan sekarang datang lagi, jadi sebagian saya kasihkan tetangga saya mbak dan untuk berasnya terkadang saya mendapati kualitas yang tidak bagus seperti terdapat ulat dan kutu dalam beras sembako tersebut, jadi saya jual ke toko untuk ditukarkan dengan uang mbak”.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dana maupun barang yang diberikan kepada KPM PKH dan Sembako belum seluruhnya tepat manfaat dari segi penggunaan dan pengelolaan. Memang bantuan ini sudah cukup membantu ekonomi keluarga dan meminimalisir pengeluaran, namun masih terdapat KPM yang tidak memanfaatkan dana maupun barang bantuan tersebut sesuai dengan tujuan awal pemberian bantuan PKH dan Sembako.

d. Tepat Administrasi

Tepat administrasi yang dimaksudkan dalam bantuan PKH dan sembako ini adalah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan instrumen klarifikasi data KPM yang ada pada buku pedoman PKH dan Sembako Tahun 2022

Pada aspek tepat administrasi Bapak Syaiful selaku pendamping PKH kecamatan Pulung mengungkapkan bahwa seluruh KPM sudah sesuai administrasinya dengan syarat dan petunjuk yang ada dalam buku pedoman. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan dengan bukti wawancara sebagai berikut:

“untuk administrasi KPM sangat mudah hanya fotocopy KTP dan KK saja sudah cukup, bagi yang tidak lengkap misalnya tidak/belum memiliki KTP langsung lapor ke desa untuk meminta surat keterangan bahwa orang tersebut memang berasal dari desa diwilayah Kecamatan Pulung. Namun jika terdapat masyarakat yang tidak

⁹⁰ Srikin, Wawancara, 5 Maret 2023.

memiliki KTP dan tidak mau mengurus di kantor desa masing-masing. bantuan tersebut tidak akan diberikan dan akan dialihkan ke orang lain yang lebih membutuhkan, karena tidak memenuhi syarat yang telah disepakati”.⁹¹

Tidak hanya itu saja pihak perangkat desa Bapak Suprianta juga menambahkan bahwa KPM PKH dan sembako untuk mendapatkan bantuan ini hanya menyertakan Fotocopy KTP dan KK saja, ia mengatakan bahwa:

“untuk syaratnya sangat mudah mbak, hanya menyetorkan fotocopy KTP dan KK saja sudah cukup, karena data sebelumnya sudah tertera pada data BNBA dan SK PKH, jadi pendamping tinggal mengidentifikasi kelapangan saja, untuk layak atau tidaknya itu sudah ditentukan oleh pihak Kabupaten karena sudah tertera di pedoman ”.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Semi selaku penerima bantuan PKH dan Sembako, beliau juga mengatakan bahwa syaratnya simpel cukup menyetorkan Fotocopy KTP dan KK, beliau menyatakan

“iya mbak, syaratnya cukup simpel karena hanya menyetorkan Fotocopy KTP dan KK saja”.⁹³

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tepat administrasi yakni sesuai dengan prosedur yang ada pada panduan Teknis Umum yaitu berupa fotocopy KTP dan KK, KPM yang nantinya akan mendapatkan bantuan PKH dan Sembako ini. Sehingga dari berbagai pernyataan diatas menunjukkan bahwa seluruh KPM sudah sesuai administrasinya dalam arti sudah tepat administrasinya untuk mendapatkan bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako ini.

⁹¹ Syaiful, Wawancara, 04 Maret 2023.

⁹² Suprianta, Wawancara, 05 Maret 2023.

⁹³ Semi, Wawancara, 5 Maret 2023.

2. Sosialisasi Progam

Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga merupakan salah satu kegiatan sosialisasi PKH dan Sembako. Dalam Progam Keluarga Harapan ini mengenai sosialisasi dan pengembangan ketrampilan yang diberikan oleh pendamping PKH. Dalam bidang sosialisasi ini, pendamping PKH memberikan materi tentang keluarga, mengatur keuangan rumah tangga, dan tentang kesehatan. Dengan adanya sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta PKH tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam hal memperbaiki kualitas hidup keluarga di masa depan. Oleh sebab itu, pemenuhan kewajiban oleh peserta PKH dan sembako tidak semata pemenuhan kewajiban sebagai penerima PKH dan Sembako, namun juga sebab adanya kesadaran manfaat pendidikan dan kesehatan bagi anak dalam keluarga peserta penerima manfaat. Sosialisasi progam ini memiliki modul utama yaitu modul kesehatan dan gizi, modul pendidikan dan pengasuhan anak, modul keuangan keluarga, modul perlindungan anak, serta modul kesejahteraan sosial. Dari modul tersebut pendamping PKH ikut serta bertanggungjawab dalam penyampaian disetiap modul.

Untuk melihat bagaimana kegiatan sosialisasi dalam efektivitas pemberian bantuan PKH dan Sembako di Kecamatan Pulung berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, Bapak Syaiful menyatakan bahwa:

“Memang setiap bulannya saya selaku pendamping PKH Kecamatan Pulung beserta rekan-rekan harus pertemuan rutin bulanan.

Dan dikelompok saya pertemuan rutin bulanan diadakan tiap tanggal 15 . oleh karena sekarang sudah ada modul PKH ya mbak, jadi pertemuan rutin tiap bulan ini biasanya saya isi dengan sosialisasi dan juga pengembangan keterampilan, dimana dalam setiap materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan panduan dari modul P2K2 itu lo mbak. Terkait sosialisasi ini biasanya saya mengundang seorang pemateri khusus untuk memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi yang terjadi sekarang, seperti bulan lalu saya mengundang teman saya yang kebetulan beliau adalah seorang bidan. Beliau saya mintai tolong untuk memberikan materi mengenai kesehatan. Jadi kegiatan sosialisasi rutin bulanan ini terkadang saya isi dengan sosialisasi terkadang juga mengenai pengembangan keterampilan. Nah mengenai pengembangan keterampilan ini biasanya saya isi dengan membuat kerajinan tangan tujuannya agar dari pembuatan kerajinan tangan atau hasil karya yang dibuat ini dapat menghasilkan penghasilan tambahan untuk peserta penerima manfaat”.⁹⁴

Dari pernyataan pendamping PKH tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan ibu Setiyawati selaku KPM PKH, beliau menyatakan:

“selama saya mendapatkan bantuan PKH, tiap pertemuan rutin bulanan saya selalu hadir, kalau saya tidak hadir nanti dana PKH saya tidak keluar di bulan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan pada saat pertemuan rutin bulanan itu selain daftar hadir/absen ya mbak, karena dari pendamping diberi buku modul tentang pendidikan, kesehatan, tentang keuangan keluarga begitu mbak, terkadang dari pendamping PKH diisi dengan sosialisasi tentang cara mengasuh anak yang benar dan baik, cara mengelola keuangan dalam keluarga. Namun kalau pelatihan keterampilan dari pendamping belum pernah menyampaikan mbak, jadi pertemuan bulanan itu kita selalu mendapat masukan hanya sosialisasi dari pendamping gitu aja mbak”.⁹⁵

Pernyataan ini sama halnya dengan pernyataan yang telah diungkapkan oleh ibu Sri Utami bahwa dalam hal penyampaian materi PKH yaitu sosialisasi selalu dilakukan, akan tetapi dalam hal pengembangan keterampilan belum ada. Ibu Sri Utami mengatakan :

⁹⁴ Syaiful, Wawancara, 04 Maret 2023.

⁹⁵ Setiyawati, Wawancara, 6 Maret 2023.

“Pertemuan rutin antara KPM dan pendamping selalu dilakukan setiap bulan, adapun kegiatan awal yang dilakukan itu biasanya mengisi absen/daftar hadir terlebih dahulu, setelah itu baru pendamping PKH menyampaikan sosialisasi tentang materi PKH dan Sembako sesuai dengan modul p2k2, akan tetapi dalam hal penyampaian mengenai pengembangan keterampilan atau kerajinan tangan gitu dari pendang belum pernah disampaikan, jadi hanya ada sosialisasi saja mbak ”.⁹⁶

Berdasarkan data hasil wawancara diatas dapat diketahui dari proses sosialisasi yang merupakan tujuan dari pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, dimana dalam setiap bulannya selalu diadakan pertemuan rutin bulanan dan peserta penerima manfaat berkewajiban untuk mengikuti pertemuan rutin bulanan tersebut. Begitu juga dengan pendamping PKH yang setiap bulanya menyampaikan materi P2K2 dalam bentuk sosialisasi dan belum terlaksananya pengembangan pelatihan maupun keterampilan dengan peserta penerima manfaat PKH dan Sembako.

3. Tujuan Progam

a. Progam Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta mengubah perilaku KPM yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok miskin. Secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH), antara lain:⁹⁷

⁹⁶ Sri Utami, Wawancara, 6 Maret 2023.

⁹⁷ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021* (dalam <https://kemensos.go.id> diakses pada 10 Januari 2023).

- 1) Meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini program PKH ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah KPM yang bersekolah dengan wajib belajar selama 12 tahun, ibu hamil, bayi dan balita telah memeriksakan kesehatannya dengan mudah dan rutin serta lansia diperhatikan kesehatannya melalui posyandu lansia juga penyandang disabilitas melalui home visit untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Dengan adanya bantuan PKH ini membuat anak-anak yang malas untuk bersekolah mau tidak mau harus menyelesaikan pendidikannya sampai sekolah menengah ke atas. Berdasarkan wawancara dengan ibu ketua kelompok PKH mengatakan bahwa:

“Iya mbak, kemarin dana bantuan ini ada yang dipending karena terdapat KPM komponen pendidikan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk bersekolah selama 12 tahun, karena waktu masuk SMK berjalan 1 semester tidak mau melanjutkan. Selain itu ada juga KPM dalam komponen kesehatan yang sudah mendapat bantuan dari tahun 2017 sampai sekarang kondisinya juga tidak semakin membaik. Maka dari itu KPM dari komponen kesehatan seperti mbak saroh sudah dicabut bantuannya, kalau mas bima yang tidak mau melanjutkan sekolah bantuannya masih dipending”.⁹⁸

Dari bukti wawancara tersebut menunjukkan bahwa tujuan untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat KPM yang duduk di sekolah menengah ke atas tidak mau menyelesaikan hingga selesai,

⁹⁸ Katri, Wawancara, 05 Maret 2023.

yang membuat bantuan ini harus dipending dan menimbulkan iri kepada mereka yang belum menjadi KPM. Selain itu juga ada KPM komponen kesehatan juga tidak mengalami perubahan apa apa setelah mendapatkan bantuan dan akhirnya bantuan tersebut di cabut oleh pemerintah dengan melihat juga dari segi perekonomian KPM, kondisi fasilitas dan kesehariannya.

2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Dengan adanya bantuan PKH ini diharapkan dapat menjadikan keluarga penerima manfaat mendapatkan tambahan penghasilan. Jumlah tambahan tersebut berupa uang setelah adanya pencairan sebesar dengan ketentuan penerimaan komponen. Keluarga penerima manfaat diharapkan menggunakan bantuan sesuai aturan yaitu untuk komponen pendidikan digunakan untuk pembayaran biaya sekolah, dalam komponen kesehatan dan kesejahteraan yaitu untuk pemenuhan gizi dari ibu hamil, bayi usia 0-6 tahun, lansia dan penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Farida selaku penerima KPM beliau mengatakan bahwa:

“dana dari uang PKH ini saya pergunakan untuk keperluan anak saya untuk membeli susu mbak, saya mendapat bantuan ini karena saya memiliki anak usia dini (balita), biasanya tiap tiga bulan sekali saya menerima uang 750.000 mbak, namun uang ini sebenarnya saya gunakan juga untuk menutupi kebutuhan lainnya mbak seperti beli gas, galon, beli baju anak, beli keperluan dapur,

beli bensin, dan sisanya untuk jalan-jalan dan beli tas atau baju saya”.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan di Kecamatan Pulung telah berjalan, hal ini dapat dilihat dari sebagian KPM yang telah memanfaatkan bantuan ini sesuai aturan yaitu untuk komponen pendidikan digunakan untuk pembayaran biaya sekolah, dalam komponen kesehatan dan kesejahteraan yaitu untuk pemenuhan gizi dari ibu hamil, bayi usia 0-6 tahun, lansia dan penyandang disabilitas. Masih ditemukan KPM yang menggunakan bantuan ini untuk membeli pulsa, jalan-jalan bahkan untuk mempercantik diri yang tidak sesuai dengan aturan PKH untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini tidak adanya kewajiban pengumpulan bukti penggunaan bantuan yang membuat KPM belum sepenuhnya menggunakan dana bantuan sesuai aturan.

3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sikat, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah mbak, saya mendapatkan bantuan ini karena saya memiliki anak sekolah mbak, kebetulan anak saya, saya sekolahkan di MTS mbk, untuk perubahan perilaku anak saya alhamdulillah mbak, mungkin apa lingkungannya juga lingkungan pondok ya mbak selain itu disana juga mendapat didikan yang bagus, jadi efeknya kepada anak saya juga bagus mbak”.¹⁰⁰

⁹⁹ Nur Farida, Wawancara, 6 Maret 2023.

¹⁰⁰ Sikat, Wawancara, 7 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas telah membuktikan bahwa terdapat perubahan perilaku pada KPM dalam pendidikan baik untuk anak maupun keluarga penerima manfaat, telah terdapat anak keluarga penerima manfaat yang bersekolah hingga perguruan tinggi yang dapat menjadi cerminan bahwa keluarga penerima manfaat telah menganggap pendidikan merupakan hal yang sangat penting, dalam mendidik anak keluarga penerima manfaat sudah mengurangi perkataan yang tidak pantas maupun bertindak kasar sehingga tercipta kesadaran untuk bersikap sopan. Didalam bidang kesehatan keluarga penerima manfaat juga sudah rutin memeriksa kesehatan di fasilitas kesehatan yaitu posyandu dan puskesmas bukan lagi ke dukun seperti yang dilakukan jaman dahulu.

Adapun dalam menciptakan kemandirian belum tercapai , hal ini dikarenakan penerima manfaat sulit menanamkan jiwa wirausaha sejak dini untuk berani membuka usaha, hal ini terjadi karena disebabkan oleh rasa takut akan gagal dan tidak kembalinya modal dalam berwirausaha. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

Adapun tujuan PKH ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara melakukan pencairan tepat waktu dan sosialisasi penggunaan dana untuk mengurangi kemiskinan, serta berusaha untuk merubah mindset masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan. Adapun dalam hal kesenjangan antar masyarakat

yaitu melalui pemenuhan makan sehari-hari bagi keluarga penerima manfaat, selain itu berusaha mengusulkan masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan agar tidak menimbulkan kesenjangan antar masyarakat yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tumini, beliau mengatakan bahwa:

“katanya dana bantuan ini cair setiap tanggal 15 mbak namun terkadang juga pernah molor tapi sering tepat sih mbak, kemarin tanggal 20 baru juga cair uangnya, saya ini hanya buruh tani mbak sehingga dengan cairnya uang ini saya merasa terbantu sekali karena banyaknya kebutuhan rumah tangga yang mendesak”.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas di dalam mengurangi kemiskinan dan pengurangan kesenjangan belum efektif, padahal Pendamping juga telah melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui pencairan tepat waktu dan sosialisasi penggunaan dana untuk mengurangi kemiskinan. Namun hal ini belum dapat membuat tujuan tercapai. sulit menambah mindset KPM untuk keluar dari jurang kemiskinan, menyebabkan hanya pengurangan kesenjangan yang telah dirasakan oleh KPM di Kecamatan Pulung melalui pemenuhan makan sehari-hari bagi KPM.

- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

¹⁰¹ Tumini, Wawancara, 7 Maret 2023.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sirius selaku KPM PKH, beliau mengatakan bahwa:

“waktu sosialisasi memang pendamping selalu hadir untuk menyampaikan materi terkait bagaimana cara mengasuh anak dengan baik, menjaga kesehatan, kadang juga bawa teman dokternya untuk sosialisasi tentang kesehatan mbak, namun selama saya mengikuti kegiatan ini saya belum mendengarkan mengenai pendamping memberikan pengembangan pelatihan dan keterampilan mbak, untuk pengarahan cara mencairkan dana juga dijelaskan tapi kami sulit memahami mbak, mungkin karena keterbatasan teknologi jaman sekarang”.¹⁰²

Berdasarkan bukti wawancara diatas dalam hal tujuan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal belum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. dalam mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM diharapkan dapat memberikan ketrampilan terhadap KPM untuk membantu mereka dalam hal seni dan *skill* yang nantinya ketrampilan tersebut dapat dijadikan sebagai modal/acuan mereka untuk membuka usaha baru dan pengetahuan lebih luas terhadap mereka.

Namun hal tersebut hanya terdapat pengarahan saja tidak disertai dengan pengembangan pelatihan dan keterampilan saja sehingga hanya ada teori saja tanpa praktek yang membuat KPM hanya berangan-angan saja dari pengrahan tersebut. Adapun mengenai sistem perbankan dan penggunaan ATM sebagai alat penyaluran bantuan juga belum efektif, karena mereka belum begitu paham mengenai alat penyaluran bantuan ini karena keterbatasan

¹⁰² Sirius, Wawancara, 7 Maret 2023.

tekologi jaman sekarang. Sehingga waktu pencairan KPM selalu minta bantuan ketua kelompok PKH untuk pencairan.

b. Progam Sembako

tujuan dari adanya bantuan sembako yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, Meningkatkan bahan pangan dengan ketepatan sasaran, waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan administrasi, Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Dengan paparan diatas dibuktikan dengan berbagai sumber yang mengatakan bahwa tujuan utama progam Sembako yakni membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah mendapatkan bantuan KPM merasa terbantu dan bisa sedikit mengurangi pengeluaran setiap keluarga.. Seperti yang diperkuat dengan bukti wawancara Bapak Syaiful selaku Pendamping kecamatan, beliau menyatakan bahwa:

“iya benar mbak, salah satu tujuan utama dari progam bantuan ini yakni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir pengeluaran setiap keluarga, jadi berdasarkan hasil observasi saya dilapangan saya mendapati KPM yang sangat bersyukur akan bantuan ini, karena memang mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga dengan mereka mendapat bantuan ini sangat terbantu dan mereka manfaatkan sesuai kebutuhan mereka yakni untuk pendidikan anak, jadi menurut saya progam ini sudah tepat tujuannya”.¹⁰³

¹⁰³ Syaiful, Wawancara, 09 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suprianta, beliau menyatakan bahwa program ini belum berjalan sesuai dengan tujuannya secara maksimal, berikut bukti wawancaranya:

“menurut saya kalau berjalan sesuai dengan tujuannya sudah tapi belum maksimal mbak, karena ada sebagian KPM yang kurang memanfaatkan dana bantuan yang diberikan dari program ini, kebanyakan mereka gunakan untuk kepentingan lain diluar komponen PKH seperti membeli kebutuhan dapur, beli bensin dan sebagainya, dan untuk jatah uang sekolah anak biasanya diganti jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Sedangkan untuk program sembako ya mbak, menurut saya belum sesuai tujuan mbak, karena dalam buku panduan sembako tertera KPM sembako diperkenankan memilih sendiri bahan makanan pokok yang akan diambil, namun sebaliknya mbak, jadi KPM sembako untuk jatah barang makanan pokoknya itu sudah dipaket setara uang senilai 200.000 dan kemudian diantar kerumah ketua kelompok PKH setempat, selain itu juga masih ada KPM yang menerima beras dengan kualitas yang jelek seperti ada kutu dan ulatnya, akhirnya sebagian KPM menjual beras bantuan tersebut ke toko terdekat untuk ditukarkan dengan uang, jadi menurut saya mengenai hal sudah sesuai tujuan pemberian bantuan itu masih belum sesuai mbak dengan menimbang observasi yang saya temui dilapangan”.¹⁰⁴

Pernyataan ini diperkuat dengan bukti wawancara dengan ibu Sulastri selaku penerima manfaat beliau menyatakan bahwa:

“dana dari uang PKH ini saya pergunakan untuk keperluan anak saya untuk membeli susu mbak, saya mendapat bantuan ini karena saya memiliki anak usia dini (balita), biasanya tiap tiga bulan sekali saya menerima uang 750.000 mbak, namun uang ini sebenarnya saya gunakan juga untuk menutupi kebutuhan lainnya mbak seperti beli gas, galon, beli baju anak, beli keperluan dapur, beli bensin, dan sisanya untuk beli tas atau baju saya. Sedangkan untuk bantuan sembako ini cair setiap 1 bulan sekali selalu cair sehingga terjadi penumpukan beras maupun bumbu dapur mbak, karena bulan lalu belum habis, bulan depan sudah mau dapat lagi, terkadang untuk berasnya saya jual ke warung terdekat mbak untuk ditukar dengan uang karena jika dibiarkan terlalu lama juga kualitasnya semakin jelek, menurut saya bantuan ini

¹⁰⁴ Suprianta, Wawancara, 8 Maret 2023.

belum maksimal saya gunakan sesuai tujuan pemberian bantuan, ya mau gimana lagi mbak, kebutuhan selain anak juga banyak”.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Katiyem beliau menyatakan bahwa:

“saya seorang ibu rumah tangga, suami saya bekerja sebagai buruh tani dan serabutan, untuk penghasilan suami saya dalam sebulan tidak menentu karena menjadi buruh tani tidak setiap hari bisa bekerja, keluarga saya mendapat bantuan PKH dan Sembako ini sejak tahun 2018, kemarin saya mendapat bantuan PKH berupa uang Rp.500.000 tiap 3 bulan sekali dan bantuan sembako berupa beras 10kg, telur, dan kacang. Bantuan PKH berupa uang tersebut biasanya saya gunakan untuk keperluan sekolah anak saya mbak dan beli kebutuhan rumah tangga, saya merasa pantas mbak dalam menerima bantuan PKH ini karena merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari jika hanya mengandalkan penghasilan suami saja masih belum cukup mbak, dan menurut saya bantuan ini sudah sesuai tujuan karena yang menjadi anggota PKH dikelompok saya ini termasuk dalam kategori keluarga yang kurang mampu”.¹⁰⁶

Berdasarkan paparan bukti wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai tujuan utama program PKH dan Sembako yakni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan telah dijelaskan oleh beberapa pihak bahwasanya kebutuhan KPM telah terbantu setelah mendapatkan bantuan walaupun tidak seberapa namun bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sebagian KPM ada yang kurang tepat dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan dana maupun barang yang diberikan, seharusnya dana yang di dapat itu dimanfaatkan sesuai kebutuhan saja dan dimanfaatkan sesuai tujuan awal pemberian sembako, selain itu barang berupa makanan pokok seperti beras kurang berkualitas seperti yang tertera pada buku panduan sembako. akhirnya

¹⁰⁵ Sulastrri, Wawancara, 05 Maret 2023.

¹⁰⁶ Katiyem, Wawancara, 05 Maret 2023.

sebagian tidak dikonsumsi oleh masyarakat dan memilih dijual ke warung terdekat. Selain itu pada buku panduan sembako disebutkan bahwa KPM memiliki hak kendali dalam memilih bahan makanan pokok yang tersedia di e-warung, namun dalam realitanya berbeda, disini KPM langsung menerima jadi setelah disiapkan oleh pihak e-warung dan diantar kerumah ketua PKH setempat. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa program ini belum sesuai tujuan awal pemberian bantuan PKH dan Sembako.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program atau monitoring merupakan suatu kegiatan yang memantau adanya kemajuan pelaksanaan suatu rencana pembangunan, mengidentifikasi dan memprediksi masalah yang telah terjadi serta memungkinkan untuk diambil tindakan sesegera mungkin.

b. Pemantauan Publik

Yakni pemantauan yang dilakukan oleh pihak yang mengadakan atau yang mengatur bantuan program PKH dan Sembako selama berlangsung sebelum dan setelah mendapatkan bantuan. Jadi pemantauan ini telah dilakukan oleh Bapak Syaiful selaku Pendamping Kecamatan untuk mengetahui bagaimana KPM yang telah menerima bantuan apakah ada peningkatan atau ada hambatan ketika menerima bantuan. Beliau menambahkan bahwa telah melakukan pendampingan kepada KPM sebagaimana dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Dari awal pendamping PKH selalu mengadakan pertemuan rutin tiap bulan sekali mbak, jadi dalam pertemuan itu, saya memberikan pengarahan, pendampingan, pemantauan sekaligus sosialisasi tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan mbak, karena sesuai dengan tujuan pemberian bantuan ini yakni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ya mbak, dengan terjaminnya pendidikan dan kesehatan bagi KPM maka kesejahteraan akan mudah dicapai, bukankah seperti itu mbak, selain itu saya juga adakan evaluasi program juga mbak, jadi jika terdapat masalah maupun hambatan untuk kedepannya sudah memiliki bekal mbak”.¹⁰⁷

Beliau juga mengatakan bahwa pendamping PKH selalu aktif hadir dalam pertemuan rutin bulanan untuk melakukan pemantauan, sebagian KPM belum begitu paham mengenai pencairan dana bantuan ini, karena faktor teknologi jaman sekarang, beliau menyatakan:

“Saya selaku pendamping PKH selalu hadir dalam pertemuan rutin bulanan mbak, karena saya memang ditugaskan menjadi pendamping PKH untuk mendampingi KPM. Dan saya juga ikut andil serta aktif dalam kegiatan PKH dan Sembako bersama dengan anggota PKH saya berusaha untuk aktif dan selalu mengikuti kegiatan mulai dari pertemuan awal dengan peserta penerima manfaat, membantu memverifikasi data antara pihak bank dengan anggota yang bersangkutan, sampai penyaluran uang bantuan dari pihak bank dengan anggota langsung, karena sebagian besar anggota KPM belum begitu paham mengenai sistem pencairan uang dan masalah teknologi jaman sekarang, jadi hal seperti perlu sekali untuk saya pantau mbak, demi kelancaran program bantuan ini”.¹⁰⁸

Ibu Srikin mengatakan bahwa setiap bulan ada pertemuan sekaligus ada pemantauan dari pihak pendamping kecamatan, beliau mengatakan:

“setiap acara pertemuan rutin bulanan pendamping pasti selalu hadir mbak untuk menyampaikan materi kadang bawa temenya untuk sosialisasi tentang kesehatan sekaligus pendamping juga melakukan pemantauan terhadap KPM mbk, namun tidak semuanya dapat

¹⁰⁷ Syaiful, Wawancara, 09 Maret 2023.

¹⁰⁸ Syaiful, Wawancara, 09 Maret 2023.

terpantau oleh pendamping karena saking banyaknya peserta penerima manfaat dikecamatan pulung, buktinya kalau memang semuanya sudah terpantau pastinya sudah tidak ada masalah tentang ketidaktepatan sasaran dong mbak”.¹⁰⁹

Begitu juga dengan Bapak Suprianta selaku perangkat desa juga pernah melakukan pemantauan progam, beliau menambahkan bahwa beliau juga pernah melakukan pemantauan terhadap KPM PKH dan Sembako dibuktikan dengan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Begini mbak, karena saya juga hidup dilingkungan sekitar masyarakat KPM PKH dan Sembako saya juga memperhatikan mereka mengalami peningkatan dari segi perekonomian keluarga, kondisi kesehariannya, kondisi fasilitas yang tersedia dirumah serta luasnya lahan sawah, tegal dan sebagainya, menurut saya warga yang sudah mampu harus segera melakukan graduasi secara mandiri tidak usah menunggu pendamping untuk melakukan graduasi”.¹¹⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak pendamping kecamatan, pamong desa/perangkat desa, sudah melakukan pemantauan progam terhadap KPM penerima PKH dan Sembako, namun berbeda dengan apa yang dikatakan oleh KPM penerima manfaat bahwa tidak semua telah dilakukan pemantauan dari pihak pendamping maupun perangkat/pamong desa setempat, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sulasmi bahwa pernah melakukan pemantauan akan tetapi tidak keseluruhan KPM yang dipantau. Sehingga dalam hal ini progam PKH dan Sembako dapat dikatakan belum efektif karena tidak keseluruhan KPM terpantau oleh pendamping.

¹⁰⁹ Srikin, Wawancara, 10 Maret 2023.

¹¹⁰ Suprianta, Wawancara, 10 Maret 2023.

c. Pemantauan Fungsional

Yakni pemantauan yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako yang telah dilaksanakan, jadi pemantauan ini dilakukan oleh pendamping kecamatan mengatakan bahwa pernah melakukan pemantauan secara fungsional dibuktikan dengan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“sudah pernah mbak, kemarin saya datang di desa bedruk ditemani ketua kelompok PKH setempat, saya mendatangi rumah KPM, ada peningkatan sedikit mbak dari segi perekonomiannya karena bantuan ini dimanfaatkan secara tepat dan benar dipakai sesuai kebutuhan KPM bukan sesuai keinginan KPM”.

Dalam hal pemantauann fungsional ini terdapat juga KPM yang masuk dalam komponen disabilitas tapi tidak mengalami perubahan apa-apa setelah mendapatkan bantuan ini, beliau mengatakan:

“Kemarin juga saya berkunjung kerumah KPM komponen disabilitas mbak, saya perhatikan setelah mendapatkan bantuan selama kurang lebih 4 tahun kondisinya tidak mengalami perubahan mbak, dan dilihat dari kondisi perekonomian keluarga serta kondisi rumah dan kesehariannya sudah baik daripada warga yang lain, akhirnya kami mengusulkan untuk melakukan graduasi (pengunduran diri) dari program bantuan PKH”.¹¹¹

Berdasarkan data hasil wawancara diatas dapat diketahui dari proses pemantauan fungsional tidak menutup kemungkinan KPM yang mendapatkan bantuan PKH dan Sembako mengalami perubahan maupun peningkatan. Karena hal ini sangat berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan KPM sendiri dalam memanfaatkan dana bantuan tersebut, jika mereka gunakan untuk keperluan yang tepat

¹¹¹ Syaiful, Wawancara, 09 Maret 2023.

pastinya bantuan ini sangat membantu dan menciptakan keberkahan untuk mereka. Berbicara mengenai pemantauan fungsional para pendamping kecamatan selalu melaksanakan kegiatan rutin tiap bulanya, jadi dalam kegiatan tersebut pendamping juga memantau perkembangan KPM setelah diberi bantuan ini walaupun tidak seluruhnya dipantau oleh pendamping ke rumah masing-masing KPM.

D. Faktor Yang Menghambat Keberhasilan Progam PKH dan Sembako

1. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu hal penting yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah progam. adapun menurut Suharto koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling mengatur atau menyepakati sesuatu.¹¹² Dengan adanya koordinasi ini diharapkan dapat merekomendasikan keluarga miskin dan rentan miskin menjadi keluarga penerima manfaat progam bantuan PKH dan Sembako serta terdapat koordinasi progam PKH dan Sembako dalam pengelolaan data sasaran penerima manfaat. Namun dalam progam PKH dan Sembako di Kecamatan Pulung koordinasi menjadi penghambat yang membuat progam belum berhasil. Karena tidak terdapat koordinasi dalam Progam Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pulung terkait dengan pengelolaan data sasaran PKH. Hal ini dibuktikan wawancara dengan Bapak Kepala Dusun Dungus Desa Karangpatihan beliau menyatakan bahwa,

¹¹² Apando, “Efektivitas Progam Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.”

“kalau untuk pengelolaan data sasaran PKH saya kurang tahu nggih mbak, karena katanya yang dapat PKH itu yang namanya tercantum di DTKS, lha data warga yang masuk dalam DTKS itu yang tau hanya pamong desa mbak, karena tidak ada koordiasi juga dengan saya maupun RT/RW yang ada disini. Kalau untuk progam sembako kemarin saya tahu mbak karena dikonfirmasi dari pihak desa, dikirim data usulan calon penerimanya terus disuruh untuk berkoordinasi dulu dengan RT/RW untuk pemilihan KPM ini layak atau tidaknya, tapi ini baru-baru ini mbak untuk tahun sebelumnya data penerima sudah ditentukan dari pihak atasan. namun ya begitu mbak sebagian juga belum tepat sasaran menurut saya”.¹¹³

Pernyataan ini diperkuat dari bukti wawancara dengan salah satu RT di Dusun Dungus Bapak Sunaryo, beliau mengatakan bahwa:

“Iya benar mbak kemarin saya dan ketua RT yang lain sempat berkoordinasi dengan bapak kepala dusun setempat untuk mengecek ulang data dari pusat terkait data usulan calon penerima progam sembako dan melakukan pemilahan ulang calon penerima bantuan sembako agar sesuai dan tepat sasaran mbak. Namun untuk progam PKH saya tidak tahu datanya siapa siapa mbak tau tau sudah banyak yang dapat bantuan itu”.¹¹⁴

Berdasarkan bukti wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa tidak terdapat koordinasi dalam progam PKH di kecamatan Pulung terkait dengan pengelolaan data sasaran PKH. Unit pelaksanaan PKH Kecamatan Pulung, pendamping PKH kecamatan maupun pihak kelurahan, RT dan RW belum terdapat koordinasi untuk merekomendasikan keluarga miskin dan rentan miskin menjadi keluarga penerima manfaat, karena semua pengelolaan data berasal dari Kementrian Sosial. Jadi hal ini mengakibatkan masih terdapat keluarga miskin dan rentan miskin yang belum menjadi keluarga penerima manfaat karena tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu.

¹¹³ Suprianta, Wawancara, 10 Maret 2023.

¹¹⁴ Sunaryo, Wawancara, 10 Maret 2023.

2. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu hal penting yang berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program. Perencanaan sangat dibutuhkan agar terciptanya keberhasilan Program Penerima Manfaat (PKH) dan Sembako. Menurut Siagian perencanaan adalah keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan sekarang dan apa yang akan dikerjakan di masa depan.¹¹⁵ Dalam hal perencanaan program ini diharapkan terdapat perencanaan yang matang dalam menciptakan kemandirian serta diharapkan terdapat arahan mengenai apa yang harus KPM lakukan dalam penggunaan dan pengelolaan dana bantuan. Namun sesuai realitanya perencanaan dalam Program Keluarga Harapan dan Sembako di Kecamatan Pulung belum matang. Dibuktikan dengan hasil wawancara dari Ketua Kelompok PKH, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam acara pertemuan rutin tiap bulan pendamping selalu hadir mbak untuk mendampingi kami, selain itu pendamping juga memberikan materi terkait cara mengasuh anak dengan baik, mengatur pola makan dengan mempertimbangan gizi, terkadang juga membawa temenya untuk sosialisasi tentang kesehatan mbak, namun untuk pemberian pelatihan maupun keterampilan semenjak saya dapat bantuan ini dari tahun 2018 saya belum pernah mendapat pelatihan apapun mbak, hanya diarahkan saja begini-begini, kalau mengenai dana bantuan tersebut saya pergunakan untuk kebutuhan sekolah anak saya mbak, selain itu juga saya buat memenuhi kebutuhan yang lain juga, karena kan kebutuhan sekolah juga sudah terpenuhi dan uangnya masih sisa, jadi saya pergunakan juga untuk kepentingan lain mbak, yaa walaupun keluar dari komponen PKH”.¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas belum terdapat perencanaan yang matang dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako dalam

¹¹⁵ Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

¹¹⁶ Katri, Wawancara, 10 Maret 2023.

menciptakan kemandirian maupun mengurangi kemiskinan, dikarenakan perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan KPM, ternyata kebutuhannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga menyebabkan bantuan tersebut dipergunakan untuk kepentingan diluar komponen. Selain itu pendamping hanya mengarahkan pada wirausaha tanpa memberikan arahan apa yang harus KPM lakukan setelah menerima dana maupun barang bantuan dari pemerintah dan pendamping tidak pernah memberikan pengembangan pelatihan maupun keterampilan terhadap KPM.

3. Ketepatan Layanan

Ketepatan layanan merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya sebuah program. Menurut Ripley ketepatan layanan digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam suatu program dilakukan tepat apa tidak oleh sasaran.¹¹⁷ Dalam hal ketepatan layanan ini diharapkan KPM dapat menjalankan pengenalan jasa keuangan dengan tepat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan serta dapat mengoperasikan ATM sebagai alat penyaluran dana bantuan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pendamping PKH, beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya sudah kami fasilitasi buku rekening dan ATM mbak, selain itu juga sudah saya beri arahan dalam hal pengoperasian ATM, tapi sebagian masih belum begitu paham mbk”.¹¹⁸

¹¹⁷ Joyo, “Efektivitas Implementasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) di Desa Sooko, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.”

¹¹⁸ Syaiful, Wawancara, 09 Maret 2023.

Selain itu pernyataan ini diperkuat dengan bukti wawancara dengan Ibu Katri selaku ketua kelompok PKH, beliau mengatakan bahwa:

Iya mbak, KPM PKH maupun sembako disini masih banyak yang belum bisa menjalankan kartu ATM saat pencairan dana, jadi mereka menitip ke saya waktu pencairan, sekarang yang handle waktu pencairan saya sendiri mbk, jadi untuk kartu ATM beserta pawordnya dikumpulkan ke saya, lalu nanti saya cairkan.¹¹⁹

Berdasarkan paparan wawancara diatas dalam hal ketepatan layanan belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Sembako belum menjalankan pengenalan jasa keuangan dengan tepat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini masih terdapat KPM PKH dan Sembako yang tidak dapat mengoperasikan kartu ATM menitip waktu pencairan bantuan.

¹¹⁹ Katri, Wawancara, 10 Maret 2023.

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, peneliti melakukan analisis dan menjelaskan hasil penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Program Bantuan PKH dan Sembako pada tahun 2022 di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Kemudian penjabaran tersebut akan dikaitkan dengan kajian teori pada bab II sesuai dengan topik penelitian yakni efektivitas sesuai dengan pendapat Soewarsono Handayaniingrat yakni efektivitas merupakan bentuk pengukuran dalam tercapainya suatu sasaran tertentu, yaitu tujuan yang telah ditentukan. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti akan mengorelasikan dengan pendapat Budiani, menurutnya tolak ukur efektivitas dari sebuah program dapat diketahui dari beberapa indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako merupakan program pemberian bantuan sosial yang bersyarat bagi keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Jadi data tersebut diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial, kemudian ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Sembako. Adapun dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi selanjutnya dapat keluar dari rantai kemiskinan. Dengan adanya bantuan PKH dan Sembako

ini, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di dorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer yang berkelanjutan.

Program PKH di Kabupaten Ponorogo sudah berlangsung sejak tahun 2007 sedangkan program Sembako berlangsung sejak tahun 2016. Sebelum adanya bantuan PKH dan Sembako, angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan disetiap tahunnya, meskipun sudah ada bantuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan akan tetapi masyarakat miskin masih saja ada dan cenderung meningkat. Oleh sebab itu pemerintah membuat suatu program, dimana program tersebut memiliki tujuan untuk menunjang keluarga miskin agar bisa mendapatkan hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi program ini adalah wujud nyata dari pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di Negeri ini. Lewat perantara program PKH dan sembako ini pemerintah memberikan bantuan tunai dan non tunai bersyarat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia diatas 70 tahun dan bagi penyandang disabilitas berat.

Dalam bab IV ini peneliti terlebih dahulu akan menjabarkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi pemerintah dalam meringankan beban masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako. Sebab, bantuan ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Sembako No. 5 tahun 2021 Pasal 1,

mengatakan Program Sembako adalah Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.

A. Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Pulung

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pembukaan rekening KPM

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping PKH bahwa pembukaan rekening bagi KPM PKH di Kecamatan Pulung antara teori dengan fakta dilapangan sudah sesuai karena pembukaan rekening bagi penerima bantuan PKH ini dibukakan secara kolektif secara terpusat sesuai data yang telah diserahkan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank Penyalur. Dan dalam pembukaan rekening diikuti dengan percetakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera serta PIN Mailer.

b. Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dan edukasi merupakan aktivitas untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait mengenai penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Berdasarkan fakta dilapangan kegiatan sosialisasi dan edukasi ini sudah sesuai dengan panduan PKH, karena dalam kegiatan sosialisasi telah dilakukan oleh kemensos RI bersama Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

masing-masing kepada pelaksana PKH yang terdiri dari SDM PKH, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kelurahan/desa. Setelah itu sosialisasi dan edukasi selanjutnya dilakukan oleh Bank Penyalur kepada Agen Bank. Kemudian sosialisasi dan edukasi ini dilakukan dari bank penyalur kepada KPM saat Distribusi KKS. Adapun bentuk dan edukasi dilakukan melalui pertemuan/rapat koordinasi. Kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam hal ini mencakup kebijakan bisnis proses PKH, produk, mekanisme penggunaan/penarikan rekening, KKS hilang tertelan mesin ATM dan penggantian pengurus jika terdapat pengurus KPM yang bermasalah seperti meninggal dunia, pekerja migran, kasus hukum dsb.

Dalam bidang sosialisasi ini, pendamping PKH memberikan materi dan pengarahan kepada KPM, namun dalam hal pengarahan mengenai pengenalan alat jasa keuangan seperti ATM, masih banyak dari anggota KPM yang belum begitu paham terutama bagi kalangan lansia sebab terbatasnya ilmu teknologi jaman sekarang. Sehingga waktu pencairan dana PKH, KPM banyak yang nitip kepada ketua kelompok PKH setempat

c. Distribusi KKS dan Butab

Berdasarkan observasi lapangan bahwa distribusi KKS dan Buku Tabungan sudah sesuai dengan alur mekanisme yang ada pada buku panduan, karena bank penyalur telah melakukan kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN Mailer kepada penerima

manfaat PKH. Untuk kelancaran pendistribusian KKS dan buku tabungan Bank Penyalur selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial setempat.

d. Penyaluran Bantuan PKH

Proses penyaluran bantuan PKH dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank penyalur. Berdasarkan observasi di lapangan penyaluran bantuan telah diberikan kepada KPM berdasarkan komponen kepesertaanya. Jadi penyaluran bantuan bagi peserta telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya yakni dilaksanakan setiap empat tahap dalam satu tahun, sedangkan untuk kepesertaanya ditetapkan dalam setiap tahun berjalan dan berubah, karena melihat perubahan kondisi perekonomian KPM dalam setiap tahunnya.

e. Penarikan dan Pemanfaatan Dana Bansos PKH

Penarikan dana bantuan sosial PKH merupakan kegiatan KPM dalam melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan di layanan yang disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen bank dan e-warong. Berdasarkan observasi di lapangan sebagian KPM belum bisa melakukan penarikan dana secara mandiri karena keterbatasan teknologi sehingga menitipkan ATMnya kepada ketua kelompok PKH setempat. Sedangkan dalam hal pemanfaatan dana bantuan yang diterima oleh peserta PKH dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha dan

kebutuhan lainya yang mendukung tercapainya tujuan PKH. Namun dalam hal pemanfaatan dana bantuan KPM PKH belum sepenuhnya menggunakan dana bantuan sesuai komponen kepesertaanya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan KPM yang selalu ingin dipenuhi saat menerima dana bantuan

f. Rekonsiliasi Hasil Penyaluran Bansos PKH

Berdasarkan observasi dilapangan SDM PKH telah melakukan kegiatan pencocokan dan pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksana PKH dengan bank penyalur. Kegiatan pengecekan data penyaluran telah dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH oleh SDM PKH pada setiap KPM PKH yang telah menerima bantuan, ataupun yang belum menerima bantuan. Pada saat pengecekan data, SDM PKH selalu memberikan informasi KPM melakukan pencairan atau tidak melakukan pencairan. SDM PKH selalu memberikan informasi penyebab KPM tidak dapat melakukan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Pemantauan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

Bantuan sosial kegiatan Pemantauan, Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh Kementrian Sosial, Pelaksana PKH di daerah dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa bantuan sosial telah diterima oleh KPM. Berdasarkan observasi dilapangan SDM PKH telah melakukan kegiatan

pemantauan mengenai hambatan dan perubahan yang terjadi pada KPM, Evaluasi mengenai program yang telah berjalan, monitoring dan pelaporan telah dilakukan saat pertemuan rutin pendamping PKH dengan KPM.

Berdasarkan paparan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme penyaluran bantuan PKH sudah sesuai dengan pedoman program sembako, hanya saja untuk pencairan dan pemanfaatan dana belum sesuai karena KPM belum begitu paham mengenai cara penggunaan alat ATM. Selain itu untuk pemanfaatan dana PKH juga belum sesuai dengan komponen kepesertaannya. Sebagian KPM masih mempergunakannya untuk kepentingan pribadi dan mempercantik diri.

Gambar 4.1

Alur Mekanisme Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)



2. Program Sembako

a. Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan pagu program sembako. Wilayah Kabupaten/Kota

mekanisme pelaksanaan, serta bank penyalur, dalam kegiatan ini meliputi koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif dan penyiapan e-warong

Pada tahap koordinasi telah dilakukan sesuai pedoman program sembako yakni dimulai dengan koordinasi dari pemerintah pusat dengan bank penyalur mengenai kesiapan infrastruktur pendukung terkait pelaksanaan program sembako, menyepakati proses pembukaan rekening dan registrasi/distribusi KKS untuk KPM, menyepakati pelaksanaan dan sosialisasi, menyepakati waktu penyaluran dan melakukan pemetaan resiko dan tantangan. Selanjutnya terdapat koordinasi dari pemerintah provinsi dengan pihak Kabupaten/Kota mengenai seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan program sembako di kabupaten mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan dukungan lain yang diperlukan. Selanjutnya juga terdapat koordinasi dari pemerintah Kabupaten terhadap pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBD dan atau dana Desa, verifikasi dan validasi data calon KPM dalam SIKS-NG menu BSP, proses registrasi/distribusi KKS, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi pemantauan hingga penanganan pengaduan. Dalam proses koordinasi ini hanya saja tidak terdapat koordinasi dengan pihak RT/RW terkait pengalokasian data sasaran calon penerima bantuan sembako sehingga menimbulkan

kecemburuan antar masyarakat karena tidak tepat sasaran dalam penyalurannya.

Dalam mekanisme persiapan khususnya pada penyiapan data KPM. Data ini bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disiapkan oleh pihak desa. Jadi semua usulan calon penerima bantuan sembako baik KPM pengganti maupun KPM baru datanya bersumber dari DTKS.

Dalam mekanisme persiapan khususnya pada pembukaan rekening kolektif. penerima bantuan sembako ini dibuka secara kolektif secara terpusat sesuai data yang telah diserahkan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank Penyalur. Dan dalam pembukaan rekening diikuti dengan percetakan Kartu Keluarga Sejahtera serta PIN Mailer.

Dalam mekanisme persiapan khususnya pada penyiapan e-warong. Setelah adanya persetujuan agen bank dan pedagang untuk menjadi e-warong. Bank penyalur bekerjasama dengan Kementerian Sosial melakukan kerja sama pengelolaan e-warong untuk menjamin pelaksanaan program sembako sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini e-warong menyediakan jenis bahan pangan yang termasuk sumber karbohidrat, sumber protein hewani, satu jenis bahan pangan lainya (yang termasuk protein nabati atau sumber vitamin dan mineral).

Mekanisme penyaluran dalam tingkat desa ditangani oleh bank penyalur, e-warong, dan ketua kelompok sembako di setiap desa, jadi alurnya KPM mengumpulkan KKS kepada ketua kelompok kemudian ketua menyerahkan pada agen bank penyalur setelah itu pihak e-warong menyiapkan bahan pangan yang dikirim ke rumah ketua kelompok sembako di wilayah masing-masing desa/kelurahan.

Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan ketidaksesuaian antara teori dengan fakta karena, kegiatan koordinasi hanya sampai pada tingkat pemerintah desa saja tidak dikoordinasikan dengan kepala dusun maupun RT/RW setempat untuk pengalokasian data sasaran calon penerima bantuan. Selain itu pihak e-warong melakukan pemaketan bahan pangan yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan, hal ini terjadi di setiap kelurahan/desa di Kecamatan Pulung.

b. Sosialisasi dan Edukasi

Dalam mekanisme edukasi dan sosialisasi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan di lapangan, pendamping sembako hanya memberikan sosialisasi pada Kecamatan dan Kelurahan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bantuan sembako dan berdasarkan observasi peneliti di lapangan pendamping sembako juga tidak pernah melakukan sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada KPM serta tidak pernah mengadakan pertemuan

rutinan tiap bulan. Mengenai hal ini Sosialisasi progam sembako kepada aparat pemerintahan desa telah dilaksanakan namun, belum cukup baik pada sebagian penerima KPM sembako yang hanya mengetahui sembako yang didapatkan tanpa mengetahui nama, aturan dan nominal yang berhak beliau dapatkan.

Kebutuhan akan hal pangan sangat diperlukan untuk pemenuhan gizi yang baik dan seimbang dan juga dengan adanya progam sembako dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan sehingga alokasi dana untuk kebutuhan pangan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Siklus kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pulung yang kerap berubah membuat data KPM penerima manfaat banyak yang tidak tepat sasaran dan perlu pembaharuan ulang serta evaluasi yang baik.

c. Registrasi Distribusi KKS

Berdasarkan observasi dilapangan bahwa registrasi distribusi KKS sudah sesuai dengan alur mekanisme yang ada pada buku pedoman progam sembako, karena bank penyalur telah melakukan kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN Mailer kepada penerima manfaat PKH. Untuk kelancaran pendistribusian Bank Penyalur selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial setempat.

d. Penggantian KPM

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat. Dimungkinkan

perubahan daftar KPM karena dalam setiap tahunnya harus ada KPM yang di graduasi. Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan dilapangan, Penggantian KPM ini dapat terjadi karena sudah terdapat perubahan yang lebih baik pada kondisi KPM dari sebelumnya dan sudah dapat dikategorikan masyarakat yang mampu. Oleh sebab itu dilakukan penggantian KPM yang layak dan berhak untuk menerima bantuan sembako terkhusus dari data yang tertera pada DTKS.

Dalam hal perubahan/pembaharuan daftar KPM dilakukan melalui musdes/muskel pada tahun berjalan/ pada tahun pelaksanaan progam sembako. Dengan melibatkan ketua RT/RW tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Namun dalam realitanya tidak terdapat musyawarah dengan RT/RW setempat mengenai perubahan data sasaran penerima manfaat sembako dan yang tahu data siapa saja penerimanya hanya pamong desa.

e. Penyaluran Dana Bantuan

Proses penyaluran dana bantuan sembako dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank penyalur tanpa pengenaan biaya. Berdasarkan observasi dilapangan penyaluran bantuan telah diberikan kepada KPM tepat sesuai jumlah dana yang diberikan yakni senilai Rp. 200.000, namun dirupakan bahan pangan seperti beras, telur, daging maupun sayuran serta buah-buahan. Jadi penyaluran bantuan bagi peserta telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya yakni dilaksanakan setiap

satu bulan sekali. sedangkan untuk kepesertaanya ditetapkan dalam setiap tahun berjalan dan berubah, karena melihat perubahan kondisi perekonomian KPM dalam setiap tahunnya.

f. Pemanfaatan Dana Bantuan

Proses pemanfaatan dana bantuan program sembako dimulai dari KPM datang ke e-warong dengan membawa KKS, setelah itu KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC, setelah dapat mengecek kuota KPM diperkenankan memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan, setelah itu KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan mesin EDC dilanjut KPM dapat menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC.

Dalam mekanisme pemanfaatan dana bantuan program sembako secara non tunai belum terlaksana dengan baik karena belum sesuai pada buku pedoman umum program sembako yakni dimulai dari pembelian bahan pangan di e-warong menggunakan KKS, pada buku pedoman menyatakan KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan sembako namun, dalam realitanya KPM mendapatkan 1 paket bahan pangan yang isinya beras, telur, daging, sayuran maupun buah-buahan yang sudah dipilihkan oleh pihak e-warong dan diantar ke rumah ketua kelompok sembako, KPM juga tidak dapat memilih sendiri e-warong terdekat untuk memilih bahan pangan yang ingin dibeli, sehingga terkadang KPM mendapati

barang yang kualitasnya kurang bagus karena tidak bisa memilih bahan pangan sendiri.

Berdasarkan paparan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sembako belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman progam sembako, karena dalam hal koordinasi hanya sampai pihak pemerintah desa saja tidak dikoordinasikan kepada RT/RW per dusun karena pihak atasan pasti tidak tahu mengenai kondisi keseharian KPM bagaimana, selain itu pihak e-warong melakukan pemaketan bahan pangan yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan sehingga KPM pernah mendapati barang dengan kualitas yang kurang bagus.

Gambar 4.2

Alur Mekanisme Penyaluran Bantuan Sembako



B. Efektivitas Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Pulung

Efektif merupakan sebuah akar dari kata efektivitas yang bermakna sukses dalam melaksanakan sesuatu dengan baik, menurut H. Emerson seperti yang diungkapkan oleh Soewarno Handyaningrat S. Yakni “Efektivitas merupakan pelaksanaan ukuran pencapaian tujuan tertentu”.

Indikator yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengukur efektivitas dari Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako, Kecamatan Pulung berdasarkan Richard M.Steers, yakni sebagai berikut :

1. Ketepatan Sasaran

a. Tepat Sasaran

Sejauh mana ketepatan progam ini diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria merupakan makna dari tepat sasaran.

Adapun syarat yang diperlukan untuk menerima Progam PKH dan Sembako ini yakni Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang namanya sudah tercantum Di DTKS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak pendamping PKH, perangkat Desa, ketua kelompok PKH, dan keluarga penerima manfaat (KPM) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan progam PKH dan Sembako di Kecamatan Pulung belum tepat sasaran dalam arti tidak diberikan kepada yang berhak menerima dan memenuhi kriteria penerima bantuan PKH dan Sembako yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Melainkan justru yang layak dan berhak mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan sedangkan yang masuk dikategorikan sudah mampu justru mendapatkan bantuan sama sekali.

b. Tepat Jumlah

Tepat jumlah yang dimaksud disini adalah dana maupun barang bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat PKH yakni sesuai kriteria komponen yang ada untuk ibu hamil dan balita (Anak Usia Dini) mendapatkan 3.000.000 Rupiah, untuk Lansia dan disabilitas 2.400.000, untuk anak SD/MI 900.000, anak SMP/MTS 1.500.000 dan SMA/SMK sebanyak 2.000.000 Rupiah dan ini akan cair setiap tiga bulan sekali. Sedangkan untuk program Sembako KPM mendapatkan uang 200. 000 Rupiah, namun uang tersebut akan dirupakan dengan barang dan bisa ditukar di e-warong terdekat. Bantuan sembako ini diberikan berupa barang seperti makanan pokok, karena bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mencegah ketidaktepatan pengelolaan program bantuan. Sehingga untuk program PKH dan sembako jumlah dana maupun barang yang diberikan sudah tepat dan sesuai.

c. Tepat Manfaat

Tepat manfaat disini dapat diartikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat dapat memberikan kegunaan bagi penerimanya sesuai dengan tujuan awal pemberian bantuan PKH dan sembako. Untuk bantuan PKH dana yang didapat harapannya digunakan sesuai takaran

kebutuhan KPM berdasarkan kriteria komponen, untuk komponen pendidikan dana harus digunakan untuk keperluan sekolah dan harus memenuhi kewajibanya belajar selama 12 tahun, dan untuk komponen kesehatan KPM diwajibkan untuk memeriksakan kesehatanya melalui kegiatan posyandu. Namun dalam hal ketepatan manfaat dana maupun barang yang diberikan kepada KPM PKH dan Sembako belum seluruhnya tepat manfaat dari segi penggunaan dan pengelolaan. Memang bantuan ini sudah cukup membantu ekonomi keluarga dan meminimalisir pengeluaran, namun masih terdapat KPM yang tidak memanfaatkan dana maupun barang bantuan tersebut sesuai dengan tujuan awal pemberian bantuan PKH dan Sembako justru mereka gunakan untuk bersenang-senang diri.

d. Tepat Administrasi

Tepat administrasi merupakan berkas-berkas yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan sesuai dengan Pedoman Umum Petunjuk Teknis Operasi

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya, tepat administrasi harus disiapkan oleh KPM yakni fotocopy KTP dan KK, yang nantinya akan mendapatkan bantuan PKH dan Sembako ini. Sehingga dari berbagai pernyataan diatas menunjukkan bahwa seluruh KPM sudah sesuai administrasinya dalam

arti sudah tepat administrasinya untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako ini.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan pelaksanaan pengukuran dalam sebuah perkumpulan untuk mengetahui jalannya sosialisasi dan menciptakan komunikasi antar organisasi.

Berdasarkan paparan wawancara pada bab sebelumnya, dapat diketahui dari proses sosialisasi yang merupakan tujuan dari pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, dimana dalam setiap bulannya selalu diadakan pertemuan rutin bulanan dan peserta penerima manfaat berkewajiban untuk mengikuti pertemuan rutin bulanan tersebut. Begitu juga dengan pendamping PKH yang setiap bulanya menyampaikan materi tentang peningkatan kemampuan keluarga dalam bentuk sosialisasi dan belum terlaksananya pengembangan pelatihan maupun keterampilan dengan peserta penerima manfaat PKH dan Sembako.

3. Tujuan Program

Tujuan pertama dari adanya bantuan PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, berdasarkan bukti wawancara pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa tujuan untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat KPM yang duduk di sekolah menengah keatas tidak mau menyelesaikan hingga selesai, yang

membuat bantuan ini harus dipending dan menimbulkan iri kepada mereka yang belum menjadi KPM. Selain itu juga ada KPM komponen kesehatan juga tidak mengalami perubahan apa apa setelah mendapatkan bantuan dan akhirnya bantuan tersebut di cabut oleh pemerintah dengan melihat juga dari segi perekonomian KPM, kondisi fasilitas dan kesehariannya.

Tujuan yang kedua yakni mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan di Kecamatan Pulung telah berjalan, hal ini dapat dilihat dari sebagian KPM yang telah memanfaatkan bantuan ini sesuai aturan yaitu untuk komponen pendidikan digunakan untuk pembayaran biaya sekolah, dalam komponen kesehatan dan kesejahteraan yaitu untuk pemenuhan gizi dari ibu hamil, bayi usia 0-6 tahun, lansia dan penyandang disabilitas. Masih ditemukan KPM yang menggunakan bantuan ini untuk membeli pulsa, jalan-jalan bahkan untuk mempercantik diri yang tidak sesuai dengan aturan PKH untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini tidak adanya kewajiban pengumpulan bukti penggunaan bantuan yang membuat KPM belum sepenuhnya menggunakan dana bantuan sesuai aturan.

Tujuan ketiga yakni Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya telah membuktikan bahwa terdapat perubahan perilaku pada KPM dalam

pendidikan baik untuk anak maupun keluarga penerima manfaat, telah terdapat anak keluarga penerima manfaat yang bersekolah hingga perguruan tinggi yang dapat menjadi cerminan bahwa keluarga penerima manfaat telah menganggap pendidikan merupakan hal yang sangat penting, dalam mendidik anak keluarga penerima manfaat sudah mengurangi perkataan yang tidak pantas maupun bertindak kasar sehingga tercipta kesadaran untuk bersikap sopan. Didalam bidang kesehatan keluarga penerima manfaat juga sudah rutin memeriksa kesehatan di fasilitas kesehatan yaitu posyandu dan puskesmas bukan lagi ke dukun seperti yang dilakukan jaman dahulu.

Tujuan keempat yakni Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya di dalam mengurangi kemiskinan dan pengurangan kesenjangan belum efektif, padahal Pendamping juga telah melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui pencairan tepat waktu dan sosialisasi penggunaan dana untuk mengurangi kemiskinan. Namun hal ini belum dapat membuat tujuan tercapai. sulit menambah mindset KPM untuk keluar dari jurang kemiskinan, menyebabkan hanya pengurangan kesenjangan yang telah dirasakan oleh KPM di Kecamatan Pulung melalui pemenuhan makan sehari-hari bagi KPM.

Tujuan kelima yakni mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Berdasarkan bukti wawancara pada bab sebelumnya dalam hal

tujuan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal belum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. dalam mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM diharapkan dapat memberikan ketrampilan terhadap KPM untuk membantu mereka dalam hal seni dan *skill* yang nantinya ketrampilan tersebut dapat dijadikan sebagai modal/acuan mereka untuk membuka usaha baru dan pengetahuan lebih luas terhadap mereka. Namun hal tersebut hanya terdapat pengarahan saja tidak disertai dengan pengembangan pelatihan dan keterampilan saja sehingga hanya ada teori saja tanpa praktek yang membuat KPM hanya berangan-angan saja dari pengrahan tersebut. Adapun mengenai sistem perbankan dan penggunaan ATM sebagai alat penyaluran bantuan juga belum efektif, karena mereka belum begitu paham mengenai alat penyaluran bantuan ini karena keterbatasan teknologi jaman sekarang. Sehingga waktu pencairan KPM selalu minta bantuan ketua kelompok PKH untuk pencairan.

Sedangkan tujuan dari adanya bantuan sembako yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, Meningkatkan bahan pangan dengan ketepatan sasaran, waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan administrasi, Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan paparan bukti wawancara pada bab sebelumnya mengenai tujuan utama progam PKH dan Sembako yakni untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan telah dijelaskan oleh beberapa pihak bahwasanya kebutuhan KPM telah terbantu setelah mendapatkan bantuan walaupun tidak seberapa namun bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sebagian KPM ada yang kurang tepat sasaran dalam hal pengelolaan data sasaran KPM. seharusnya orang yang layak dan berhak mendapatkan bantuan itu harus mendapatkan bantuan ini, sedangkan warga yang sudah mampu tidak perlu mendapatkan bantuan ini lagi karena hanya menyebabkan kecemburuan sosial antar masyarakat, selain itu juga kurang tepat dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan dana maupun barang yang diberikan, seharusnya dana yang di dapat itu dimanfaatkan sesuai kebutuhan saja dan dimanfaatkan sesuai tujuan awal pemberian sembako, selain itu barang berupa makanan pokok seperti beras kurang berkualitas seperti yang tertera pada buku panduan sembako. akhirnya sebagian tidak dikonsumsi oleh masyarakat dan memilih dijual ke warung terdekat. Selain itu pada buku panduan sembako disebutkan bahwa KPM memiliki hak kendali dalam memilih bahan makanan pokok yang tersedia di e-warong, namun dalam realitanya berbeda, disini KPM langsung menerima jadi setelah disiapkan oleh pihak e-warong dan diantar kerumah ketua PKH setempat. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa program ini belum sesuai tujuan awal pemberian bantuan PKH dan Sembako.

4. Pemantauan Progam

Pemantauan progam merupakan kepekaan mengenai pengetahuan yang dibutuhkan. Dalam hal ini pemantauan tingkat optimal dapat digunakan untuk melaksanakan perhitungan dengan dengan periode yang dapat memperlihatkan mobilitas dalam mencapai tujuan. Adapun tahap ini berpondasi pada UU No. 6 Tahun 2014 mengenai desa dengan tujuan untuk memastikan realisasi progam PKH dan Sembako sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Klasifikasi pemantaunya adalah sebagai berikut:

a. Pemantauan Publik

Pemantauan publik merupakan pemantauan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung dalam proses pengadaan progam PKH dan Sembako. Berdasarkan hasil temuan pada bab sebelumnya yang telah dilakukan oleh pendamping, dimana hasil wawancara menunjukkan bahwa, pihak pendamping kecamatan, pamong desa/perangkat desa, sudah melakukan pemantauan progam terhadap KPM penerima PKH dan Sembako, namun berbeda dengan apa yang dikatakan oleh KPM penerima manfaat bahwa tidak semua telah dilakukan pemantauan dari pihak pendamping maupun perangkat/pamong desa setempat, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sulasmi bahwa pernah melakukan pemantauan akan tetapi tidak keseluruhan KPM yang dipantau. Sehingga dalam hal ini progam PKH dan Sembako dapat dikatakan belum efektif karena tidak keseluruhan KPM terpantau oleh pendamping.

b. Pemantauan Fungsional

Pemantauan realisasi ini dapat diketahui dari proses pemantauan fungsional. tidak menutup kemungkinan KPM yang mendapatkan bantuan PKH dan Sembako mengalami perubahan maupun peningkatan. Karena hal ini sangat berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan KPM sendiri dalam memanfaatkan dana bantuan tersebut, jika mereka gunakan untuk keperluan yang tepat pastinya bantuan ini sangat membantu dan menciptakan keberkahan untuk mereka. Berbicara mengenai pemantauan fungsional para pendamping kecamatan telah melakukan pemantauan secara fungsional dengan pihak provinsi, selain itu pendamping juga selalu melaksanakan kegiatan rutin tiap bulanya, jadi dalam kegiatan tersebut pendamping juga memantau perkembangan KPM setelah diberi bantuan ini walaupun tidak seluruhnya dipantau oleh pendamping ke rumah masing-masing KPM

Tabel 4.1
Efektivitas Program Keluarga Harapan dan Sembako

No	Indikator	Kriteria		Hasil dilapngan	Keterangan
1.	Ketepatan Sasaran				
	Tepat Sasaran	- data peserta PKH bersumber dari DTKS -Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan Rumah Tangga Sasaran (RTS)	x	- belum tepat sasaran, walaupun bersumber dari DTKS namun, masih banyak RTSM dan RTS yang belum mendapatkan	Belum efektif

				bantuan	
	Tepat Jumlah	<u>Progam PKH</u> -Ibu hamil dan balita Rp. 3.000.000 - Anak SD Rp. 900.000 - Anak SMP Rp. 1.500.000 -Anak SMA Rp. 2.000.000 - Lansia dan Disabilitas Rp. 2.400.000 <u>Progam Sembako</u> -Rp. 200.000 - berupa bahan makanan pokok	☐	Bantuan berupa bahan pangan yang diberikan sudah tepat jumlahnya	Efektif
	Tepat Manfaat	- komponen pendidikan untuk biaya anak sekolah -komponen kesehatan dan kesejahteraan digunakan untuk pemenuhan gizi dari ibu hamil, bayi usia 0-6 tahun, lansia dan penyandang disabilitas -meminimalisir pengeluaran KPM	X	Dalam progam PKH dana yang telah didapatkan belum tepat manfaat dalam penggunaanya, karena kebutuhan KPM tidak sesuai dengan perencanaan, jadi dana dari PKH ini KPM tidak selalu dipergunakan untuk biaya anak sekolah dan pemenuhan gizi saja. melainkan juga dipergunakan	Kurang Efektif

				untuk membeli kebutuhan yang lain bahkan juga untuk mempercantik diri.	
	Tepat Administrasi	-Fotocopy KK dan KTP	☐	Sudah tepat administrasi, dimana KPM mengumpulkan Fotocopy KK dan KTP	Efektif
2.	Sosialisasi Progam	-Pengenalan progam PKH -Penyampaian materi tentang pendidikan dan kesehatan -penyampaian cara pencairan dana KPM	☐	Dalam progam PKH sudah diadakan sosialisasi progam tentang pengenalan progam bertujuan agar nantinya KPM tidak salah faham dalam penggunaan bantuanya, namun dalam progam sembako belum diadakan sosialisasi progam dengan KPM langsung hanya sampai pihak desa saja.	Kurang Efektif
3.	Tujuan Progam	- Peningkatan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan	X	-Belum terpenuhinya kewajiban untuk sekolah 12 tahun - KPM merasa terbantu dengan adanya bantuan	Kurang Efektif

	sosial - mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan - Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial - Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan -mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) <u>Progam Sembako</u> - mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan	☐ ☐ X x	pkh ini bisa sedikit pengurangi beban pengeluaran walaupun keluar dari kebutuhan komponen - telah terciptanya perubahan perilaku terhadap diri KPM, dan kemandirian dalam mengakses layanan kesehatan - walupun dana pkh telah dicairkan tepat waktu, tapi masih saja belum dapat mengurangi kemiskinan karena KPM sulit keluar dari jurang kemiskinan dan belum berani mengambil langkah untuk memiliki usaha secara mandiri -KPM telah dikenalkan mengenai manfaat produk dan jasa	
--	--	---	---	--

		Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, Meningkatkan bahan pangan dengan ketepatan sasaran, waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan administrasi, Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.	X	keuangan formal, namun KPM belum bisa mengoperasionalkan jasa keuangan tersebut. - di dalam program sembako, tujuannya sudah sesuai hanya saja KPM tidak memiliki hak kendali dalam pemilihan bahan makanan sehingga KPM mendapati bahan pangan dengan kualitas yang tidak bagus	
4.	Pemantauan Progam				
	Pemantauan Publik	pemantauan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan	X	-Pemantauan yang dilakukan oleh pihak pendamping belum merata keseluruh KPM sehingga hanya sebagian yang dipantau oleh pendamping	Kurang Efektif
	Pemantauan Fungsional	-Pemantauan dalam waktu-waktu tertentu	☐	-Pemantauan yang dilakukan oleh pendamping secara tidak langsung mengetahui keberhasilan KPM secara bertahap	

C. Faktor Penghambat Keberhasilan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako Terhadap KPM di Kecamatan Pulung

1. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu hal penting yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah progam. adapun menurut Suharto koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling mengatur atau menyepakati sesuatu.¹²⁰ Dengan adanya koordinasi ini diharapkan dapat merekomendasikan keluarga miskin dan rentan miskin menjadi keluarga penerima manfaat progam bantuan PKH dan Sembako serta terdapat koordinasi progam PKH dan Sembako dalam pengelolaan data sasaran penerima manfaat. Namun dalam progam PKH dan Sembako di Kecamatan Pulung koordinasi menjadi penghambat yang membuat progam tidak efektif. Karena tidak terdapat koordinasi dalam Progam Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pulung terkait dengan pengelolaan data sasaran PKH.

Berdasarkan bukti wawancara pada bab sebelumnya, unit pelaksanaan PKH Kecamatan Pulung, pendamping PKH kecamatan maupun pihak kelurahan, RT dan RW belum terdapat koordinasi untuk merekomendasikan keluarga miskin dan rentan miskin menjadi keluarga penerima manfaat, karena semua pengelolaan data berasal dari Kementerian Sosial. Jadi hal ini mengakibatkan masih terdapat keluarga miskin dan

¹²⁰ Apando, "Efektivitas Progam Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan."

rentan miskin yang belum menjadi keluarga penerima manfaat karena tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu.

2. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu hal penting yang berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program. Perencanaan sangat dibutuhkan agar terciptanya efektivitas Program Penerima Manfaat (PKH) dan Sembako. Menurut Siagian perencanaan adalah keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan sekarang dan apa yang akan dikerjakan di masa depan.¹²¹ Dalam hal perencanaan program ini diharapkan terdapat perencanaan yang matang dalam menciptakan kemandirian serta diharapkan terdapat arahan mengenai apa yang harus KPM lakukan dalam penggunaan dan pengelolaan dana bantuan. Namun sesuai realitanya perencanaan dalam Program Keluarga Harapan dan Sembako di Kecamatan Pulung belum matang.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya belum terdapat perencanaan yang matang dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako dalam menciptakan kemandirian maupun mengurangi kemiskinan, dikarenakan perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan KPM, ternyata kebutuhannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga menyebabkan bantuan tersebut dipergunakan untuk kepentingan diluar komponen. Selain itu pendamping hanya mengarahkan pada wirausaha tanpa memberikan arahan apa yang harus KPM lakukan setelah

¹²¹ Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

menerima dana maupun barang bantuan dari pemerintah dan pendamping tidak pernah memberikan pengembangan pelatihan maupun keterampilan terhadap KPM.

3. Ketepatan Layanan

Ketepatan layanan merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya sebuah program. Menurut Ripley ketepatan layanan digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam suatu program dilakukan tepat apa tidak oleh sasaran.¹²² Dalam hal ketepatan layanan ini diharapkan KPM dapat menjalankan pengenalan jasa keuangan dengan tepat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan serta dapat mengoperasikan ATM sebagai alat penyaluran dana bantuan.

Berdasarkan paparan wawancara pada bab sebelumnya dalam hal ketepatan layanan belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Sembako belum menjalankan pengenalan jasa keuangan dengan tepat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini masih terdapat KPM PKH dan Sembako yang tidak dapat mengoperasikan kartu ATM menip waktu pencairan bantuan.

D. Efektivitas Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagai seorang muslim, sebaiknya segala macam aspek kehidupan yang dijalankan sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Tidak terkecuali dalam aktivitas perekonomian, termasuk cara mengatur keuangan. Islam telah

¹²² Joyo, "Efektivitas Implementasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) di Desa Sooko, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan."

menetapkan ajaran-ajaran bagaimana cara seseorang mengatur persoalan finansialnya dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan tujuan agar umat muslim tidak salah dalam melakukan perhitungan akan kehidupan finansialnya yang merugikan dan membuat hidup sejahtera. Menurut manajemen Islam, dengan menggunakan prinsip untuk mengatur hidupnya agar efektif adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan maksudnya dalam menjalankan suatu kegiatan seorang muslim harus berbuat baik, bertindak yang harmonis, pantas dan wajar dan tidak berlebih-lebihan, tidak juga kikir dan pelit. Dalam efektivitas pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako di Kecamatan Pulung dilihat dari proses penerimaan dana bantuan pada anggota PKH sudah sesuai dengan besaran bantuan yang sudah ditentukan berdasarkan komplementer yang diterimanya. Hal ini dibuktikan dengan para penerima anggota PKH yang menerima dana bantuan setiap tiga bulan sekali dengan besaran bantuan jumlah sesuai dengan komplementer yang diterimanya. Jadi efektivitas pengelolaan PKH di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan.

2. Prinsip mencapai kemanfaatan

Prinsip mencapai kemanfaatan maksudnya seorang muslim dalam menjalankan kegiatannya harus bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, bagi lingkungan dan agamanya. Adanya kegiatan pertemuan rutin setiap bulan anggota PKH dapat merasakan manfaat yang didapat

dari kegiatan tersebut. Manfaat yang dirasakan anggota PKH dari kegiatan PKH yaitu adanya sosialisasi dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan contoh yang baik untuk dipraktikkan didalam kegiatan dirumah. Jadi efektivitas pengelolaan PKH di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip kemanfaatan.

3. Prinsip tidak boros

Prinsip tidak boros yang dimaksud disini adalah setiap muslim dalam menjalankan aktivitasnya dalam menggunakan harta, waktu, dan tenaga tidak digunakan secara boros. Jika dilihat dari sudut ekonomi sifat boros termasuk biaya sehingga dalam penggunaan biaya menjadi beban dalam manajemen. Dalam efektivitas penegelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako di Kecamatan Pulung dilihat dari pengelolaan dana bantuan yang diterima oleh anggota penerima manfaat masih belum efektif, karena anggota penerima manfaat selain menggunakan dana bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan komponen, anggota penerima manfaat justru menggunakan dana tersebut untuk membeli barang diluar kebutuhan komponen. Seharusnya anggota penerima manfaat menggunakan dana bantuan PKH sesuai dengan bantuan komponen agar menghindari adanya sikap boros. Jadi efektivitas dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo masih belum memenuhi prinsip tidak boros.

4. Prinsip berlaku adil

Prinsip berlaku adil artinya seorang yang ingin mencapai tindakan yang efisien haruslah berlaku adil terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan adil dalam semua perbuatannya. Dalam efektivitas pengelolaan PKH di Kecamatan Pulung masih belum tepat sasaran dari penerimaan anggota PKH dan Sembako, karena banyaknya masyarakat miskin sehingga masih ada yang belum mendapatkan manfaat dari program tersebut. sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako tersebut belum dikatakan merata. Hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat masyarakat/keluarga tidak mampu yang tidak mendapatkan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) serta Sembako dan keluarga yang dikategorikan keluarga mampu mendapatkan bantuan PKH. Jadi efektivitas pengelolaan PKH belum memenuhi prinsip keadilan.

E. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan Masyarakat menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, Imam Al-Ghozali menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam progam pemberian bantuan Progam Keluarga Harapan dan Sembako, Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam

masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan karena kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi.

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan saling bersaing dan bertentangan. Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:

a. Keadilan

Keadilan merupakan suatu nilai dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Dalam pemberian bantuan Program Keluarga Harapan dan Sembako di Kecamatan Pulung belum sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam ekonomi islam yakni nilai keadilan, karena masih banyaknya data penerima bantuan yang belum tepat sasaran dan belum meratanya program bantuan ini diberikan kepada keluarga yang benar-benar tidak mampu.

b. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban digunakan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemashlahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja. Dalam efektivitas pemberian Program

Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako di Kecamatan Pulung dilihat dari tujuan pemberian bantuan program PKH dan Sembako Keluarga penerima manfaat belum memenuhi kewajibannya sebagai penerima manfaat, jadi pada Program Keluarga Harapan, penerima manfaat belum bisa mempertanggungjawabkan dana yang diterima. Karena dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan diluar komponen kepesertaan PKH.

c. Takafful (jaminan sosial)

Adanya jaminan sosial dimasyarakat mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.¹²³ Dalam efektivitas pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako di Kecamatan Pulung, penerima manfaat telah terjamin dengan terpenuhinya kebutuhan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan, namun penerima manfaat tersebut justru selalu mengandalkan adanya bantuan ini dan enggan berusaha lebih keras lagi untuk mencapai kondisi perekonomian keluarga yang lebih baik. karena mereka sudah berasumsi bahwa hidup mereka telah dijamin oleh pemerintah jadi tidak perlu kerja lebih keras lagi.

¹²³ *Ibid.*, 78.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penyaluran bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman umum program PKH dan Sembako, pada program PKH untuk pencairan dan pemanfaatan dana belum sesuai Sedangkan untuk program sembako belum sesuai dalam hal koordinasi, dan belum memiliki hak kendali dalam pemilihan bahan pangan sesuai kebutuhan KPM.

2. Efektivitas Pemberian Bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako di Kecamatan Pulung dalam setiap kriteria yaitu ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, dan ketepatan manfaat, sosialisasi program dan pemantauan yang digunakan dalam penelitian ini belum sepenuhnya efektif karena belum sesuai dengan pedoman program sembako.

3. Faktor Yang Menghambat Keberhasilan Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako

Faktor keberhasilan progam PKH dan Sembako di Kecamatan Pulung terdiri dari tiga yaitu, koordinasi, perencanaan dan ketepatan layanan. Tidak terdapat koordiasi mengenai pengelolaan data sasaran Progam PKH dan Sembako di Kecamatan Pulung oleh pendamping PKH Kecamatan, pejabat setempat, baik kelurahan, kepala dusun RT/RW. Kedua tidak terdapat rencana yang matang dalam menciptakan kemandirian dan mengurangi kemiskinan. ketiga, ketepatan layanan belum berjalan dengan baik, karena KPM belum bisa menjalankan pengenalan jasa keuangan formal.

Berdasarkan data dilapangan efektivitas Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako di Kecamatan Pulung dilihat dari 4 prinsip menurut manajemen islam, keempat prinsip tersebut yang sudah terpenuhi yaitu prinsip keseimbangan saja. Sedangkan prinsip tidak boros dan kemanfaatan belum terpenuhi karena penerima bantuan PKH dan Sembako tidak menggunakan dana bantuan yang di dapat dari PKH. Selain itu berdasarkan nilai-nilai dasar ekonomi islam masyarakat sudah terjamin namun belum dapat memenuhi prinsip keadilan dan pertanggungjawaban.

B. SARAN

1. Bagi pihak Dinas Sosial, atau pimpinan PKH (Koordinator Kabupaten), sebaiknya dalam mengambil atau mengelola data perihal masyarkat miskin atau keluarga tidak mampu diharapkan lebih tepat sasaran lagi dengan

adanya pendataan kembali warga yang berhak mendapatkan bantuan Progam PKH dan Sembak, karena belum meratanya progam PKH dan Sembako untuk warga miskin yang ada di Kecamatan Pulung

2. Bagi pendamping PKH, diharapkan agar lebih berperan aktif lagi dalam menyampaikan sosialisasi dalam hal keterampilan. Karena adanya bakat keterampilan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu.
3. Bagi penerima bantuan PKH dan Sembako, sebaiknya dalam mengelola dana dan barang bantuan yang diberikan digunakan semaksimal mungkin untuk membeli kebutuhan sesuai komponennya. Karena dengan begitu penerima PKH dan Sembako tidak akan merasa kurang dengan bantuan yang diberikan. Dan
4. Bagi peneliti selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa progam penanggulangan kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat lainnya yang telah di implementasikan oleh pemerintah, sehingga dapat diketahui progam mana sajakah yang memiliki pengaruh besar dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyad. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: UHAMKA, 2016.
- Afif Izam Taufik , Ajeng Wahyuni. “Efektivitas Pemberdayaan Zakat Produktif di Laboratorium Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf IAIN Ponorogo.” *Nidhomiya : Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* Vol. 1 No 1 (2022): 5.
- Agung Eko Purwana. “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Justitia Islamica* Vol. 11 No. 1 (2014): 22.
- Ali Anwar Yusuf. *Islam dan Sains Modern Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2006.
- Almizan. “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, Maqdis.” *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Vol.1, No.1 (2016): 74.
- Andre. Wawancara, 5 Maret 2023.
- Anwar, Khaerul. “Efektivitas [Rogam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Apando, Ekardo. “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.” *Journal STKIP PGRI Sumatera Barat* Vol. 3 No. 1 (2014): 7.
- Asep Usman Ismail. *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Ayu, Dwi. “Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid '19 di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.” Universitas IPDN, 2022.
- Badan Pusat Statistik Ponorogo. *Profil Kemiskinan Maret 2022 Kabupaten Ponorogo*, t.t.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2022*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2022.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Boyami. Wawancara, 4 Maret 2023.
- “Data Terpadu Bantuan Sosial, Peraturan tentang Bansos, dalam <https://dinsos.ponorogo.go.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/>,” Diakses pada 9 Januari Pukul 07.49 WIB. <https://dinsos.ponorogo.go.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/>.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Diah Mukminatul Hasimi. "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* Vol. 1 No.1 (2020): 66.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. dalam <https://kemensos.go.id> diakses 11 Januari 2023, t.t.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. dalam <https://kemensos.go.id> diakses pada 10 Januari 2023, t.t.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021 - 2024*. dalam <https://kemensos.go.id> diakses pada 12 Januari 2023, t.t.
- Effendi, Mochtar. *Manajemen Suatu Pengantar Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986.
- Effendy O. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Handoko, Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2018.
- John.C, Mowen. *Perilaku konsumen (Jilid 2)*. Jakarta: Erlangga, 2020.
- Joyo, Mashari Noto. "Efektivitas Implementasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) di Desa Sooko, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan." *Journal Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Airlangga* Vol. 5 No. 2 (2017): 4.
- Karmila. "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Katiyem. Wawancara, 21 Januari 2023.
- Katri. Wawancara, 22 Januari 2023.
- Kurniawan, Andre Agus. "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Surabaya : " Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945, 2020.
- Kusumawari, Erny. "Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*, t.t.
- Lincoln, Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Peberbit dan Percetakan STIM YKPN, 2020.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Najidah, Nurul. “Efektivitas Progam Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.” *Journal Of Public Policy And Management Review* Vol. 8 No. 2 (2019): 7.
- Ni Wayan Budiani. “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.” *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT* Vol. 2 No. 1 (2017): 34.
- Nur Farida. Wawancara, 6 Maret 2023.
- Nurkhotijah, Ade. “Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten.” (*Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten*), 2018.
- Nuryana, Wiwin. “Efektivitas Pemberian Bantuan Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Sawoo Kabupaten Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2022.
- Octavia, Rahma Dwi. “Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” Universitas IAIN Negeri Parepare, 2022.
- Pratiwi, Desi. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada peserta pkh desa kedaton I Kec. Batangsari Nuban Kab. Lampung Timur).” Universitas IAIN Metro, 2020.
- Prichatin, Asti. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas).” IAIN Purwokerto, 2019.
- Rizal Khadafi dan Dyah Mutiarin,. “Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul.” *Journal Of Governance And Public Policy* Vol. 4 No. 2 (2017): 335–36.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*, 2012.
- Semi. Wawancara, 5 Maret 2023.

- Setiyawati. Wawancara, 6 Maret 2023.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Sikat. Wawancara, 7 Maret 2023.
- Sirus. Wawancara, 7 Maret 2023.
- Siti Nur Mahmudah. "Dasar-Dasar Ekonomi Islam." *Sumatera Barat PT. Global Eksekutif Teknologi*, 2022, 3–4.
- Soekartawi. *Monitoring dan Evaluasi Proyek Pendidikan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka, 1995.
- Soenah. Wawancara, 5 Maret 2023.
- Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan*. Jakarta: Manajemen Haji Masagung, 2016.
- Sopha, Julia. *Efektifitas Program Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Sri Lestari Rahayu. *Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang dan ke depan)*. Bandung: Fokus Media, 2012.
- Sri Utami. Wawancara, 4 Maret 2023.
- . Wawancara, 6 Maret 2023.
- Srikin. Wawancara, 5 Maret 2023.
- Sriyati. Wawancara, 21 Januari 2021.
- Suardi, Didi. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Volume 6 Nomor 2 (2021): 327.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Sulasmis. Wawancara, 4 Maret 2023.
- Sulastri. Wawancara, 2 Maret 2023.
- Sumani. Wawancara, 4 Maret 2023.
- Sunarti, Eunis. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Perkembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Sunaryo. Wawancara, 10 Maret 2023.
- Suprianta. Wawancara, 4 Maret 2023.
- Suryaden. "Permensos 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako," t.t. dalam <https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-5-2021-program-sem-bako>.

- Suyanti. “Efektivitas Progam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi kasus di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas).” Universitas Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty. “Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan.” *Prosiding: Riset&PKM*, Vol. 4 No. 1 (2017): 90.
- Syaiful. Wawancara, 2 Maret 2023.
- Syaiful Hanafi. Pendamping PKH Kecamatan Pulung, Minggu, 08 Januari Pukul : 09.30 WIB.
- Titin Nuryana. Wawancara, 21 Januari 2023.
- Tulus, Agus. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Utama Ridwan, 2009.
- Tumini. Wawancara, 7 Maret 2023.
- Tyas Wardani Nurwan dan Helmi Hasan. “Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM: Studi Di Sijunjung Sumatera Barat.” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* Vol. 10, No. 1 (2020): 04.
- Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, t.t.
- V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Virna Museliza, Afrizal, Risma Eliza. “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.” *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik* Volume2 Nomor 1 (2020): 118–27.
- Zainollah dan Farid Wahyudi. “Analisis Efektivitas Kebijakan Program Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Ipteks* Vol.3, No.2 (2018): 165.



